

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Wilayah Kota Batu

Pemekaran Kota Batu merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, peningkatan pembangunan daerah serta kemandirian daerah. Selama kurun 8 tahun setelah pemekaran, dilakukan evaluasi pada pelaksanaan pembangunan dan sistem pemerintahan Kota Batu untuk mengetahui tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi hasil pemekaran. Evaluasi ini menggunakan data karakteristik wilayah daerah otonomi.

Karakteristik wilayah Kota Batu disusun berdasarkan pada komponen evaluasi yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, yang terdiri dari karakteristik fisik dasar, karakteristik kependudukan, karakteristik fisik binaan, karakteristik perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah otonomi. Adapun penjabaran karakteristik wilayah Kota Batu dipaparkan sebagai berikut:

4.1.1 Karakteristik Fisik Dasar Kota Batu

Karakteristik fisik dasar merupakan pemaparan mengenai kondisi geografis Kota Batu, termasuk kondisi luas wilayah dan batas administrasi Kota Batu.

A. Kondisi Geografis

Ditinjau dari letak astronominya, Kota Batu terletak diantara $122^{\circ} 17'$ sampai dengan $122^{\circ} 57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44'$ sampai dengan $8^{\circ} 26'$ Lintang Selatan. Adapun batas administrasi Kota Batu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang

1. Luas Wilayah

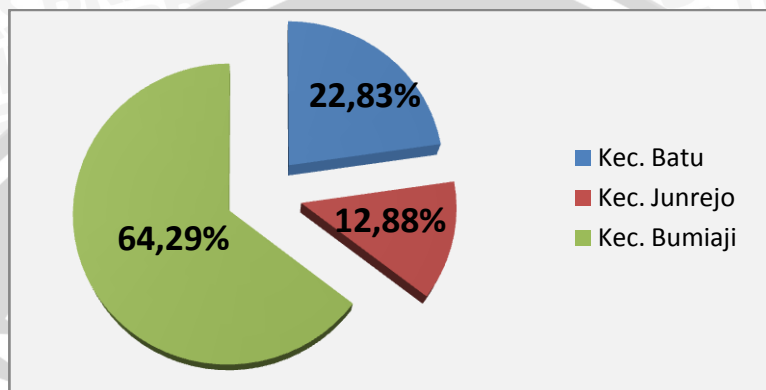
Wilayah Kota Batu terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu daerah lereng/bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah dataran. Luas wilayah Kota Batu adalah 19.908,72 Ha dengan proporsi untuk lahan kering adalah 17.247,72 Ha dan lahan sawah adalah 2.661Ha. Untuk lebih jelasnya perbandingan luas wilayah tiap kecamatan Kota Batu dapat dilihat pada tabel 4.1 dan gambar 4.1.

Tabel 4. 1
Luas Wilayah Kota Batu Per Kecamatan

Kecamatan	Lahan Kering (Ha)	Lahan Sawah (Ha)	Luas Wilayah Keseluruhan (Ha)	Persentase Dari Luas Wilayah Keseluruhan Kota Batu (%)
Batu	3.818,81	727	4.545,81	22,83
Junrejo	1.456,02	1.109	2.565,02	12,88
Bumiaji	11.972,89	825	12.797,89	64,29
TOTAL	17.247,22	2.661	19.908,72	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan :  Wilayah Kecamatan Terluas



Gambar 4. 1 Perbandingan Luas Wilayah Per Kecamatan

Berdasarkan hasil perbandingan, maka dapat dilihat bahwa luas wilayah terluas terdapat pada Kecamatan Bumiaji yaitu 12.797,89 Ha atau sekitar 64,29% dari luas keseluruhan wilayah Kota Batu. Untuk luas wilayah efektif Kota Batu yang dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya adalah seluas 11.466,62 Ha atau dengan kata lain 57,60 % dari total keseluruhan luas wilayah Kota Batu. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4. 2
Luas Wilayah Efektif Kota Batu

Jenis Kawasan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Dari Wilayah Keseluruhan (%)
Wilayah Tidak Efektif		
Kawasan Lindung	3.099,6	
Kawasan Pelestarian Alam	5.342,5	42,40
Wilayah Efektif		
Kawasan Budidaya	11.466,62	57,60
TOTAL KESELURUHAN	19908,72	100

Sumber: RTRW Kota Batu Tahun 2009-2029

Kawasan budidaya merupakan kawasan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan sesuai potensi SDA, SDM, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya yang terdapat pada Kota Batu meliputi kawasan hutan produksi, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertanian, kawasan industri dan kawasan pariwisata.

2. Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi Daerah Otonomi Batu terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Tiga kecamatan ini terdiri dari 4 kelurahan dan 20 desa dengan 231 RW dan 1.092 RT. Wilayah administrasi Kecamatan Batu terdiri dari 4 kelurahan dan 4 desa dengan 91 RW. Sedangkan wilayah administrasi Kecamatan Junrejo terdiri dari 7 desa dengan 59 RW.

Tabel 4. 3
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Batu

No.	Nama Kecamatan	Kelurahan	Desa	RW	RT
1.	Batu	4	4	91	427
2.	Junrejo	-	7	59	239
3.	Bumiaji	-	9	81	426
TOTAL KESELURUHAN		4	24	231	1.092

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Berdasarkan data yang diperoleh, keseluruhan kelurahan maupun desa yang terdapat pada Kota Batu termasuk pada desa/kelurahan swasembada. Keberadaan desa swasembada Kota Batu memperlihatkan bahwa semua desa/kelurahan Kota Batu telah memiliki kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Sistem dan fungsi wilayah Kota Batu dibagi menjadi 3 bagian wilayah Kota (BWK) berdasarkan pada batas administrasi kecamatan, yaitu:

1. BWK I Kecamatan Batu merupakan pusat kota dengan pusat pelayanan terdapat pada Kelurahan Sisir dan Kelurahan Ngaglik. BWK I Kecamatan Batu berfungsi sebagai pusat pelayanan skala kota meliputi pusat pelayanan pemerintahan, komersial modern, wisata dan akomodasi skala regional dan fasilitas pelayanan skala Kota Batu.
2. BWK II Kecamatan Junrejo merupakan kawasan pendukung kegiatan pusat kota dan wisata dengan pusat pelayanan berada pada Desa Junrejo. BWK II Kecamatan Junrejo berfungsi sebagai sub pusat pelayanan kota antara lain sebagai pusat pelayanan perkantoran pemerintahan dan militer, fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, perkebunan dan industri kecil (kerajinan).
3. BWK III Kecamatan Bumiaji merupakan kawasan pengembangan agropolitan dan agrotourism dengan pusat pelayanan berada pada Desa Punten. BWK III Kecamatan Bumiaji berfungsi sebagai sub pusat pelayanan kota dengan kegiatan ekotourism dan agrotourism, perkebunan dan holtikultura, fasilitas pelayanan (pendidikan), perdagangan regional agribisnis, dan pusat pelayanan transportasi regional.

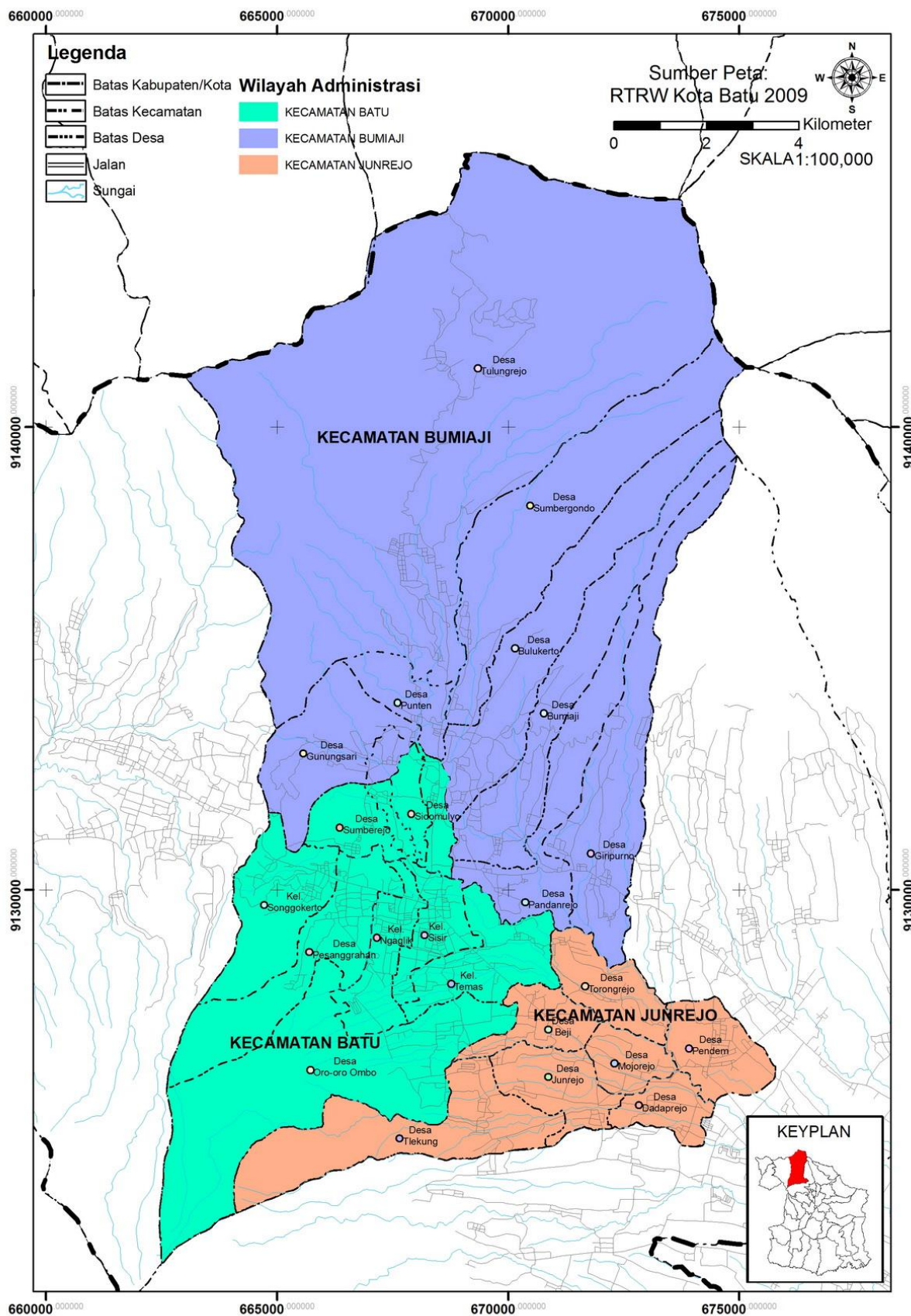
Kecamatan-kecamatan yang terdapat pada wilayah administratif Batu masing-masing memiliki jarak 3-5 km menuju pusat pemerintahan Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4
Jarak Kecamatan Menuju Pusat Kota Batu

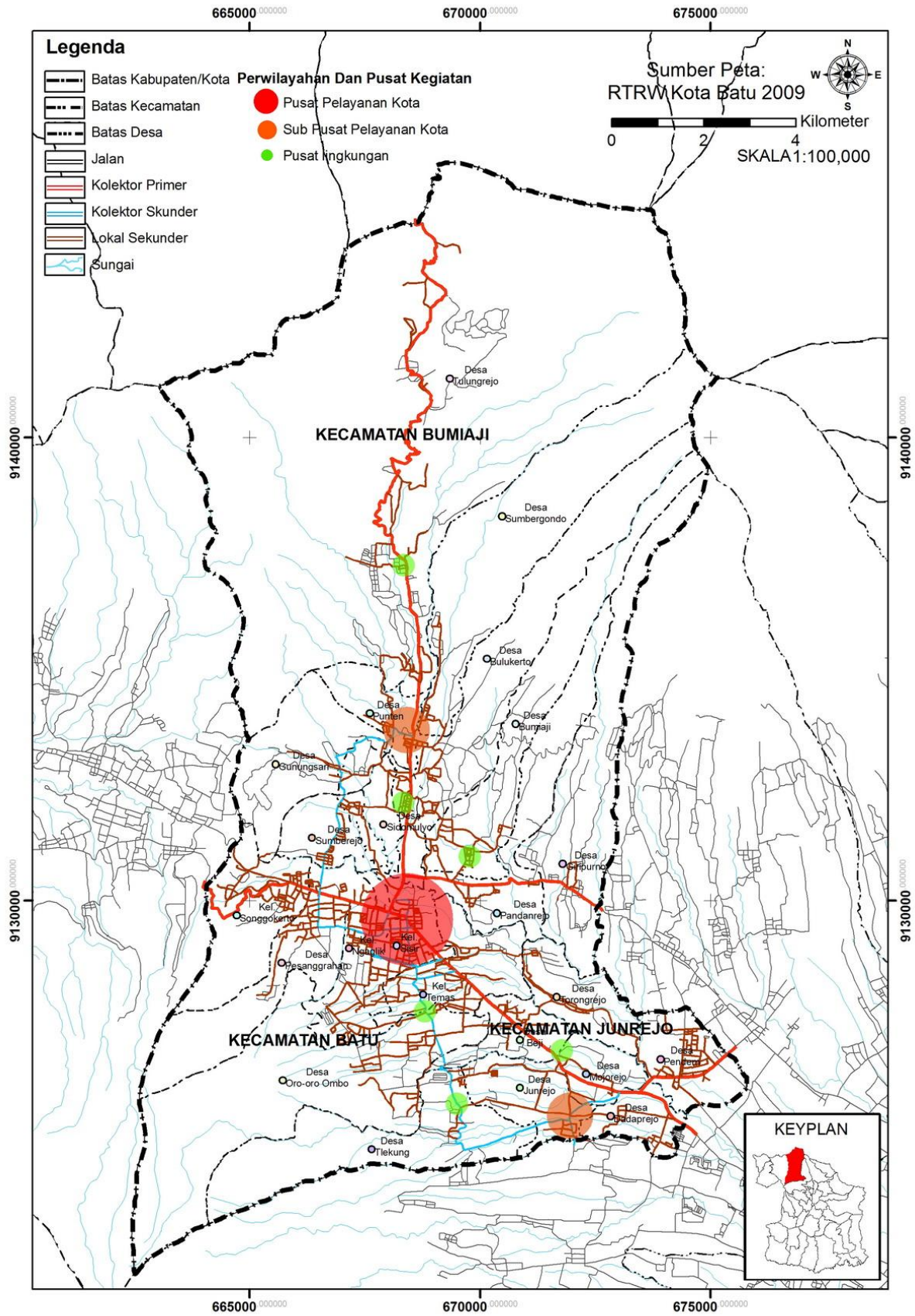
Kecamatan	Jarak Menuju Pusat Kota (km)	Waktu Tempuh (menit)
Batu	0	0
Junrejo	5,14	8
Bumiaji	3,78	6
TOTAL	8,92	14

Berdasarkan data yang diperoleh, jarak Kecamatan Junrejo menuju pusat pemerintahan Kota Batu adalah 5,14 km dengan waktu tempuh selama 8 menit perjalanan. Sedangkan jarak antara Kecamatan Bumiaji dengan pusat Kota Batu adalah 3,78 km dengan waktu tempuh selama 5-6 menit perjalanan.

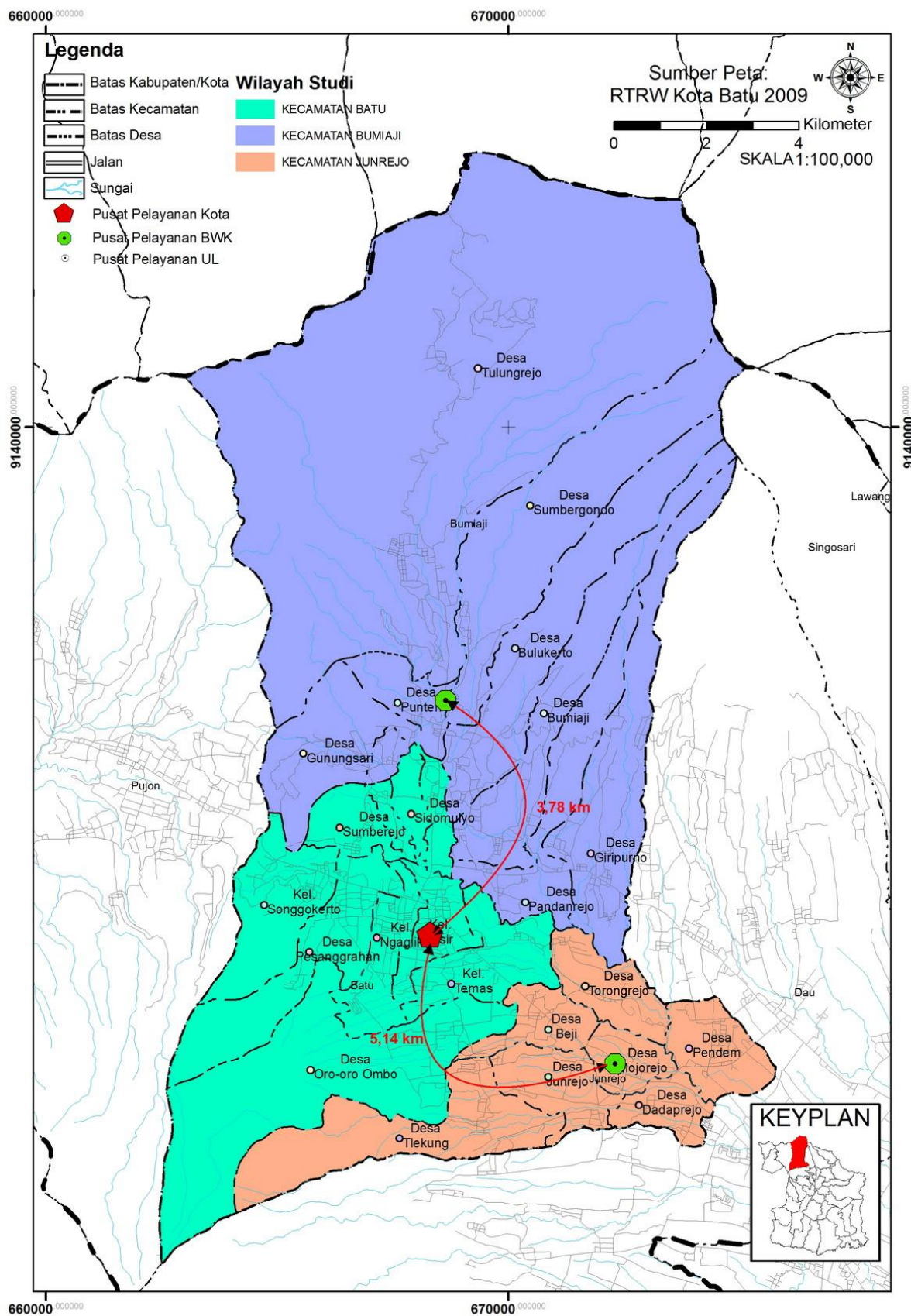




Gambar 4. 2 Peta Administarsi Kota Batu



Gambar 4. 3 Peta Struktur Ruang Kota Batu



Gambar 4. 4 Peta Rentang Kendali Kota Batu

4.1.2 Karakteristik Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Batu

Karakteristik kependudukan akan menggambarkan jumlah penduduk keseluruhan Kota Batu berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, pertumbuhan penduduk serta kepadatan penduduk. Data kependudukan merupakan salah satu data pokok dalam evaluasi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan subyek dan obyek sebuah pembangunan kota. Sedangkan karakteristik tenaga kerja akan menggambarkan ketenaga kerjaan yang terdapat di Kota Batu.

A. Kependudukan

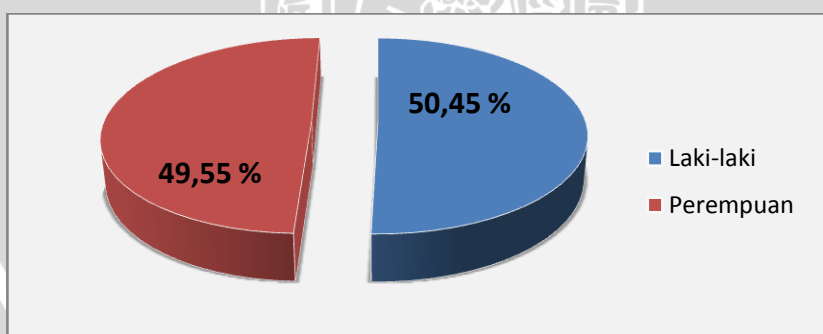
Berdasarkan hasil registrasi, jumlah penduduk Kota Batu tahun 2009 adalah 206.980 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan 50,45% penduduk laki-laki dan 49,55% penduduk wanita. Untuk lebih jelasnya, data kependudukan Kota Batu dapat dilihat pada tabel 4.5 dan gambar 4.5.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	WNI		WNA		Jumlah
	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
Batu	49.330	48.488	43	20	97.881
Junrejo	25.446	25.000	1	-	50.447
Bumiaji	29.599	29.053	-	-	58.652
TOTAL KESELURUHAN	104.375	102.541	44	20	206.980

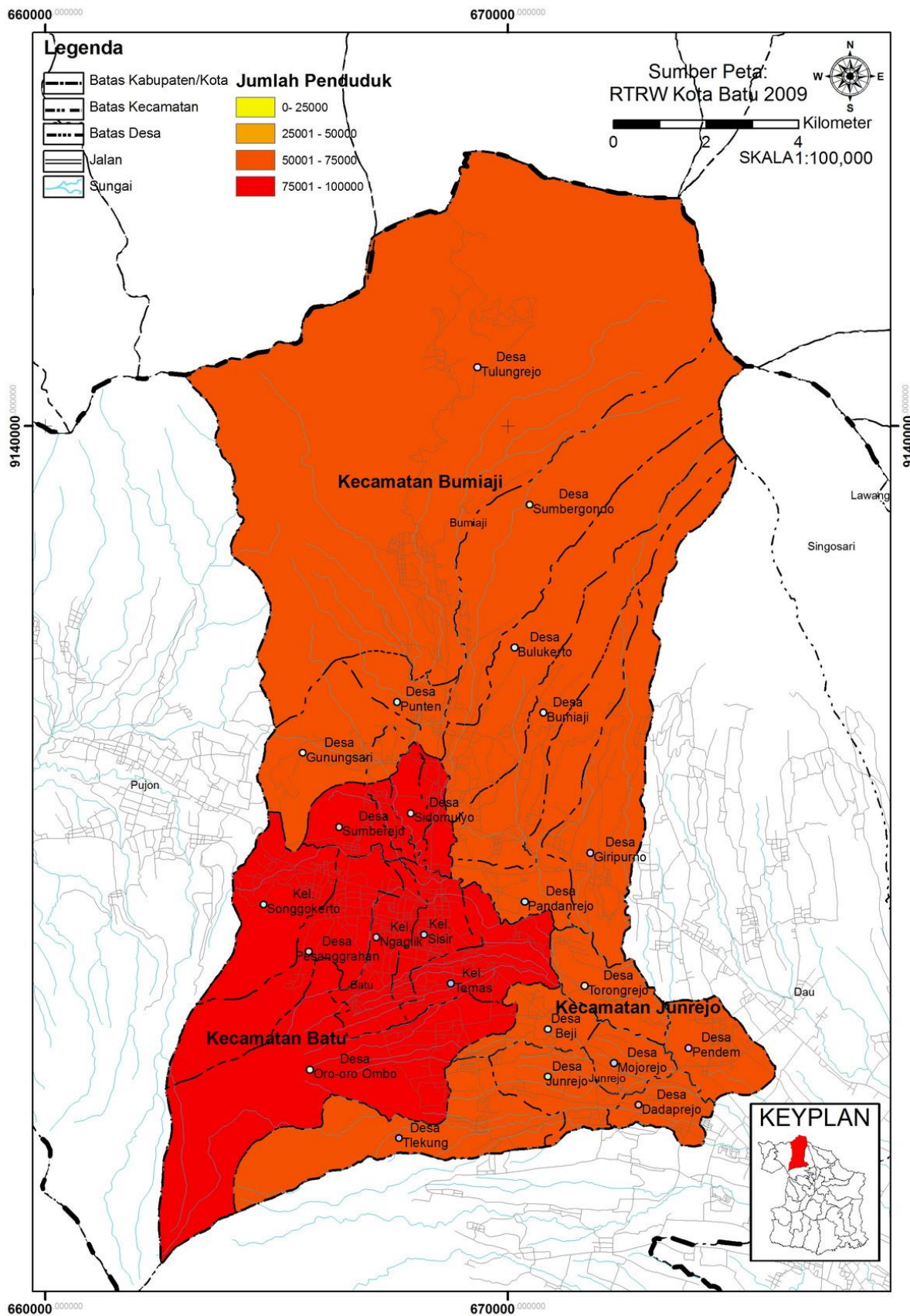
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan : = Wilayah Kecamatan Dengan Jumlah Penduduk Tertinggi



Gambar 4.5 Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang diperoleh, diantara 3 kecamatan Kota Batu jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Batu yaitu 97.881 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Junrejo dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 25.446 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 25.000 jiwa.



Gambar 4. 6 Peta Persebaran Penduduk Kota Batu

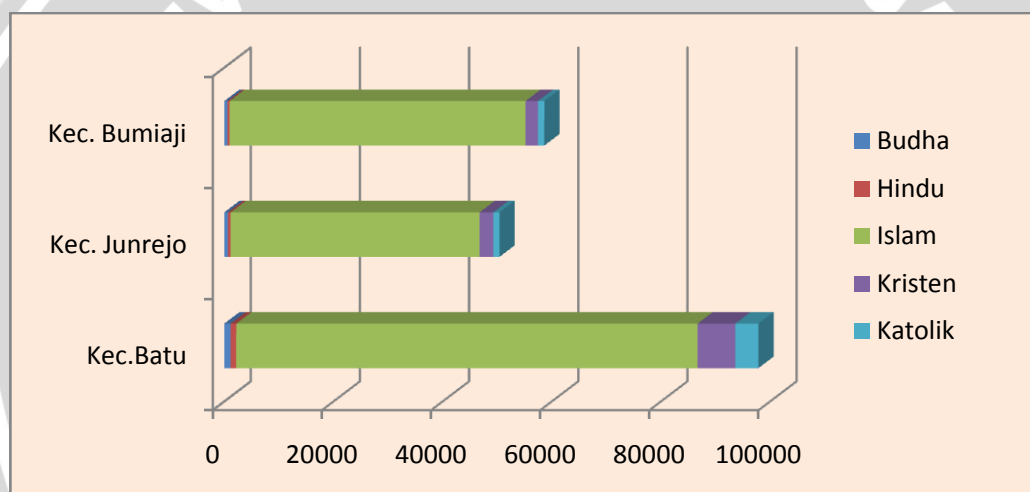
Penduduk Kota Batu menganut berbagai agama kepercayaan. Beragamnya agama kepercayaan yang dianut oleh penduduk Kota Batu menggambarkan toleransi kehidupan beragama. Sama halnya agama yang dianut sebagian besar penduduk Indonesia, penduduk Kota Batu sebagian besar memeluk agama islam yaitu sebanyak 172.982 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 dan gambar 4.7.

Tabel 4. 6
Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2009 Menurut Agama

Kecamatan	Budha (jiwa)	Hindu (jiwa)	Islam (jiwa)	Kristen (jiwa)	Katolik (jiwa)	Jumlah (unit)
Batu	1.174	1.024	84.520	6.916	4.247	97.881
Junrejo	685	494	45.609	2.490	1.169	50.447
Bumiaji	611	361	54.239	2.268	1.173	58.652
TOTAL KESELURUHAN	2.470	1.879	184.368	11.674	6.589	206.980

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan : Agama Terbanyak Dianut



Gambar 4. 7 Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Agama

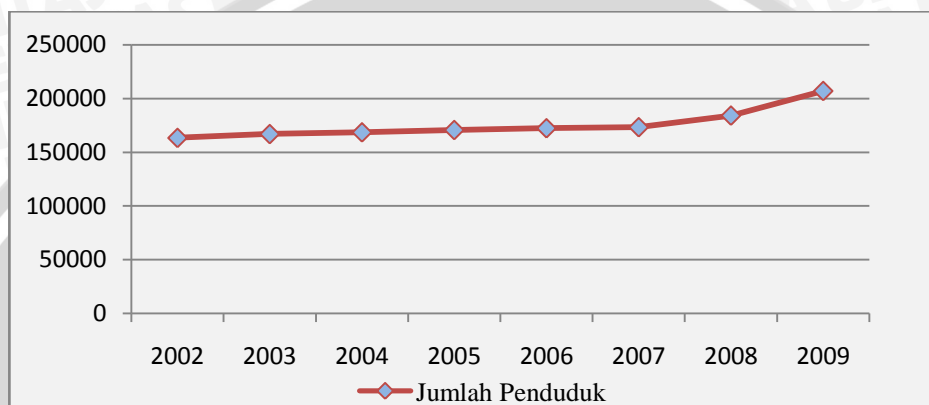
Berdasarkan gambar pada grafik dapat dilihat bahwa penduduk Kota Batu yang paling banyak menganut agama islam terdapat pada Kecamatan Batu. Penduduk Kecamatan Batu yang memeluk agama islam adalah sebanyak 84.520 jiwa, sedangkan pemeluk agama islam pada Kecamatan junrejo sebanyak 45.609 jiwa dan pada Kecamatan Bumiaji sebanyak 54.239 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Batu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan, hingga tahun 2007 pertumbuhan penduduk Kota Batu meningkat 0,85% per tahunnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Batu stabil setiap tahunnya. Namun pada tahun 2007 sampai tahun 2009 jumlah penduduk Kota Batu meningkat sampai 6,03%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 dan gambar 4.8.

Tabel 4. 7
Jumlah Penduduk Kota Batu Per Tahun

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2002	163.393
2003	166.948
2004	168.544
2005	170.697
2006	172.328
2007	173.295
2008	184.110
2009	206.980

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu



Gambar 4. 8 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kota Batu

Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan oleh angka kelahiran dan migrasi penduduk menuju daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi baru yang sedang berkembang, penduduk pendatang memanfaatkan hal ini sebagai peluang untuk membuka usaha dan berdomisili di Kota Batu.

Sedangkan untuk kepadatan penduduk, Kota Batu memiliki tingkat kepadatan penduduk sedang yaitu 1.040 jiwa/Km². Klasifikasi kepadatan penduduk Kota Batu berdasarkan RTRW Kota Batu adalah sebagai berikut:

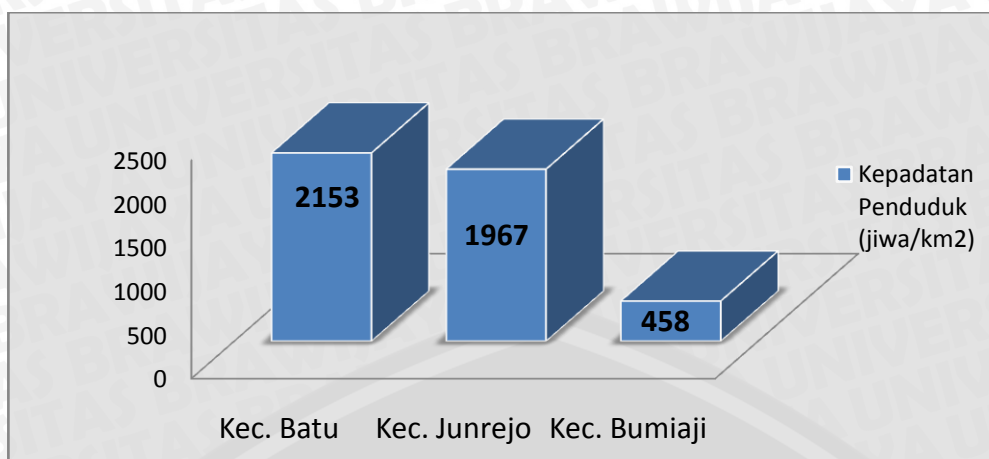
- Kepadatan tinggi yaitu tingkat kepadatan >2.000 jiwa/Km²
- Kepadatan sedang yaitu tingkat kepadatan 1.000-2.000 jiwa/Km²
- Kepadatan rendah yaitu tingkat kepadatan < 1.000 jiwa/Km²

Untuk penjelasan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8 dan gambar 4.9.

Tabel 4. 8
Kepadatan Penduduk Kota Batu Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/ Km ²)
1.	Batu	45,46	97.881	2.153
2.	Junrejo	25,65	50.447	1.967
3.	Bumiaji	127,98	58.652	458
TOTAL KESELURUHAN		199,09	206.980	1.040

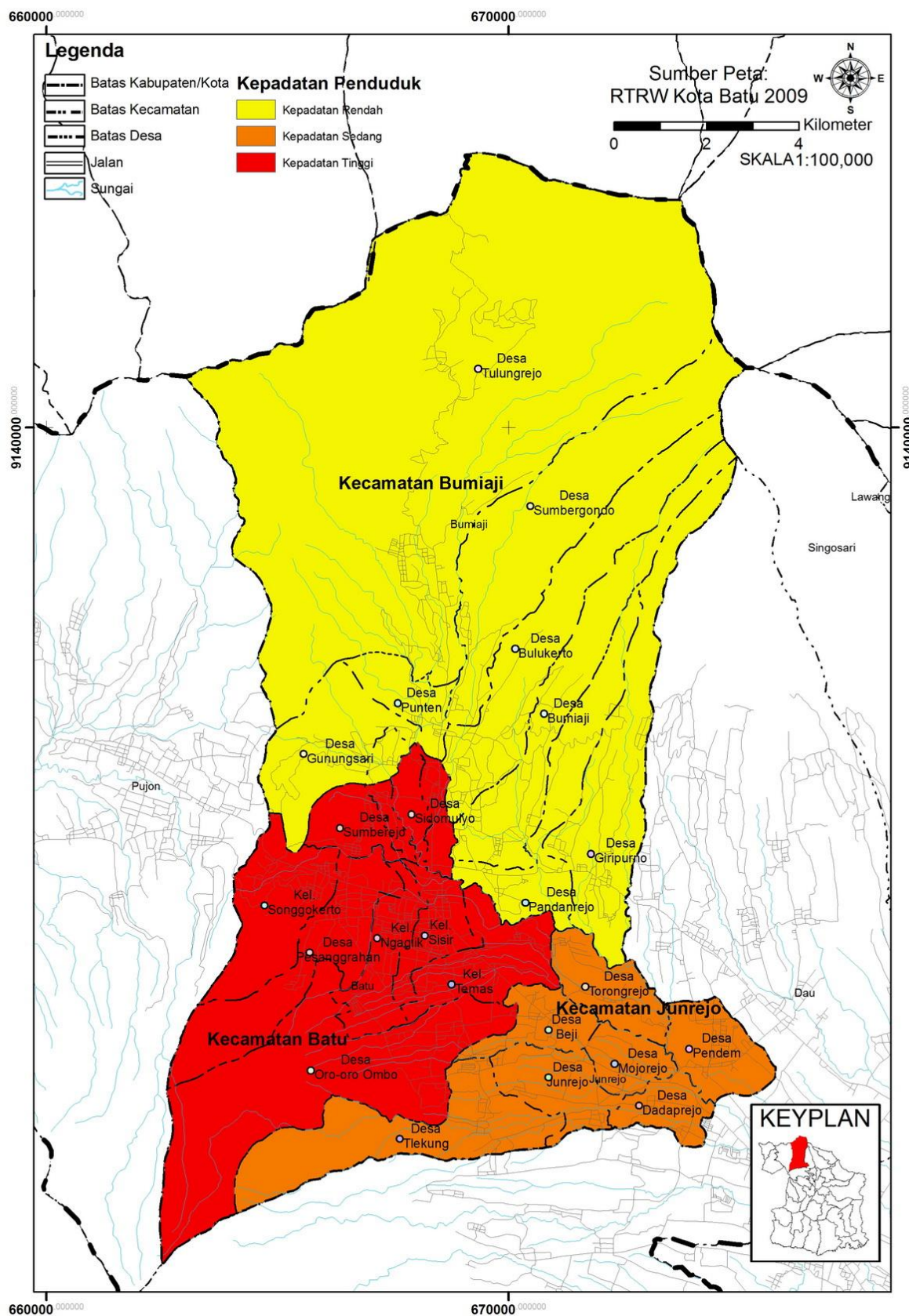
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu



Gambar 4.9 Perbandingan Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Berdasarkan hasil perhitungan, kepadatan penduduk Kecamatan Batu termasuk dalam kategori tinggi yaitu 2.153 jiwa/km². Kecamatan Batu merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi dibandingkan dua kecamatan lain yang terdapat pada Kota Batu. Kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Bumiaji yaitu dengan kepadatan 458 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk Kecamatan Junrejo termasuk dalam kategori sedang dengan kepadatan 1.967 jiwa per km².





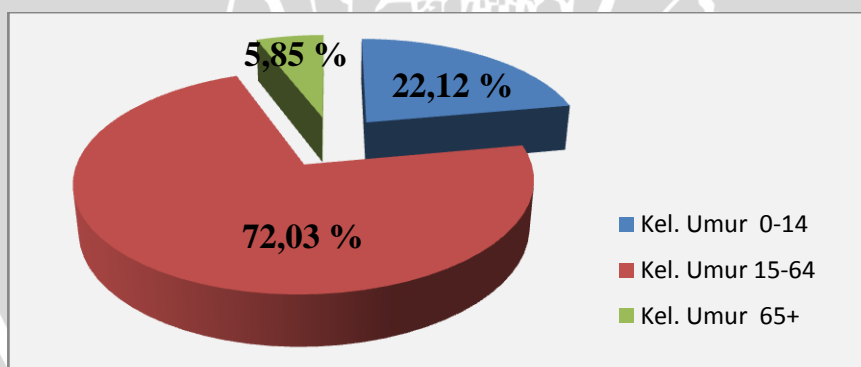
Gambar 4. 10 Peta Kepadatan Penduduk Kota Batu

Menurut komposisi umurnya, penduduk Kota Batu dengan komposisi bukan usia produktif (0-14 tahun dan 65+) adalah 57.891 jiwa atau sekitar 27,97% dari total keseluruhan penduduk Kota Batu berdasarkan kelompok umur. Jumlah penduduk Kota Batu usia 0-14 tahun terdapat sebanyak 45.790 jiwa dan usia 65+ sebanyak 12.101 jiwa. Sedangkan komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah 149.089 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9 dan gambar 4.11.

Tabel 4. 9
Jumlah Penduduk Kota Batu Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
0-4	7.483	8.017	15.500
5-9	7.784	7.391	15.175
10-14	7.877	7.238	15.115
15-19	8.173	6.704	14.877
20-24	8.630	8.778	17.408
25-29	10.300	9.387	19.687
30-34	8.035	8.837	16.872
35-39	8.498	9.369	17.867
40-44	8.374	8.638	17.012
45-49	7.952	8.587	16.539
50-54	7.606	5.867	13.473
55-59	5.036	3.907	8.943
60-64	3.677	2.734	6.411
65+	4.994	7.107	12.101
TOTAL KESELURUHAN	104.419	102.561	206.980

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu



Gambar 4. 11 Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Struktur umur penduduk Kota Batu cenderung mengarah pada kelompok berusia produktif (15-64 tahun) yaitu sebanyak 72,03 % dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Batu. Hal ini memperlihatkan bahwa sumber daya manusia Kota Batu berpotensi untuk mendukung program pembangunan daerah, karena penduduk berusia produktif merupakan modal dasar pembangunan daerah.

B. Tenaga Kerja

Data ketenagakerjaan memiliki peranan penting dalam sebuah perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan apabila tanpa tenaga kerja, aktifitas daerah tidak

dapat berjalan dan program pembangunan tidak mungkin akan terlaksana. Jumlah tenaga kerja berusia 10 tahun ke atas Kota Batu pada tahun 2009 adalah sebanyak 95.679 jiwa, dengan komposisi jumlah tenaga kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan yaitu 65,27% dari keseluruhan tenaga kerja berusia 10 tahun ke atas.

Tabel 4. 10
Tenaga Kerja 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	Persentase Dari Keseluruhan Tenaga Kerja 10 Tahun Ke Atas (%)
Laki-laki	62.454	65,27
Perempuan	33.225	34,73
TOTAL	95.679	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan : Tenaga Kerja Paling Dominan

Banyaknya tenaga kerja laki-laki dibandingkan tenaga kerja perempuan pada Kota Batu memperlihatkan bahwa ketenagakerjaan setiap sektor lapangan usaha lebih banyak terserap oleh tenaga kerja laki-laki. Tenaga kerja perempuan Kota Batu lebih banyak terserap pada sektor yang biasa menampung tenaga perempuan seperti pertanian dan perdagangan.

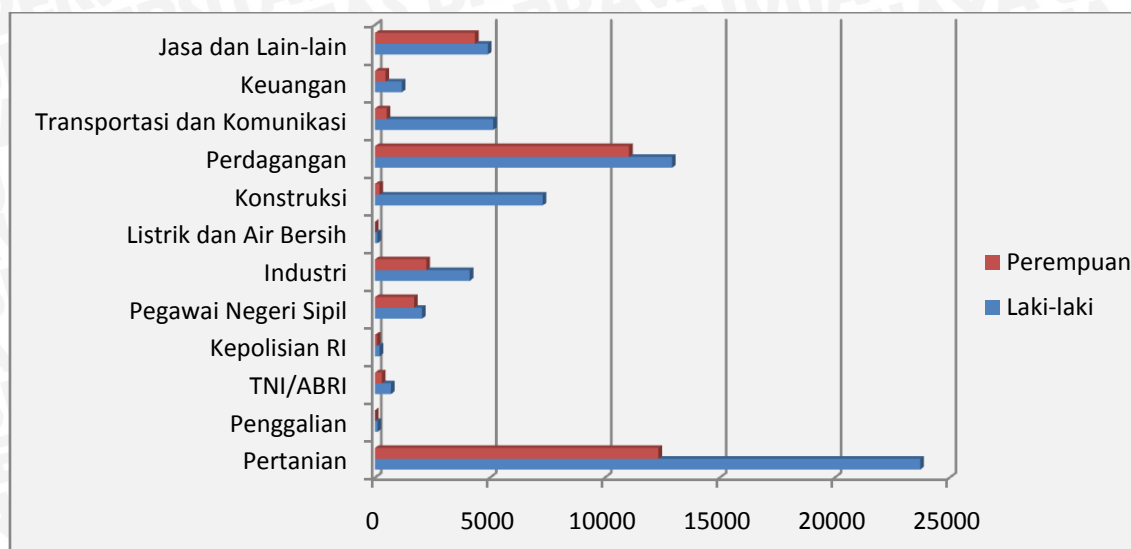
Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar tenaga kerja Kota Batu bekerja pada sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian adalah 36.055 jiwa, dengan komposisi 23.723 tenaga kerja pria dan 12.332 tenaga kerja wanita. Sektor perdagangan merupakan sektor usaha dengan jumlah tenaga terbesar kedua di Kota Batu yaitu sebanyak 23.980 jiwa atau 25,06% dari keseluruhan tenaga kerja Kota Batu. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam tabel 4.11 dan gambar 4.12.

Tabel 4. 11
Jumlah Tenaga Kerja 10 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase Dari Keseluruhan Tenaga Kerja (%)
Pertanian	23.723	12.332	36.055	37,68
Penggalian	110	-	110	0,11
TNI/ABRI	694	298	992	1,04
Kepolisian RI	201	93	294	0,28
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.048	1.703	3.751	3,92
Industri	4.122	2.238	6.360	6,65
Listrik dan Air Bersih	106	-	106	0,11
Konstruksi	7.299	193	7.492	7,83
Perdagangan	12.925	11.055	23.980	25,06
Transportasi dan Komunikasi	5.141	507	5.648	5,90
Keuangan	1.170	454	1.624	1,70
Jasa dan Lain-lain	4.915	4.352	9267	9,72
TOTAL KESELURUHAN	62.454	33.225	95.679	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan : = Lapangan Usaha Dengan Tenaga Kerja Tertinggi



Gambar 4.12 Grafik Perbandingan Tenaga Kerja 10 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha

Banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian memperlihatkan bahwa sektor usaha ini paling diminati sebagai lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan sektor pertanian didukung oleh luas lahan pertanian Kota Batu yang memadai dan subur serta citra Kota Batu sebagai Kawasan Agrowisata.

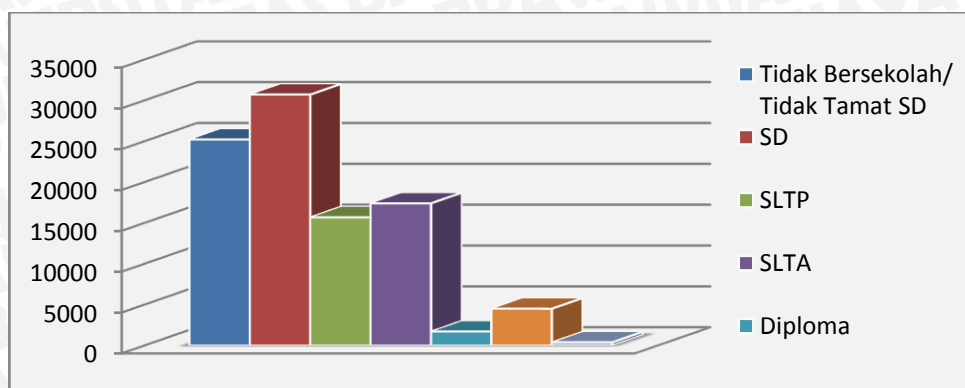
Pada tahun 2009, tenaga kerja Kota Batu yang berpendidikan SD terdapat sebanyak 30.721 jiwa. Untuk tenaga kerja yang berpendidikan SLTP dan SMA pada Kota Batu masing-masing terdapat sebanyak 15.710 jiwa dan 17.410 jiwa. Sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan sarjana terdapat sebanyak 4.896 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12 dan gambar 4.13.

**Tabel 4.12
Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase Dari Keseluruhan (%)
Tidak Bersekolah/ Tidak Tamat SD	25.222	26.36
SD	30.721	32.11
SLTP	15.710	16.42
SLTA	17.410	18.20
Diploma	1.720	4.71
S1	4505	0.41
S2 dan S3	391	1.80
TOTAL KESELURUHAN	95.679	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan : Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja Tertinggi



Gambar 4.13 Grafik Perbandingan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan hasil perbandingan, tenaga kerja Kota Batu didominasi tenaga kerja dengan pendidikan SD yaitu sebanyak 32,11% dan tenaga kerja yang tidak tamat SD maupun tidak bersekolah sebanyak 26,36%. Rendahnya jenjang pendidikan tenaga kerja berpengaruh pada kualitas tenaga kerja Kota Batu yang terserap. Banyaknya tenaga kerja yang berpendidikan SD dan belum tamat SD maupun tidak bersekolah mengakibatkan tenaga kerja Kota Batu banyak bekerja pada sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini dikarenakan sektor usaha ini tidak memerlukan keahlian khusus.

4.1.3 Karakteristik Fisik Binaan Kota Batu

Karakteristik fisik binaan akan memaparkan mengenai pola penggunaan lahan dan sebaran fasilitas yang terdapat pada Kota Batu. Adapun uraian karakteristik fisik binaan Kota Batu antara lain sebagai berikut:

A. Pola Penggunaan Lahan

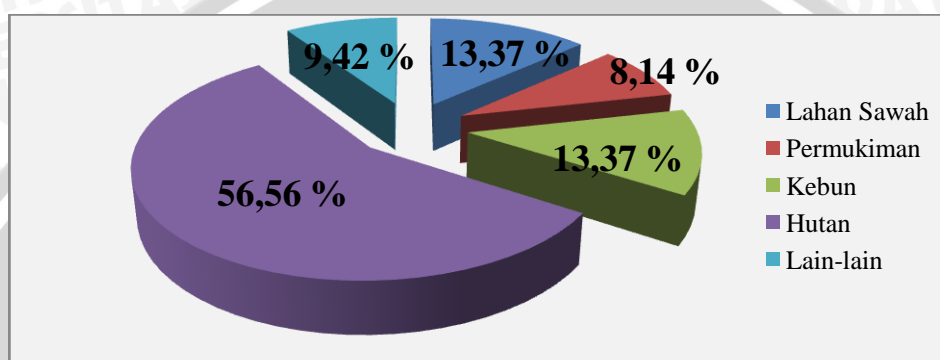
Lahan merupakan komponen dasar lingkungan suatu wilayah. Data penggunaan lahan dapat menggambarkan perkembangan pemanfaatan lahan yang terjadi. Pada tahun 2007 terjadi sedikit perubahan penggunaan lahan Kota Batu, yaitu 0,74% lahan sawah berubah menjadi lahan terbangun. Perkembangan pemanfaatan lahan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan permukiman, pembangunan maupun aktifitas perekonomian.

Penggunaan lahan pada Kota Batu didominasi digunakan sebagai lahan kering seperti permukiman, kebun dan hutan. Pola penggunaan lahan yang terdapat pada Kota Batu pada tahun 2009 untuk lahan permukiman adalah 1.620,15 Ha atau 8,14% dari keseluruhan luas wilayah Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13 dan gambar 4.14.

Tabel 4. 13
Luas Penggunaan Lahan Kota Batu

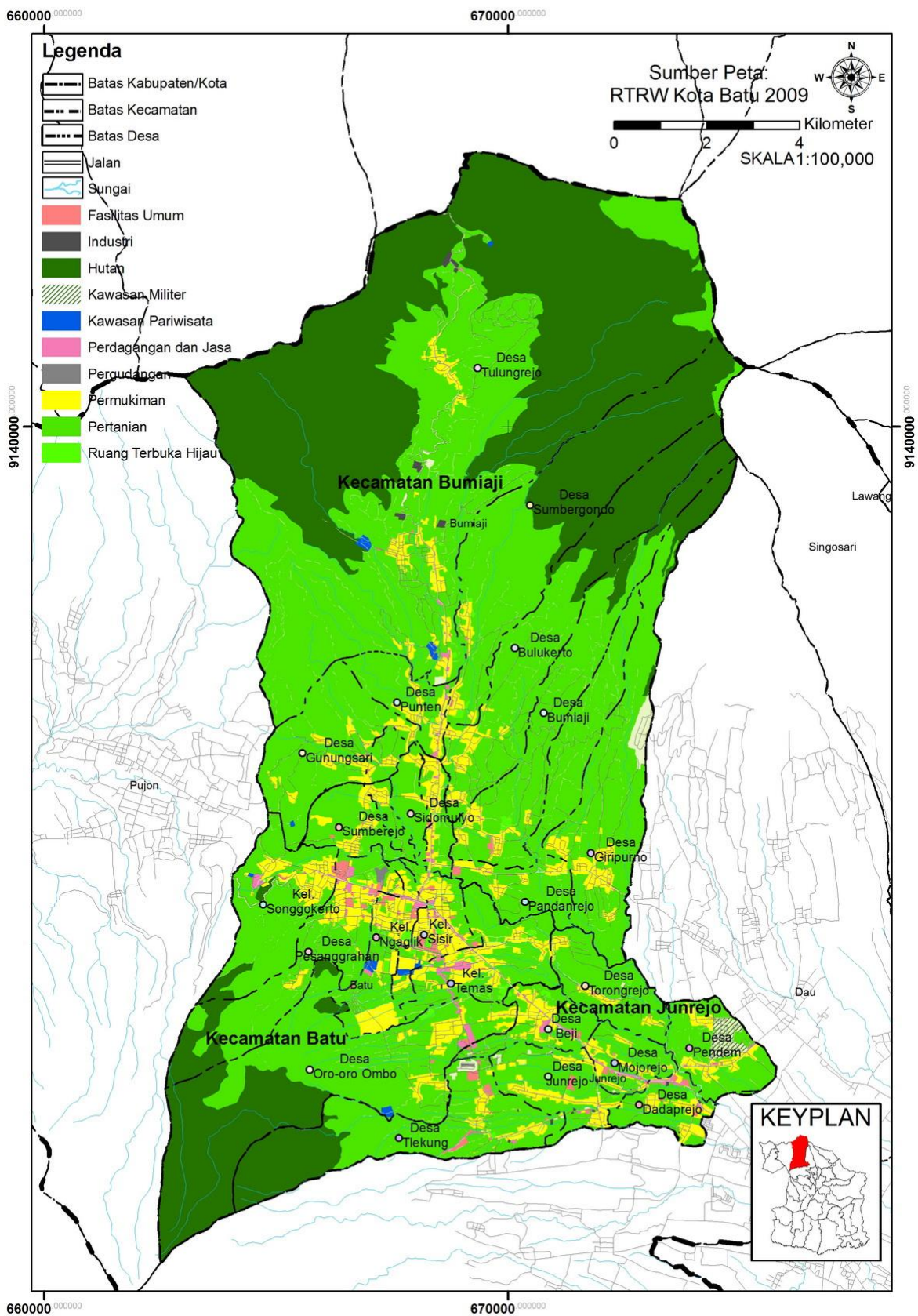
Jenis Lahan	Kecamatan			Jumlah (Ha)	Persentase Dari Keseluruhan Luas Wilayah Kota Batu (%)
	Batu (Ha)	Junrejo (Ha)	Bumiaji (Ha)		
Permukiman	515,75	315,67	788,73	1620,15	8,14
Kebun/Tegalan	765,9	471,88	1253,86	2491,64	12,52
Hutan	1604,32	629,73	9026,65	11260,7	56,56
Sawah	727	1109	825	2661	13,37
Lain-lain	932,84	38,74	903,65	1875,23	9,42
TOTAL KESELURUHAN	4545,81	2565,02	12797,89	19908,72	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu



Gambar 4. 14 Perbandingan Luas Penggunaan Lahan Kota Batu

Berdasarkan hasil perbandingan bahwa pola penggunaan lahan terbesar pada Kota Batu adalah hutan dan pertanian. Hal ini disebabkan karena wilayah perencanaan Kota Batu sebagian besar merupakan kawasan dengan topografi yang cenderung berbukit dan terjal, sehingga penggunaan lahan didominasi oleh kegiatan non terbangun seperti kegiatan hutan dan pertanian.



Gambar 4. 15 Peta Pola Ruang Kota Batu



B. Sarana Permukiman

Luas lahan kawasan permukiman Kota Batu adalah 1620,15 Ha. Kawasan permukiman Kota Batu pada umumnya tersebar merata pada setiap wilayah dengan pola linear. Kepadatan kawasan permukiman paling tinggi terdapat pada Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Batu.

Kualitas permukiman suatu wilayah dapat diukur dari kelengkapan sarana penunjangnya. Kelengkapan sarana penunjang tersebut antara lain tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih dan sarana sanitasi.

Kelompok rumah tangga merupakan jumlah pelanggan listrik tertinggi di Kota Batu. Hal ini dikarenakan penerangan listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Pada tahun 2009, sebanyak 55.458 rumah tangga atau 99,35% dari keseluruhan rumah tangga yang terdapat pada Kota Batu telah menggunakan sumber penerangan listrik PLN.

Dalam program penyediaan air bersih, pemerintah Kota Batu terus mengupayakan ketersediaan air bersih baik kuantitas maupun kualitasnya untuk seluruh penduduk Kota Batu. Pada tahun 2009, pengguna air bersih PDAM maupun Non PDAM Kota Batu sebanyak 54.999 rumah tangga atau sebesar 98,53% dari keseluruhan rumah tangga Kota Batu.

Sarana sanitasi merupakan aspek penting dalam kesehatan permukiman. Hal ini dikarenakan melalui sarana sanitasi resiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan penduduk dapat dihindari. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat sebanyak 48.150 rumah tangga atau sebesar 86,26% dari keseluruhan rumah tangga Kota Batu telah memiliki sarana sanitasi berupa jamban dengan *septick tank*.

C. Sarana Pendidikan

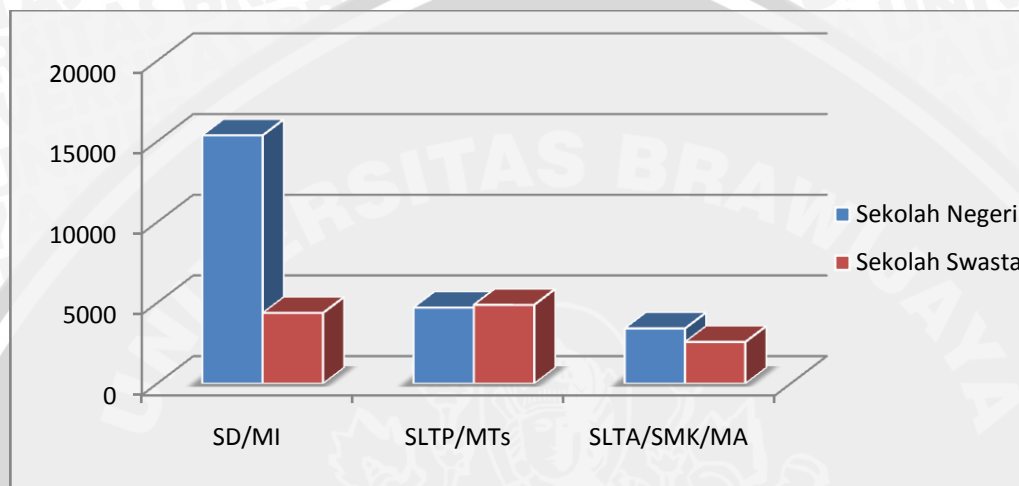
Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan manusia mengembangkan kepribadiannya dan kemampuannya. Hal ini mengakibatkan pendidikan menjadi sebuah kebutuhan disamping sebagai meningkatkan status sosial dan kesempatan kerja.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2009 jumlah peserta didik Kota Batu adalah 35.327 jiwa dengan komposisi 23.489 jiwa siswa sekolah negeri dan 11.829 jiwa siswa sekolah swasta. Peserta didik pada tingkat pendidikan dasar Kota Batu terdapat 19.757 jiwa atau 55,93% dari keseluruhan peserta didik Kota Batu. Sedangkan jumlah peserta didik tingkat atas (SLTA) sebanyak 5.991 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 14 gambar 4.16.

Tabel 4. 14
Jumlah Peserta Didik Kota Batu Berdasarkan Jenis Sekolah

Tingkat Pendidikan	Jenis Sekolah		Jumlah Peserta Didik (jiwa)	Persentase Dari Keseluruhan Peserta Didik (%)
	Negeri (jiwa)	Swasta (jiwa)		
SD	15.380	4.377	19.757	55,93
SLTP	4.705	4.874	9.579	27,12
SLTA	3.413	2.578	5.991	16,96
TOTAL KESELURUHAN	23.498	11.829	35.327	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu



Gambar 4. 16 Grafik Perbandingan Peserta Didik Kota Batu Berdasarkan Jenis Sekolah

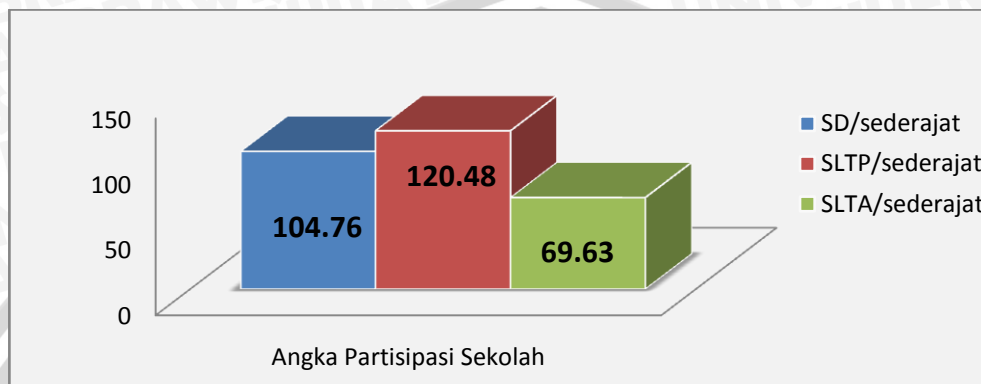
Dalam mengukur partisipasi penduduk Kota Batu terhadap pendidikan dapat dilakukan dengan rasio jumlah peserta didik Kota Batu terhadap jumlah penduduk Kota Batu berdasarkan usia sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak penduduk Kota Batu yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan Kota Batu.

Berdasarkan hasil perhitungan, partisipasi penduduk pada pendidikan Kota Batu sebesar 99,75%. Untuk usia sekolah dasar (7-12 tahun) partisipasi penduduk sebesar 104,76% yang berarti pada setiap 100 penduduk usia sekolah dasar terdapat 105 jiwa penduduk yang sedang berpartisipasi di jenjang sekolah dasar. Pada usia sekolah menengah pertama yaitu 13-15 tahun partisipasinya sebesar 120,48% dan partisipasi usia sekolah menengah keatas (16-18 tahun) sebesar 69,63%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.15 dan gambar 4.17.

Tabel 4. 15
Angka Partisipasi Sekolah Kota Batu

Usia Sekolah (tahun)	Jumlah (Jiwa)	Jumlah Peserta Didik (Jiwa)			Angka Partisipasi Sekolah Kota Batu (%)
		SD	SLTP	SLTA	
7-12	18.860	19.757	-	-	104,76
13-15	7.951	-	9.579	-	120,48
16-18	8.604	-	-	5.991	69,63
Jumlah (Jiwa)	35.415	19.757	9.579	5.991	99,75

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Batu dan Hasil Perhitungan



Gambar 4. 17 Grafik Angka Partisipasi Sekolah Kota Batu

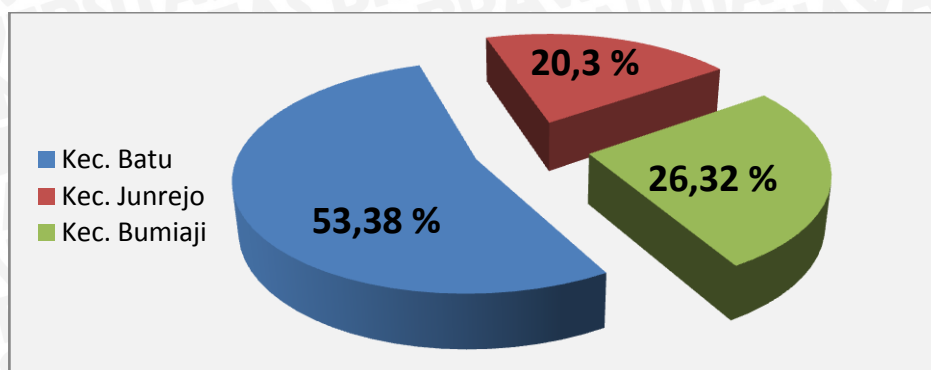
Tingginya angka partisipasi sekolah Kota Batu pada jenjang SD dan SLTP menunjukkan tingginya partisipasi penduduk Kota Batu untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya. Angka partisipasi sekolah jenjang SLTA lebih kecil dibandingkan angka partisipasi sekolah Kota Batu pada jenjang pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SLTP). Hal ini dikarenakan sebanyak 30,37% dari keseluruhan penduduk usia 16-18 tahun Kota Batu tidak melanjutkan pendidikannya menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Banyaknya peserta didik Kota Batu harus diimbangi dengan jumlah sarana fisik pendidikan dan tenaga pengajar yang memadai. Pada jenjang pendidikan dasar, sarana pendidikan yang terdapat di Kota Batu adalah 84 sekolah baik sekolah dasar negeri, maupun swasta. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pertama terdapat 29 sekolah dengan jumlah masing-masing per kecamatan, 16 sekolah pada Kecamatan Batu, 6 sekolah pada Kecamatan Junrejo dan 7 sekolah pada Kecamatan Bumiaji. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.16 dan gambar 4.18.

Tabel 4. 16
Jumlah Sarana Pendidikan Kota Batu Per Kecamatan

Kecamatan	Jenjang Pendidikan (unit)			Jumlah (unit)
	SD/average	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	
Batu	39	16	16	71
Junrejo	19	6	2	27
Bumiaji	26	7	2	35
TOTAL	84	29	20	133

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu



Gambar 4.18 Perbandingan Sarana Pendidikan Kota Batu Per Kecamatan

Berdasarkan hasil perbandingan, ketersediaan sarana pendidikan Kota Batu paling banyak terdapat pada Kecamatan Batu yaitu 71 unit sekolah atau 53,38% dari keseluruhan sarana pendidikan Kota Batu. Hal ini diakibatkan, pembangunan banyak dilakukan pada Kecamatan Batu dan Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan Kota Batu.

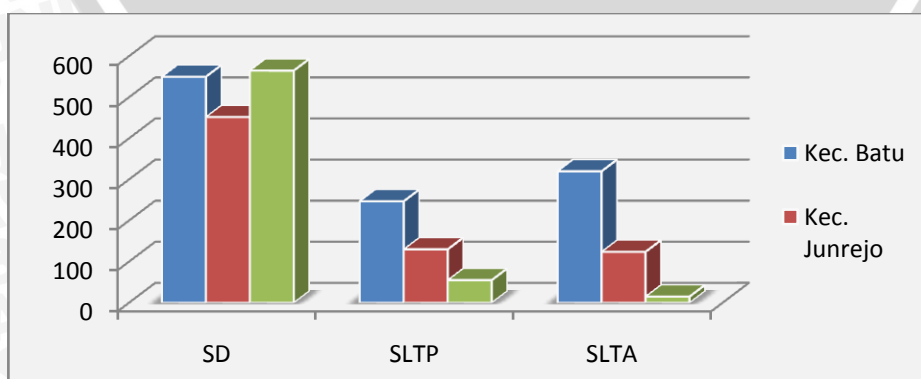
Jumlah keseluruhan tenaga pengajar Kota Batu pada tahun 2009 adalah 2.458 jiwa. Pada jenjang sekolah dasar, pada Kota Batu terdapat 1.117 tenaga pengajar, dengan komposisi 49.23 % tenaga pengajar dari keseluruhan tenaga pengajar SD terdapat pada Kecamatan Batu. Jenjang menengah pertama terdapat 706 jiwa tenaga pengajar. Untuk lebih jelasnya persebaran tenaga pengajar per kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.17 dan gambar 4.19.

Tabel 4.17
Jumlah Tenaga Pengajar Kota Batu Per Kecamatan Tahun 2009

Kecamatan	Tenaga Pengajar			Jumlah (Jiwa)	Persentase dari Keseluruhan Tenaga Pengajar Kota Batu (%)
	SD (Jiwa)	SLTP (Jiwa)	SLTA (Jiwa)		
Batu	550	452	565	1.567	63,75
Junrejo	247	130	55	432	17,58
Bumiaji	320	124	15	459	18,67
TOTAL KESELURUHAN	1.117	706	635	2.458	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu

Keterangan : Kecamatan Dengan Jumlah Tenaga Pengajar Tertinggi



Gambar 4.19 Grafik Perbandingan Tenaga Pengajar Kota Batu Per Kecamatan

Jumlah tenaga pengajar SD, SLTP dan SLTA pada masing-masing kecamatan tidak sama. Hal ini diakibatkan oleh keberadaan jumlah sarana pendidikan yang berbeda pada tiap kecamatan. Pada jenjang pendidikan baik dasar, menengah pertama (SLTP) maupun jenjang menengah tingkat atas (SLTA) komposisi jumlah tenaga pengajar yang paling banyak terdapat pada Kecamatan Batu yaitu sebanyak 1.567 tenaga pengajar atau 63,75% dari keseluruhan tenaga pengajar Kota Batu.

D. Sarana Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan kata lain pembangunan pada sektor kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan yang sedang berlangsung. Ketersediaan fasilitas kesehatan dapat diukur dengan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah sarana kesehatan.

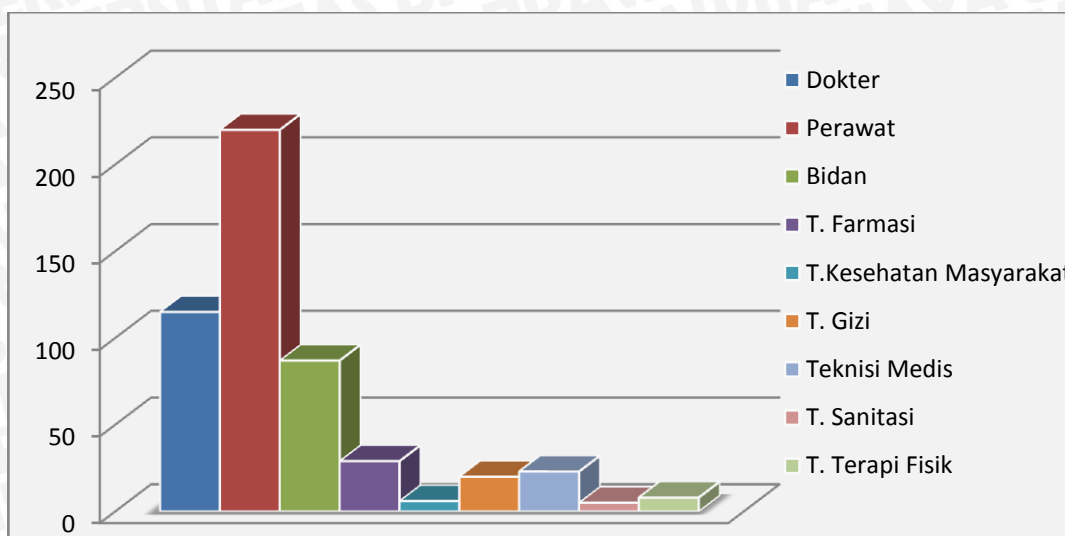
Dalam pembangunan kesehatan, faktor penggerak utama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas menentukan keberhasilan dari keseluruhan proses pembangunan sektor kesehatan. Pada tahun 2009, jumlah tenaga kesehatan Kota Batu baik yang berada pada instansi pemerintah maupun swasta adalah 513 jiwa. Jumlah dokter Kota Batu sebanyak 115 orang atau sebesar 22,42% dari keseluruhan jumlah tenaga kesehatan Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.18 dan gambar 4.20.

Tabel 4. 18
Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Batu

Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan (Jiwa)	Persentase Dari Keseluruhan Tenaga Kesehatan (%)
Dokter	115	22,42
Perawat	220	42,88
Bidan	87	16,96
Tenaga Farmasi	29	5,65
T. Kesehatan Masyarakat	6	1,17
Tenaga Gizi	20	3,90
Teknisi Medis	23	4,48
Tenaga Sanitasi	5	0,97
Tenaga Terapi Fisik	8	1,56
TOTAL KESELURUHAN	513	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu

Keterangan : = Tenaga Kesehatan Yang Paling Banyak



Gambar 4. 20 Grafik Perbandingan Tenaga Kesehatan Kota Batu

Berdasarkan hasil perbandingan, jumlah tenaga kesehatan Kota Batu yang paling dominan adalah perawat sebanyak 220 jiwa atau 42,88 % dari jumlah keseluruhan tenaga kesehatan Kota Batu. Tenaga kesehatan yang paling sedikit jumlahnya pada Kota Batu adalah tenaga sanitasi yaitu sebanyak 5 orang.

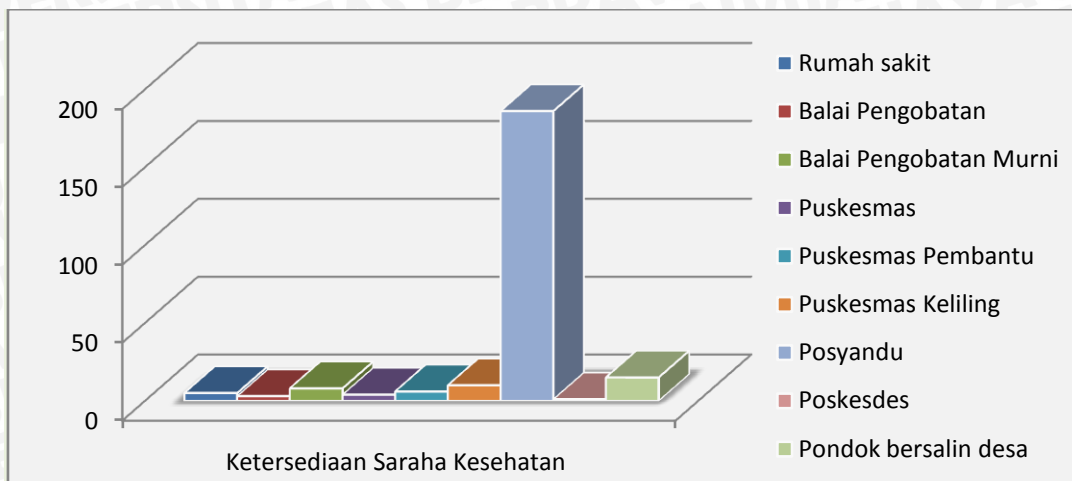
Di samping ketersediaan tenaga kesehatan, sarana kesehatan yang memadai diperlukan untuk mendukung berlangsungnya pembangunan kesehatan Kota Batu. Pemerintah Kota Batu telah mengembangkan sarana kesehatan dari skala lingkungan sampai skala kota. Pada tahun 2009 terdapat 5 rumah sakit baik yang berstatus rumah sakit swasta maupun pemerintah. Selain itu terdapat 4 buah puskesmas dimana tiga diantaranya merupakan puskesmas dengan perawatan. Untuk memperluas jangkauan pelayanan puskesmas di seluruh wilayah Kota Batu, dikembangkan 4 buah puskesmas pembantu (Pustu) dan 10 unit puskesmas keliling.

Tabel 4. 19
Jumlah Sarana Kesehatan Kota Batu

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan (unit)	Persentase Dari Keseluruhan Sarana Kesehatan (%)
Rumah Sakit	5	2,10
Pondok bersalin desa	15	6,30
Balai Pengobatan Murni	8	3,36
Puskesmas	4	1,68
Puskesmas Pembantu	6	2,52
Puskesmas Keliling	10	4,20
Posyandu	186	78,15
Poskesdes	1	0,42
Balai Pengobatan (Rumah Bersalin dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak)	3	1,26
TOTAL KESELURUHAN	238	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu

Keterangan : = Jenis Sarana Kesehatan Tertinggi



Gambar 4. 21 Grafik Perbandingan Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Batu

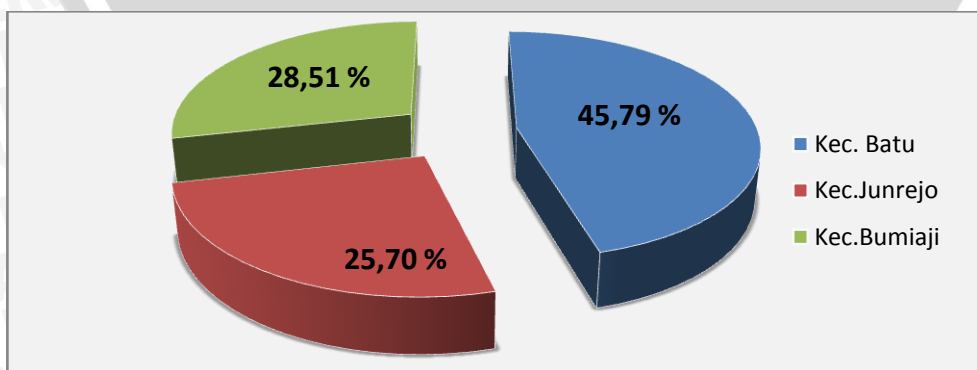
Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang paling banyak adalah sarana kesehatan skala lingkungan yaitu posyandu yaitu sebanyak 186 buah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batu telah mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lokal.

Sebaran sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta pada Kecamatan Batu yaitu 98 unit dengan jenis sarana kesehatan tertinggi adalah posyandu. Sarana kesehatan berupa puskesmas sebarannya merata pada tiap kecamatan di Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.20.

Tabel 4. 20
Jumlah Sarana Kesehatan Kota Batu Tahun 2009 Per Kecamatan

Kecamatan	Sarana Kesehatan (unit)				Jumlah (unit)
	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	
Batu	3	1	2	92	98
Junrejo	1	2	-	52	55
Bumiaji	1	1	4	55	61
TOTAL KESELURUHAN	5	4	6	197	214

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu



Gambar 4. 22 Perbandingan Sarana Kesehatan Kota Batu Per Kecamatan

Berdasarkan hasil perbandingan, keberadaan sarana kesehatan paling banyak terdapat pada Kecamatan Batu yaitu 98 unit dengan komposisi 3 unit rumah sakit, 1 unit puskesmas, 2 unit puskesmas pembantu dan 92 unit posyandu. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan dengan jumlah sarana kesehatan terbesar kedua yaitu 28,51% dari keseluruhan sarana kesehatan Kota Batu.

E. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan Kota Batu terdapat 4009 unit dengan komposisi sebanyak 3.738 unit pada Kecamatan Batu, 179 unit pada Kecamatan Junrejo dan 92 unit pada Kecamatan Bumiaji. Sebagian besar jenis sarana perdagangan yang tersedia di Kota Batu didominasi oleh pertokoan yaitu 58,69% dari keseluruhan sarana perdagangan Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.21.

Tabel 4. 21
Jumlah Sarana Perdagangan Kota Batu

Jenis Sarana Perdagangan	Kecamatan			TOTAL KESELURUHAN	Persentase Dari Keseluruhan (%)
	Batu (unit)	Junrejo (unit)	Bumiaji (unit)		
Supermaket/Swalayan	20	3	3	26	0,65
Pertokoan	2.226	73	54	2.353	58,69
Pasar	2	1	1	4	0,10
Ruko	303	41	6	350	8,73
Restaurant/Rumah Makan	31	4	10	45	1,12
Warung	1.156	57	18	1.231	30,71
Jumlah (unit)	3.738	179	92	4.009	100

Sumber: RTRW Kota Batu Tahun 2009-2029

Keterangan : Kecamatan Dengan Sarana Perdagangan Tertinggi

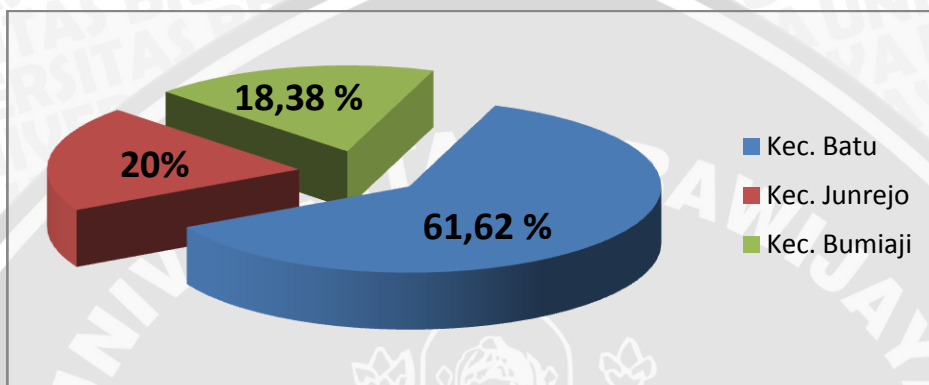
Banyaknya jumlah warung memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat secara langsung dapat terpenuhi. Lokasi dari sarana perdagangan terletak di tengah lingkungan permukiman dengan pola menyebar di sepanjang jalan-jalan lokal dan arteri sekunder.

Di samping itu, salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan perekonomian adalah ketersediaan lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Lembaga keuangan Kota Batu baik bank maupun non bank terdapat sebanyak 185 unit. Lembaga keuangan non bank Kota Batu terdapat sebanyak 154 unit dengan proporsi 81,62% merupakan koperasi dan 1,62% merupakan usaha asuransi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.22 dan gambar 4.23.

Tabel 4. 22
Jumlah Lembaga Keuangan Kota Batu Tahun 2009

NO.	Jenis Lembaga Keuangan	Kecamatan			TOTAL KESELURUHAN	Persentase Dari Keseluruhan (%)
		Batu (unit)	Junrejo (unit)	Bumiaji (unit)		
1.	Bank	27	3	1	31	16,76
2.	Non Bank	87	34	33	154	83,24
	Koperasi	84	34	33	151	81,62
	Asuransi	3	-	-	3	1,62
	Jumlah (unit)	114	37	34	185	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu



Gambar 4. 23 Perbandingan Lembaga Keuangan Kota Batu Per Kecamatan

Berdasarkan hasil perbandingan, keberadaan lembaga keuangan yang paling dominan terdapat pada Kecamatan Batu yaitu 114 unit atau 61,62% dari keseluruhan lembaga keuangan Kota Batu. Persentase terbesar kedua lembaga keuangan terdapat pada Kecamatan Junrejo yaitu sebesar 20% dari keseluruhan lembaga keuangan Kota Batu. Lembaga keuangan yang terdapat pada Kecamatan Bumiaji terdapat sebanyak 34 unit dengan proporsi 33 unit lembaga non bank dan 1 unit merupakan bank.

Jumlah lembaga keuangan berupa bank pada Kota Batu adalah 31 unit baik bank konvensional maupun syariah. Bank yang paling dominan adalah bank konvensional yaitu sebanyak 27 unit dengan komposisi 9 unit kantor pusat, 4 unit kantor cabang, 11 unit kantor cabang pembantu dan 3 unit kantor kas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.23.

Tabel 4. 23
Jumlah Kantor Bank Kota Batu Tahun 2009 Menurut Jenis Bank

Jenis Bank	Kantor (unit)				TOTAL KESELURUHAN	Presntase Dari Keseluruhan (%)
	Pusat	Cabang	C. Pembantu	Kas		
Konvensional	9	4	11	3	27	87,10
Umum	-	1	11	2	14	45,16
BPR	9	3	-	1	13	41,94
Syariah	2	-	1	1	4	12,90
Umum	-	-	1	1	2	6,45
BPR	2	-	-	-	2	6,45
Jumlah (unit)	11	4	12	4	31	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Sebagian besar koperasi yang terdapat Kota Batu adalah bersifat Non KUD yaitu sebanyak 150 unit. Jenis Non KUD yang paling dominan pada Kota Batu bergerak dalam bidang jasa dan serba usaha yaitu sebesar 88,74 % dari keseluruhan koperasi yang terdapat pada Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.24.

Tabel 4. 24
Jumlah Koperasi Kota Batu Menurut Sifat Usaha Tahun 2009

Sifat Usaha	KUD (unit)	Non KUD (unit)	Jumlah (unit)	Persentase Dari Keseluruhan Koperasi (%)
Konsumsi	1	15	16	10,60
Jasa dan Sejenisnya	-	52	52	34,44
Industri dan Kerajinan	-	1	1	0,66
Serba Usaha	-	82	82	54,30
TOTAL KESELURUHAN	1	150	151	100

Sumber: Dinas Koperindag Kota Batu

Keterangan : Jenis Koperasi Yang Paling Dominan

KUD Kota Batu bergerak dalam bidang persusuan yaitu dengan mengumpulkan susu murni dari peternak yang berada pada Kota Batu. Selain memasarkan produksinya pada PT. Nestle, KUD Kota Batu juga memasarkannya di wilayah Batu sendiri dan luar wilayah Kota Batu seperti Gresik, Surabaya, Madiun, Madura, Jawa Tengah, Jawa Barat dan wilayah Jogja.

F. Sarana Peribadatan

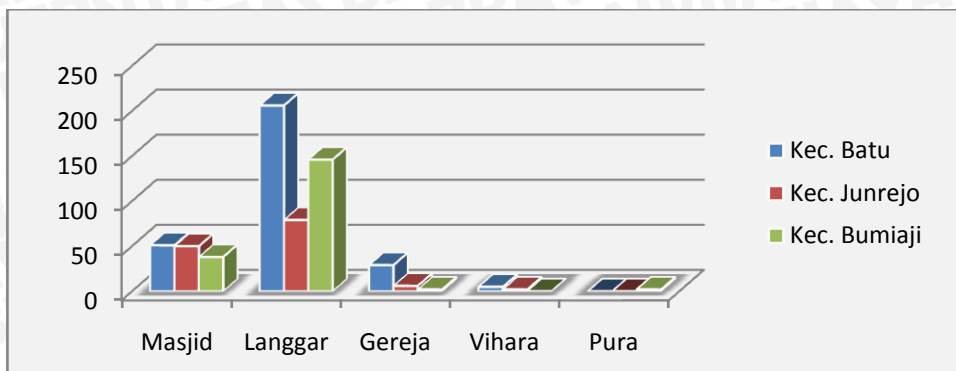
Keberadaan fasilitas peribadatan merupakan sarana untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat. Sarana peribadatan Kota Batu terdapat sebanyak 616 unit sarana yang tersebar merata pada masing-masing kecamatan. Sarana peribadatan paling banyak terdapat pada Kecamatan Batu dengan komposisi 257 unit masjid dan langgar, 29 unit gereja dan 5 unit vihara. Keberadaan pura Kota Batu hanya terdapat di Kecamatan Bumiaji yaitu sebanyak 2 unit.

Tabel 4. 25
Jumlah Sarana Peribadatan Kota Batu Tahun 2009 Per Kecamatan

Kecamatan	Jenis Sarana Peribadatan					Jumlah (unit)	Persentase Dari Keseluruhan (%)
	Masjid (unit)	Langgar (unit)	Gereja (unit)	Vihara (unit)	Pura (unit)		
Batu	51	206	29	5	-	291	47,24
Junrejo	50	79	6	2	-	137	22,24
Bumiaji	38	146	2	-	2	188	30,52
TOTAL KESELURUHAN	139	428	37	7	2	616	100

Sumber: Badan Pusat Statitik Kota Batu

Keterangan : Kecamatan Dengan Sarana Peribadatan Terbanyak



Gambar 4.24 Grafik Perbandingan Sarana Peribadatan Kota Batu Per Kecamatan

Berdasarkan hasil perbandingan menunjukkan sarana peribadatan yang paling banyak pada Kota Batu adalah masjid dan langgar yaitu sebanyak 567 unit atau 92,05 % dari keseluruhan sarana peribadatan yang terdapat di Kota Batu. Banyaknya keberadaan masjid dan langgar di Kota Batu sejalan dengan banyaknya penduduk Kota Batu yang menganut agama islam.

G. Sarana Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam kegiatan pembangunan. Selain memberikan kontribusi pada sektor perhubungan sendiri, juga menunjang keberhasilan sektor-sektor lain. Fasilitas perhubungan akan memaparkan mengenai konstruksi dan kondisi jaringan jalan serta sarana dan prasarana transportasi.

1. Konstruksi dan Kondisi Jaringan Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan baik secara kuantitas (panjang jalan) maupun kualitas (kondisi jalan) sangat penting dalam meningkatkan kegiatan mobilisasi penduduk dan barang. Panjang jalan yang terdapat pada Kota Batu adalah 490,83 Km yang terbagi atas 19 Km jalan provinsi dan 471,83 Km jalan kota. Konstruksi jalan Kota Batu sebagian besar sudah berupa jalan aspal yaitu sepanjang 377,74 Km dan konstruksi jalan dengan tanah terdapat 39,09 Km atau 30,09 % dari keseluruhan panjang jalan Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.26.

Tabel 4.26
Panjang Jalan Kota Batu Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan

Jenis Permukaan	Kategori Jalan		Jumlah (Km)	Persentase dari Keseluruhan (%)
	Propinsi (Km)	Kota (Km)		
Aspal	19	308,24	327,74	76,96
Kerikil	-	74,50	74,50	14,57
Tanah	-	39,09	39,09	7,64
TOTAL	19	471,83	490,83	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan : Permukaan Jalan Dengan Proporsi Terbesar Dari Keseluruhan Panjang Jalan

Pada umumnya kondisi jalan Kota Batu tergolong cukup baik (sedang) yaitu sepanjang 241,68 Km. Jalan dengan kondisi baik terdapat sepanjang 95,83 Km dan 33,99 % dari keseluruhan panjang jalan dengan kondisi rusak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.27.

Tabel 4. 27
Kondisi Jenis Permukaan Jalan Kota Batu

Kondisi Jalan	Kategori Jalan		Jumlah (Km)	Persentase dari Keseluruhan (%)
	Propinsi (Km)	Kota (Km)		
Baik	-	95,83	95,83	18,74
Sedang	19	202,18	221,68	47,26
Rusak Ringan	-	109,83	109,83	21,48
Rusak Berat	-	63,99	63,99	12,51
TOTAL KESELURUHAN	19	471,83	490.83	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

2. Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi akan memaparkan mengenai kondisi terminal, moda transportasi Kota Batu dan angkutan umum.

- Terminal Kota Batu

Pada Kota Batu hanya memiliki 1 unit terminal yang terdapat di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Batu. Keterbatasan prasarana perangkutan ini mengakibatkan ketergantungan pada terminal lain seperti terminal Landungsari dan Arjosari. Sehingga dengan keterbatasan ini, pelayanan perangkutan untuk penduduk Kota Batu belum optimal.

- Moda Transportasi

Moda transportasi yang digunakan dalam pergerakan barang dan jasa penduduk Kota Batu antara lain mobil, motor, bus, truck dan pick up. Jumlah kendaraan bermotor Kota Batu tahun 2009 adalah 40.051 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.28.

Tabel 4. 28
Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar
Kota Batu Tahun 2009 Berdasarkan Kepemilikan

Jenis Kendaraan	Jumlah (unit)	Jumlah Kepemilikan (KK)	Persentase Dari Keseluruhan Kendaraan Bermotor (%)
Mobil	1.181	1.122	2,95
Kendaraan Roda Dua/Motor	37.844	35.967	94,49
Bus	126	114	0,31
Truck	606	576	1,51
Pick up	294	279	0,73
Jumlah Keseluruhan (unit)	40.051	38.048	100

Sumber: Polresta Kota Batu

H. Fasilitas Umum

Fasilitas umum Kota Batu terdiri dari sarana olahraga dan balai pertemuan umum. Berdasarkan data yang diperoleh, sarana olahraga Kota Batu terdapat sebanyak 9 unit sedangkan balai pertemuan umum terdapat 1 unit yang berada pada Kecamatan Junrejo.

4.1.4 Karakteristik Sosial Politik Kota Batu

Karakteristik sosial politik Kota Batu mencakup jumlah penduduk yang mengikuti pemilu legislative dan ketersediaan organisasi masyarakat yang Kota Batu. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk Kota Batu yang memiliki hak pilih dalam kegiatan pemilu legislative adalah 130.701 jiwa. Dan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislative Kota Batu adalah 118.991 jiwa atau 91,04% dari keseluruhan penduduk yang memiliki hak pilih. Hal ini memperlihatkan sebanyak 91,04% penduduk Kota Batu berpartisipasi dalam kegiatan politik Kota Batu yaitu dengan memberikan suaranya dalam pemilihan anggota pemerintahan. Organisasi masyarakat yang terdapat pada Kota Batu adalah 24 unit organisasi masyarakat yang didalamnya tergabung organisasi kepemudaan Kota Batu.

4.1.5 Karakteristik Perekonomian Kota Batu

Sejak menjadi daerah otonom, Kota Batu bertanggung jawab penuh dalam mengelola perekonomiannya. Sebagai daerah otonom baru, kondisi perekonomian Kota Batu secara makro relatif stabil. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan keuangan dan kemampuan ekonomi Kota Batu.

A. Kemampuan Keuangan Kota Batu

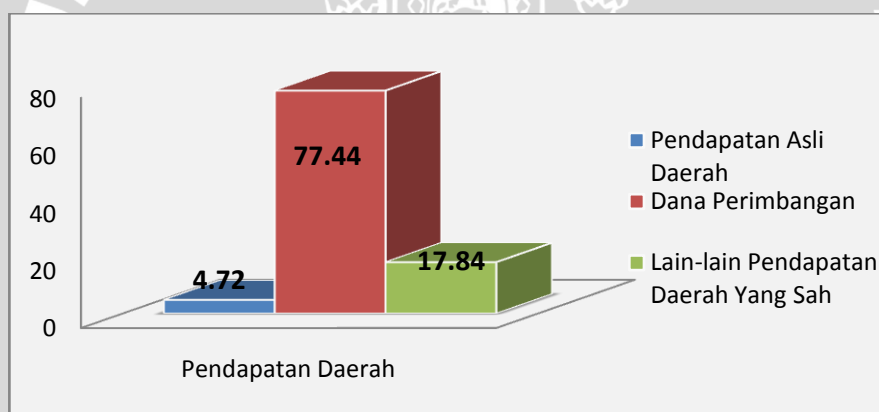
Roda pembangunan suatu wilayah dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah yang seimbang. Bentuk kemandirian Kota Batu sebagai daerah otonomi dapat dilihat dari kemampuan keuangan Kota Batu dalam hal ini penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah baik berupa bantuan maupun dana bagi hasil yang diperoleh dari provinsi.

Pada tahun 2009, penerimaan daerah Kota Batu mencapai 368.477,57 juta rupiah. Adapun bentuk penerimaan daerah Kota Batu dapat dilihat pada tabel 4.29 dan gambar 4.25.

Tabel 4. 29
Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009

Jenis Penerimaan Daerah	Jumlah (000 Rp)	Persentase Dari Keseluruhan Penerimaan Daerah (%)
Pendapatan Asli Daerah	17.386.741,57	4.72
- Pajak daerah	7.861.348,12	2.13
- Retribusi daerah	3.087.977,63	0.84
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	876.068,91	0.24
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	5.561.346,91	1.51
Dana Perimbangan	285.344.171,42	77.44
- Bagi hasil pajak	24.047.370	6.53
- Bagi hasil SDA	10.124.445,42	2.75
- Dana alokasi umum (DAU)	218.135.356,00	59.20
- Dana alokasi khusus (DAK)	33.037.000,00	8.97
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	65.746.656,50	17.84
- Dana Bagi hasil pajak dari pemerintah daerah	21.532.376,50	5.84
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	3.779.175,00	1.03
- Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	40.435.105	10.97
TOTAL KESELURUHAN	368.477.569,49	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Batu



Gambar 4. 25 Grafik Perbandingan Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009

Berdasarkan grafik perbandingan, pendapatan daerah tertinggi Kota Batu berasal dari dana perimbangan yaitu sebanyak 285.344,17 juta rupiah atau sebesar 77,44% dari keseluruhan pendapatan daerah Kota Batu. Pendapatan asli daerah Kota Batu memberikan kontribusi sebesar 4,72% bagi pendapatan Kota Batu, dengan PAD terbesar Kota Batu berasal dari sektor pajak daerah yaitu sebesar 2,13%. Pajak daerah ini berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah memberikan kontribusi sebesar 17,84% bagi pendapatan daerah Kota Batu.

B. Kemampuan Ekonomi Kota Batu

Pemerintah Kota Batu menggunakan langkah kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kestabilan ekonomi makro. Kota Batu memanfaatkannya dengan kontribusi sektoral terhadap PDRB untuk mendukung kebijakan ekonomi tersebut.

Pada tahun 2009, PDRB keseluruhan Kota Batu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga (ADHK) masing-masing sebesar Rp 2.655.639,11 juta dan Rp. 1.240.526,77 juta. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran Kota Batu terhadap PDRB Kota Batu atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp. 1.260.413,14 juta. Sedangkan kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kota Batu atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp. 495.555,55 juta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.30.

Tabel 4. 30
Produk Domestik Regional Bruto Kota Batu Tahun 2009

Sektor Basis	PDRB (juta)	
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Pertanian	495.555,55	258.657,84
Pertambangan dan Penggalian	5.124,86	2.543,47
Industri Pengolahan	193.540,49	94.857,19
Listrik dan Air Bersih	41.347,96	19.808,69
Bangunan	49.774,12	20.354,85
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	1.260.413,14	569.275,84
Pengangkutan dan Komunikasi	91.307,17	42.867,34
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	113.000,22	58.255,28
Jasa-jasa	404.575,60	173.996,27
Jumlah PDRB	2.655.639,11	1.240.526,77

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Batu

Keterangan : PDRB Terbesar

Ditinjau dari pendekatan produksinya, sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian Kota Batu berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan posisi Kota Batu sebagai daerah agrowisata dan agropolitan.

Adapun penjelasan sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian Kota Batu akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertanian

Sektor pertanian mencakup segala perusahaan yang diperoleh dari alam yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup maupun diperjual belikan kepada pihak lain. Sektor pertanian Kota Batu relatif kurang mendapat perhatian dalam kegiatan pembangunan. Namun sektor ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Batu

karena sektor ini banyak menampung luapan tenaga kerja dan berfungsi strategis dengan sumber daya alam yang mampu menyokong pembangunan.

- Tanaman Pangan

Area produktif pertanian Kota Batu sebagian dimanfaatkan untuk penanaman jenis tanaman pangan yaitu komoditas tanaman padi dan palawija. Luas area panen tanaman pangan Kota Batu adalah 3.125 Ha dengan luas area panen terbesar adalah jenis tanaman jagung yaitu 1.784 Ha. Sedangkan proporsi luas lahan panen terkecil dimanfaatkan komoditas kacang tanah yaitu 0,99 % dari keseluruhan luas panen komoditas padi dan palawija di Kota Batu. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas kacang tanah kurang berkembang di Kota Batu.

Luas lahan pertanian berpengaruh langsung pada produktivitas komoditas pertanian. Area lahan sempit maka hasil produksi pertanian akan sedikit, dan sebaliknya area lahan luas maka hasil pertanian akan banyak. Pada tahun 2009, hasil produksi pertanian terbesar berasal dari komoditas padi yaitu 7.907,7 ton, sedangkan komoditas dengan hasil produksi terkecil berasal dari kacang tanah yaitu 67 ton.

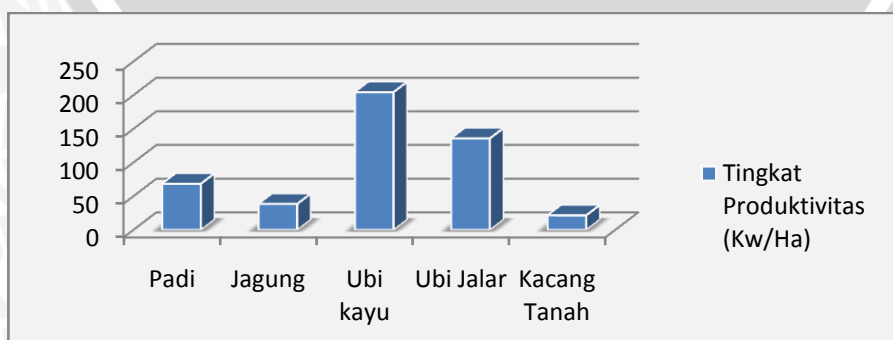
Berdasarkan tingkat produktivitasnya, komoditas padi dan palawija Kota Batu tingkat produktivitasnya mencapai 56,08 Kw/Ha. Tingkat produktivitas komoditas padi sebesar 68,46 Kw/Ha dan produktivitas kacang tanah sebesar 21,61 Kw/Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.31 dan gambar 4.26.

Tabel 4. 31
Tingkat Produktivitas Komoditas Padi dan Palawija Kota Batu

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Hasil Produksi (Kw)	Tingkat Produktivitas (Kw/Ha)
Padi	1.155	7.907,7	68,46
Jagung	1.784	6.868,4	38,50
Ubi Kayu	84	1.718	204,52
Ubi Jalar	71	965	135,92
Kacang Tanah	31	67	21,61
TOTAL	3.125	17.526,1	56,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan: = Komoditas dengan Produktivitas Tertinggi



Gambar 4. 26 Tingkat Produktivitas Komoditas Padi Dan Palawija Kota Batu

- Tanaman Holtikultura

Salah satu potensi Kota Batu sebagai Kota Agropolitan adalah keberadaan keberagaman dari tanaman holtikultura. Tanaman holtikultura Kota Batu mencakup sayur-sayuran dan buah-buahan. Tanaman ini dikembangkan secara komersial dan non komersial. Jenis tanaman holtikultura Kota Batu yang dikembangkan secara komersial adalah kentang, kubis, apel dan jeruk.

Selain untuk diperjualbelikan, petani sayur-sayuran Kota Batu juga memanfaatkannya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pada bulan Desember 2009, area panen sayur-sayuran Kota Batu sebesar 433 Ha. Luas area panen terbesar untuk tanaman sayur-sayuran pada Kota Batu terdapat pada tanaman kentang dan cabe besar. Area panen terkecil terdapat pada tanaman bayam dan bawang putih yaitu seluas 3 Ha atau 0.69% dari keseluruhan area panen tanaman sayur-sayuran Kota Batu.

Hasil produksi masing-masing sayur-sayuran Kota Batu berbeda. Pada bulan Desember 2009, hasil produksi keseluruhan sayur-sayuran Kota Batu mencapai 21.273 Ha dengan hasil produksi sayur-sayuran terbesar adalah kentang yaitu 17.2824 Kw.

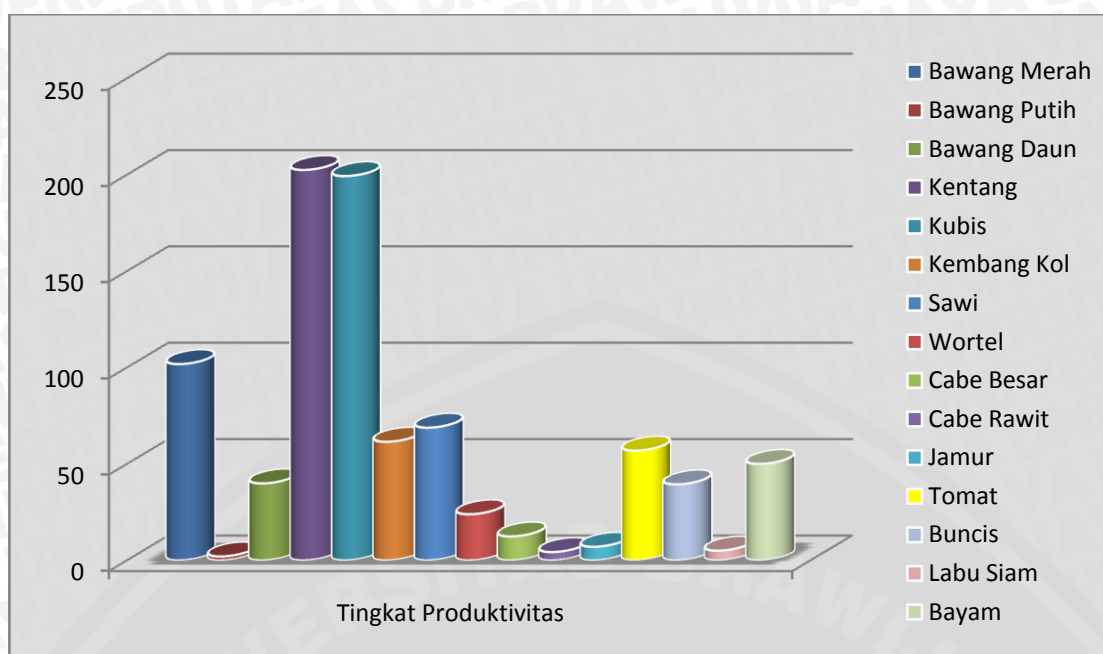
Berdasarkan tingkat produktivitasnya, produktivitas tanaman holtikultura jenis sayur-sayuran Kota Batu adalah 86,7 Kw/Ha yaitu setiap 1 Ha area panen memproduksi sebanyak 86,7 Kw sayuran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.32 dan gambar 4.27 berikut.

Tabel 4. 32
Tingkat Produktivitas Sayur-sayuran

Jenis Sayuran	Luas Panen (Ha)	Hasil Produksi (Kw)	Tingkat Produktivitas (Kw/Ha)
Bawang Merah	32	3.256	101,8
Bawang Putih	3	6	2,0
Bawang Daun	16	638	39,9
Kentang	88	17.824	202,5
Kubis	43	8.570	199,3
Kembang kol	16	984	61,5
Sawi	36	2.475	68,8
Wortel	36	861	23,9
Cabe Besar	53	656	12,4
Cabe Rawit	35	150	4,3
Jamur	47	330	7,0
Tomat	9	512	56,9
Buncis	12	473	39,4
Labu Siam	4	20	5,0
Bayam	3	150	50,0
TOTAL KESELURUHAN	433	36.905	85,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan : Komoditas dengan Tingkat Produktivitas Tertinggi



Gambar 4.27 Grafik Tingkat Produktivitas Tanaman Holtikultura Kota Batu

Tingkat produktivitas tertinggi dari sayur-sayuran berupa tanaman kentang yaitu 202,5 Kw/Ha. Tingkat produktivitas tertinggi kedua adalah kubis yaitu 199,3 Kw/Ha. Tingginya produktivitas tanaman ini menunjukkan bahwa kentang dan kubis merupakan salah satu jenis sentra produksi unggulan pertanian Kota Batu.

Di samping sayur-sayuran, tanaman holtikultura yang dikembangkan di Kota Batu adalah buah-buahan. Pohon produktif komoditas buah-buahan Kota Batu terdapat sebanyak 2.974.312 pohon.

Pohon produktif yang paling dominan sebarannya pada lahan pertanian Kota Batu adalah pohon apel yaitu sebanyak 2.735.351 pohon. Hal ini memperlihatkan bahwa petani buah-buahan pada Kota Batu banyak mengembangkan komoditas apel. Kota Batu merupakan daerah tropis pertama yang mengembangkan buah apel.

Hasil produksi buah-buahan Kota Batu pada triwulan IV tahun 2009 adalah sebanyak 156.192 kwintal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.33 dan gambar 4.28.

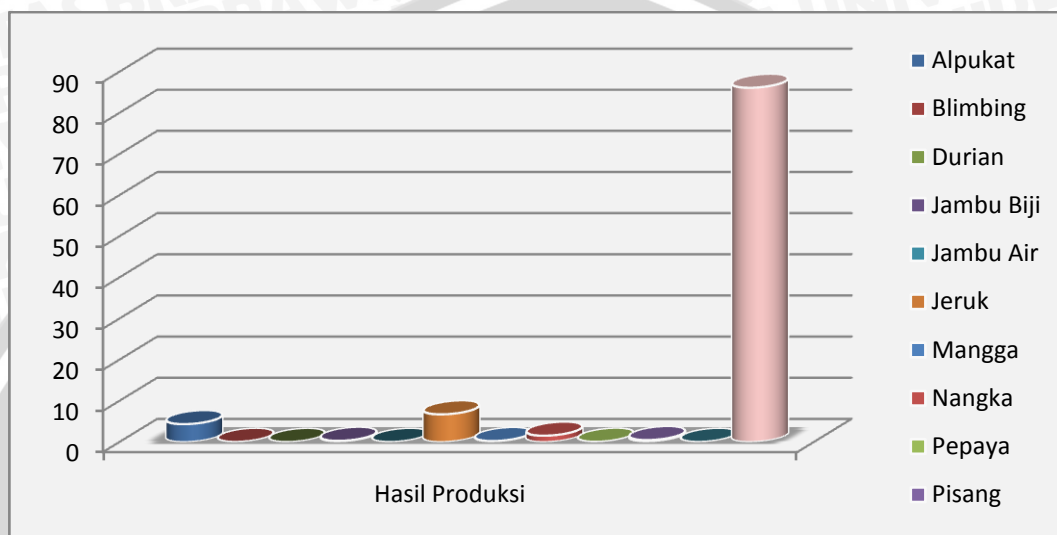
**Tabel 4.33
Jumlah Hasil Produksi Komoditas Buah-buahan Kota Batu**

Jenis Buah	Jumlah Pohon Produktif	Hasil Produksi (Kw)	Persentase Dari Keseluruhan Hasil Produksi (%)
Alpukat	53.289	6.812	4,36
Blimbing	220	72	0,05
Durian	5.685	8	0,01
Jambu Biji	10.331	470	0,30
Jambu Air	322	34	0,02
Jeruk	102.095	10.524	6,74
Mangga	4.495	396	0,25

Jenis Buah	Jumlah Pohon Produktif	Hasil Produksi (Kw)	Persentase Dari Keseluruhan Hasil Produksi (%)
Nangka	44.173	2.420	1,55
Pepaya	3.076	102	0,07
Pisang	14.971	768	0,49
Rambutan	304	56	0,04
Apel	2.735.351	134.530	86.13
TOTAL	2.974.312	156.192	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan : = Komoditas dengan Hasil Produksi Tertinggi



Gambar 4. 28 Grafik Hasil Produksi Buah-Buahan Kota Batu

Gambar di atas menunjukkan bahwa hasil produksi buah-buahan terbesar Kota Batu adalah apel dan jeruk. Hasil produksi buah apel pada triwulan IV tahun 2009 sebanyak 134.530 Kw atau 86,13% dari keseluruhan hasil produksi buah-buahan Kota Batu. Melimpahnya produktivitas tanaman ini mengakibatkan buah apel menjadi komoditas unggulan Kota Batu dan ciri khas Kota Batu.

Tanaman hortikultura seperti apel dan kentang Kota Batu sebagian besar dimanfaatkan sebagai bahan pokok industri makanan Kota Batu. Hasil olahan apel ini antara lain kripik apel, sari buah apel, jenang apel dan cuka apel.

- **Tanaman Hias**

Sebagai kota agropolitan, Kota Batu didukung oleh keadaan alam dan lingkungan yang potensial. Masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan potensi pertanian ini menjadi sebuah peluang usaha. Salah satunya adalah keberadaan keberagaman tanaman hias dan bunga potong yang terdapat pada Kota Batu.

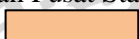
Jenis tanaman yang dikembangkan antara lain anggrek, anthurium, anyelir, gladiol, krisan dan mawar. Pada triwulan IV tahun 2009, area panen tanaman hias Kota Batu sebesar 251.072 Ha. Luas masing-masing area panen tanaman anthurium dan

anyelir adalah 39.041 m² dan 34.500 m². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.34.

Tabel 4. 34
Luas Panen Tanaman Hias Kota Batu

Jenis Tanaman Hias	Luas Panen (m ²)	Persentase Dari Keseluruhan Luas Panen (%)
Anggrek	9.836	3,92
Anthurium	39.041	15,55
Anyelir	34.500	13,74
Gerbera	3.500	1,39
Gladiol	2.665	1,06
Heliconia	800	0,32
Krisan	160.315	63,85
Mawar	415	0,17
TOTAL KESELURUHAN	251.072	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan :  = Komoditas dengan Area Panen Terluas

Berdasarkan data yang diperoleh, luas area panen terbesar tanaman hias terdapat pada komoditas bunga krisan dengan luas 160.315 m² atau 63,85% dari luas keseluruhan tanaman hias Kota Batu. Hal ini memperlihatkan tanaman hias jenis bunga krisan banyak dikembangkan oleh masyarakat Kota Batu. Tanaman hias dengan area panen terkecil adalah bunga mawar dengan luas panen 415 m² atau 0,17% dari keseluruhan luas area panen tanaman hias di Kota Batu.

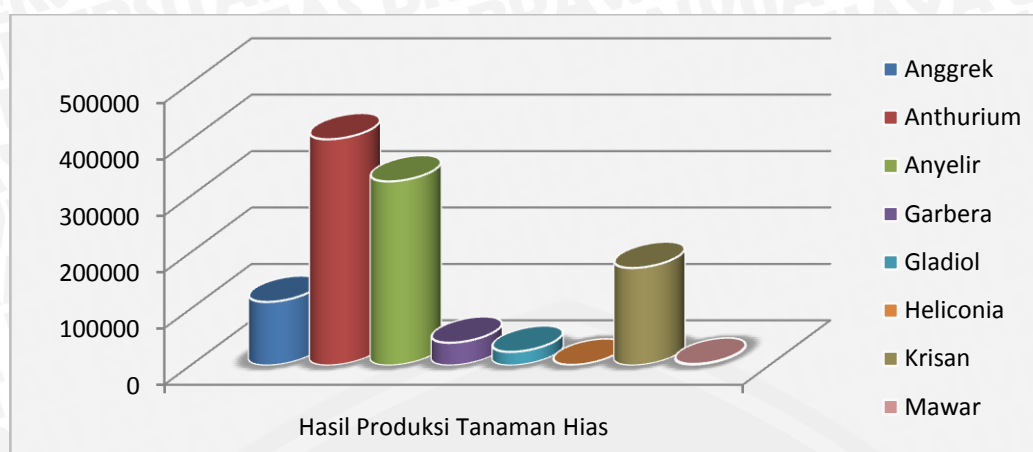
Pada triwulan IV tahun 2009, hasil produksi tanaman hias di Kota Batu adalah 1.078.856 tangkai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.35 dan gambar 4.29.

Tabel 4. 35
Hasil Produksi Tanaman Hias Kota Batu

Jenis Tanaman Hias	Hasil Produksi (Tangkai)	Persentase Dari Keseluruhan Hasil Produksi (%)
Anggrek	112.412	10,42
Anthurium	400.654	37,14
Anyelir	326.000	30,22
Gerbera	40.000	3,71
Gladiol	23.870	2,21
Heliconia	830	0,08
Krisan	172.600	16,00
Mawar	2.490	0,23
TOTAL KESELURUHAN	1.078.856	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan :  = Komoditas dengan Hasil Produksi Tertinggi



Gambar 4. 29 Grafik Perbandingan Hasil Produksi Tanaman Hias Kota Batu

Berdasarkan hasil perbandingan, jenis tanaman dengan hasil produksi tanaman hias tertinggi adalah tanaman anthurium, anyelir dan krisan. Hasil produksi anthurium di Kota Batu 400.654 tangkai atau 37.14% dari keseluruhan hasil produksi tanaman hias di Kota Batu. Untuk hasil produksi anyelir dan krisan adalah 326.000 tangkai dan 172.600 tangkai. Jenis tanaman hias dengan hasil produksi terkecil adalah tanaman heliconia sebanyak 830 tangkai atau 0,08% dari keseluruhan hasil produksi tanaman hias di Kota Batu.

Keberagaman tanaman hias pada Kota Batu, menjadikan komoditi ini menjadi potensi wisata yang dikembangkan oleh masyarakat Kota Batu. Desa Sidomulyo Kecamatan Batu ditetapkan sebagai sub terminal agribisnis tanaman hias karena banyaknya masyarakat pada wilayah ini membudidayakan tanaman hias.

2. Peternakan

Peternakan Kota Batu dibagi menjadi tiga kelompok yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas. Jenis ternak yang termasuk dalam ternak besar adalah sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda. Kambing, domba, babi, dan kelinci termasuk dalam ternak kecil. Sedangkan ternak yang termasuk dalam jenis unggas adalah ayam petelur, ayam buras, ayam pedaging, itik dan entok.

Kontribusi sektor peternakan Kota Batu dapat dilihat dari populasi ternak dan hasil produksinya. Populasi ternak Kota Batu secara keseluruhan pada tahun 2009 mencapai 544322 ekor dengan komposisi 9942 ekor ternak besar, 37773 ekor ternak kecil dan 496607 ekor unggas. Ayam pedaging merupakan jenis ternak dengan populasi tertinggi Kota Batu yaitu sebanyak 349000 ekor. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan permintaan pasar Kota Batu dan daerah sekitarnya.

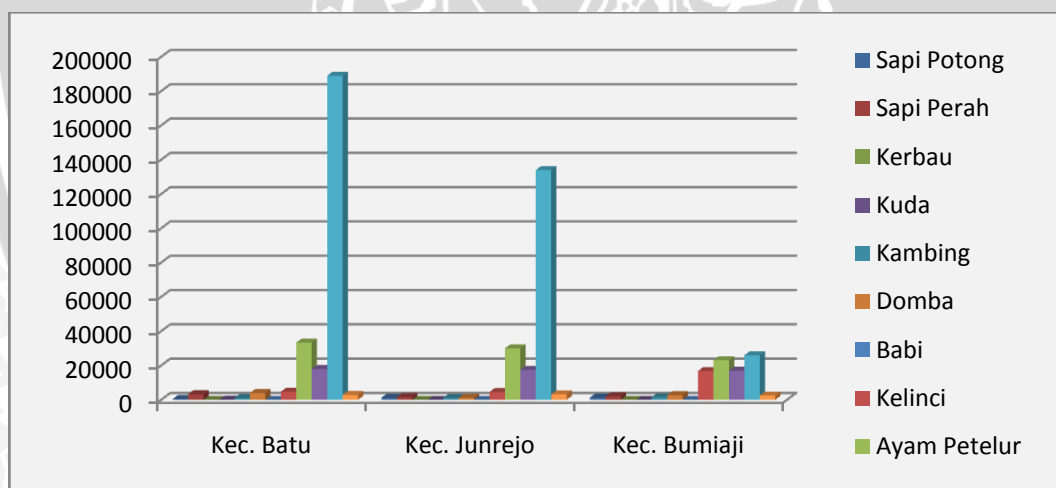
Jenis ternak besar dengan populasi tertinggi adalah sapi perah yaitu 6924 ekor. Populasi tertinggi dari kelompok ternak kecil adalah kelinci sebanyak 26143 ekor. Pada umumnya kelinci dimanfaatkan sebagai hewan hias yang pemasarannya memanfaatkan daerah-daerah wisata seperti daerah Selecta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.36 dan gambar 4.30.

Tabel 4. 36
Populasi Ternak dan Unggas Kota Batu Per Kecamatan

Jenis Ternak	Populasi Ternak Per Kecamatan (ekor)			Jumlah (ekor)	
	Batu	Junrejo	Bumiaji		
Ternak Besar	Sapi Potong	472	1180	1296	2948
	Sapi Perah	3292	1622	2010	6924
	Kerbau	0	18	0	18
	Kuda	39	6	7	52
Ternak Kecil	Kambing	1054	1135	1553	3742
	Domba	4010	1151	2694	7855
	Babi	0	19	14	33
	Kelinci	4743	4575	16825	26143
Unggas	Ayam Petelur	33400	30000	23085	86485
	Ayam Buras	18016	17505	16999	52520
	Ayam Pedaging	189000	134000	26000	349000
	Itik dan Entok	2907	3195	2500	8602
TOTAL KESELURUHAN		256933	194406	92983	544322

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan : Komoditas dengan Populasi Tertinggi



Gambar 4. 30 Grafik Populasi Ternak dan Unggas Kota Batu Per Kecamatan

Berdasarkan data yang diperoleh, populasi ternak dan unggas tertinggi berada pada Kecamatan Batu yaitu sebanyak 256933 ekor. Proporsi populasi ternak pada Kecamatan Batu adalah 3803 ekor ternak besar, 9807 ekor ternak kecil dan 243323 ekor unggas. Populasi ternak tertinggi kedua berada pada Kecamatan Junrejo dengan jenis ternak terbanyak adalah ayam pedaging sebanyak 134000 ekor.

Pada masing-masing kecamatan Kota Batu jenis ternak dengan populasi tertinggi terdapat pada sapi perah, kelinci dan ayam pedaging. Banyaknya populasi sapi

perah pada tiap kecamatan Kota Batu mengakibatkan Kota Batu menjadi salah satu kota pemasok susu segar ke perusahaan-perusahaan susu di Indonesia. Pusat peternakan sapi perah Kota Batu terdapat pada Desa Pesanggerahan dan Desa Oro-oro Dombo, Kecamatan Batu.

Hasil produksi ternak dan unggas Kota Batu berupa daging, susu, kulit dan telur. Pada tahun 2009, hasil produksi susu Kota Batu mencapai 6106 liter. Produk susu Kota Batu dikelola oleh pemerintah secara terpadu melalui KUD Batu. Sebanyak 80% susu segar dikirim ke PT. Greenfield dan PT. Nestle yang berada di Pasuruan. Sisanya dikelola sendiri oleh KUD Batu menjadi susu segar kemasan dengan merk dagang Koperasi Susu Batu (KSB).

Produksi daging Kota Batu mencapai 1694 ton dengan komposisi 1401 ton daging berasal dari ternak besar, 126 ton daging berasal dari ternak kecil dan 167 ton daging unggas. Produksi daging terbesar secara keseluruhan berasal dari daging sapi potong. Banyaknya hasil produksi daging menunjukkan tingginya permintaan pasar terhadap produk daging.

Produk kulit ternak Kota Batu banyak dimanfaatkan untuk konsumsi. Produksi kulit Kota Batu pada tahun mencapai 30 ton. Sedangkan produksi telur mencapai 579 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.37.

Tabel 4. 37
Hasil Produksi Ternak dan Unggas Kota Batu

Jenis Ternak	Hasil Produksi				
	Susu (Liter)	Daging (ton)	Kulit (ton)	Telur (ton)	
Ternak Besar	Sapi Potong	2223	1343	27	-
	Sapi Perah	3791	58	1	-
	Kerbau	-	-	-	-
	Kuda	-	-	-	-
Ternak Kecil	Kambing	92	51	1	-
	Domba	-	75	1	-
	Babi	-	-	-	-
	Kelinci	-	-	-	-
Unggas	Ayam Petelur	-	56	-	579
	Ayam Buras	-	85	-	43
	Ayam Pedaging	-	2	-	1
	Itik dan Entok	-	24	-	-
TOTAL KESELURUHAN		6106	1694	30	623

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

3. Pariwisata

Letak Kota Batu memiliki spesifikasi khusus yang dikelilingi Pegunungan Panderman, Gunung Banyak, Gunung Welirang, dan Gunung Banyak dengan potensi daya tarik wisata yang beraneka ragam. Keberagaman obyek wisata mengakibatkan Kota Batu menjadi salah satu ikon kota wisata Provinsi Jawa Timur. Kota wisata Batu

berbeda dengan kota wisata lain. Selain menawarkan keindahan pemandangan alam, Kota Batu juga memanfaatkan potensi wilayah agronya sebagai salah satu andalan wisata Kota Batu.

Obyek wisata Kota Batu dikelola oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat Kota Batu yang terdiri dari wisata alam, wisata agro dan wisata buatan. Obyek wisata Kota Batu terdapat sebanyak 37 obyek wisata. Sebagian besar obyek wisata Kota Batu merupakan obyek wisata alam yang tersebar pada setiap kecamatan Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.38.

Tabel 4. 38
Obyek Wisata Kota Batu

Kecamatan	Jenis Wisata (unit)			Jumlah (unit)	Persentase Dari Keseluruhan Obyek Wisata (%)
	Wisata Alam	Wisata Agro	Wisata Buatan		
Kec. Batu	6	6	8	20	54,05
Kec. Junrejo	2	1	4	7	18,92
Kec. Bumiaji	5	5	-	10	27,03
TOTAL	13	12	12	37	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan : Kecamatan Dengan Obyek Wisata Terbanyak

Obyek wisata terbanyak terdapat pada Kota Batu yaitu sebanyak 37 buah obyek wisata yang terdiri dari 13 obyek wisata alam, 12 wisata agro dan 12 obyek wisata buatan. Pada Kecamatan Junrejo terdapat 7 obyek wisata atau 18,92% dari keseluruhan obyek wisata Kota Batu yang terdiri dari 2 obyek wisata alam, 1 wisata agro dan 4 wisata buatan. Jenis obyek wisata yang paling dominan pada Kecamatan Junrejo adalah wisata buatan yang sebagian besar merupakan industri kerajinan oleh masyarakat setempat seperti batik, onyx, gamelan dan gerabah.

Sektor pariwisata merupakan salah satu bagian kegiatan ekonomi yang sangat kompleks sehingga dalam menciptakan produknya, sektor pariwisata harus bekerja sama dengan sektor lain. Salah satu pendukung pariwisata Kota Batu adalah pembangunan infrastruktur melalui pengembangan jalan lingkar Kota Batu. Pembangunan jalan lingkar ini bertujuan untuk memudahkan akses masuk menuju Kota Batu dan mengurangi kemacetan yang terjadi.

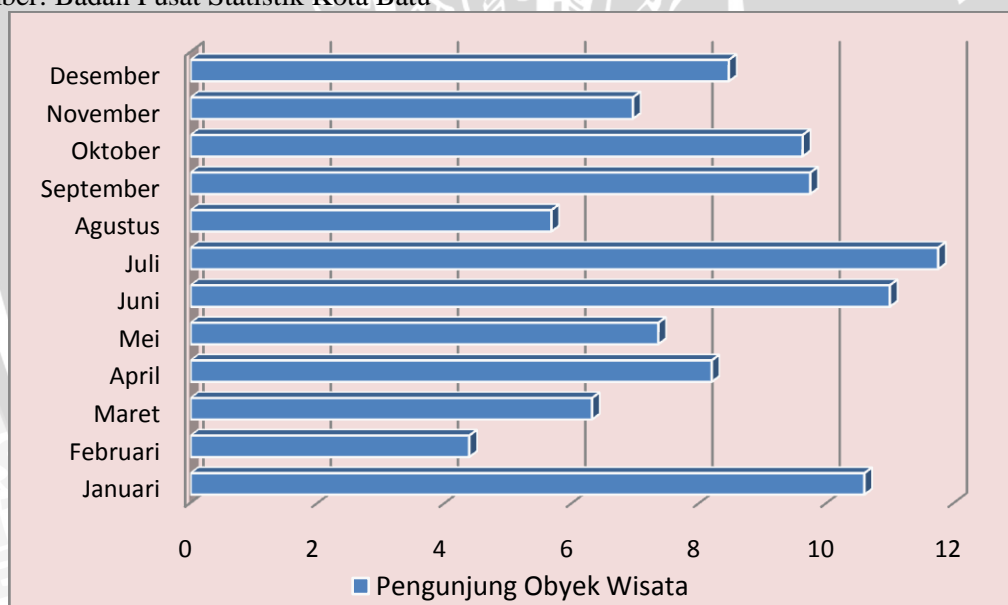
Penghubung jalan menuju Kota Batu dari wilayah Kota Malang menggunakan jalan lingkar selatan dengan jalur melalui ruas Jalan Dau-Desa Pendem-Desa Junrejo-Desa Tlekung-Oro-oro dombo dan Pesanggrahan. Jalan lingkar utara merupakan penghubung menuju Kota Batu melalui wilayah Kabupaten Malang yaitu ruas jalan Karangploso-Desa Giripurno-Desa Bumiaji dan Desa Sidomulyo.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2009, dari enam obyek wisata Kota Batu jumlah wisatawan yang berkunjung baik wisatawan domestik maupun lokal mencapai 1.906.935 orang. Obyek wisata Kota Batu yang paling banyak dikunjungi adalah wahana bermain Jatim Park dengan jumlah pengunjung sebanyak 722.376 orang.

Tabel 4. 39
Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Kota Batu Tahun 2009

Bulan	Pengunjung Obyek Wisata (orang)						Jumlah (orang)
	Jatim Park	Selekta	BNS	Agro Kusuma	Songgoriti	Cangar	
Januari	84.789	50.131	19.554	7.501	4.183	35.729	201.887
Februari	40.898	16.903	9.180	3.268	2.266	10.985	83.500
Maret	40.113	28.377	15.198	10.154	3.185	23.322	120.349
April	89.173	21.869	14.070	4.308	5.300	21.416	156.136
Mei	43.886	41.183	17.650	7.649	4.215	25.616	140.199
Juni	87.664	56.503	24.735	9.296	8.777	22.627	209.602
Juli	83.717	52.165	34.816	8.877	9.669	34.836	224.080
Agustus	43.337	22.973	16.757	4.845	4.775	15.512	108.199
September	41.711	58.082	36.265	7.267	1.230	41.147	185.702
Oktober	86.114	38.516	17.654	5.640	8.895	26.721	183.540
November	39.797	39.224	16.980	6.090	6.562	23.816	132.469
Desember	41.177	53.830	30.114	8.556	6.479	21.116	161.272
TOTAL	722.376	479.756	252.973	83.451	65.536	302.843	1906935

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu



Gambar 4. 31 Grafik Pengunjung Obyek Wisata Kota Batu Tahun 2009

Berdasarkan grafik, jumlah pengunjung obyek wisata Kota Batu paling tinggi terjadi pada bulan juni dan juli dengan jumlah pengunjung masing-masing bulan sebanyak 209.602 orang dan 224.080 orang. Hal ini dikarenakan bulan Juni dan Juli merupakan musim liburan sekolah. Mendekati pergantian tahun yaitu pada bulan Desember dan Januari jumlah pengunjung obyek wisata meningkat kembali setelah mengalami penurunan jumlah pengunjung pada bulan Agustus sampai bulan November.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu telah didukung oleh fasilitas penunjang berupa hotel dan restaurant. Pada tahun 2009, jumlah hotel dan villa yang terdapat pada Kota Batu sebanyak 405 unit. Kontribusi perhotelan untuk pendapatan Kota Batu dapat ditunjukkan oleh produktivitas hotel yang digambarkan dari jumlah malam kamar terpakai tamu menginap (*guest night*) di Kota Batu. Pada tahun 2009, jumlah malam kamar terpakai hotel Kota Batu mencapai 429.108 kamar dengan proporsi jumlah malam kamar terpakai hotel berbintang terdapat sebanyak 133.596 kamar dan hotel kelas melati sebanyak 295.512 kamar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.40.

Tabel 4. 40
Jumlah Malam Kamar Terpakai Berdasarkan Jenis Hotel

Bulan	Jenis Hotel (Kamar)		Jumlah (kamar)	Persentase Dari Keseluruhan Malam Kamar Terpakai (%)
	Hotel Berbintang	Hotel Melati		
Januari	9.936	20.378	30.314	7,06
Februari	9.906	19.188	29.094	6,78
Maret	11.244	22.956	34.200	7,97
April	10.443	22.602	33.045	7,70
Mei	10.758	23.605	34.363	8,01
Juni	11.589	24.567	36.156	8,43
Juni	12.321	27.632	39.953	9,31
Agustus	10.728	25.531	36.259	8,45
September	9.836	25.013	34.849	8,12
Oktober	12.207	26.141	38.348	8,94
November	12.198	26.243	38.441	8,96
Desember	12.430	31.656	44.086	10,27
TOTAL KESELURUHAN	133.596	295.512	429.108	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Keterangan : = Bulan Dengan Jumlah Malam Kamar Terpakai Tertinggi

Banyaknya jumlah malam kamar yang terpakai menggambarkan banyaknya kunjungan wisatawan yang menginap di Kota Batu. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah malam kamar terpakai tertinggi terjadi pada bulan Desember. Hal ini menunjukkan banyaknya preferensi masyarakat untuk menghabiskan akhir tahun di Kota Batu.

4. Industri Pengolahan

Sektor industri Kota Batu lebih berperan sebagai sektor penunjang pariwisata Kota Batu. Sebagai kota wisata, Kota Batu kurang mendukung berkembangnya kegiatan industri yang dapat menimbulkan polutan pada Kota Batu. Pemerintah menjaga hal ini agar kelestarian lingkungan hidup dan kesejukan Kota Batu tetap terjaga.

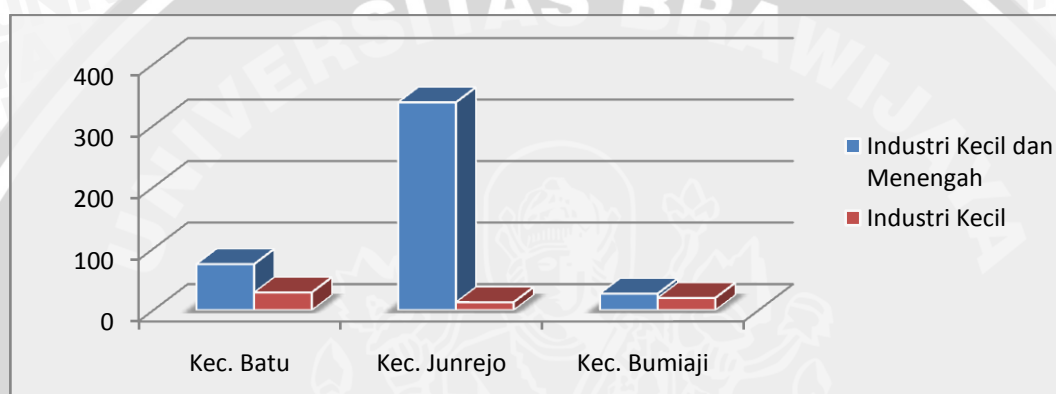
Pada tahun 2009, jumlah industri yang terdapat pada Kota Batu adalah sebanyak 502 unit industri yang tersebar pada seluruh wilayah kecamatan Kota Batu.

Perindustrian Kota Batu dibagi menjadi dua kelompok yaitu industri rumah tangga dan industri kecil dan menengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.41 dan gambar 4.32.

Tabel 4. 41
Jumlah Industri Kota Batu Menurut Kelompok Industri

Kecamatan	Kelompok Industri		Jumlah (unit)	Persentase Dari Keseluruhan Industri (%)
	Industri Kecil dan Menengah (unit)	Industri Rumah Tangga (unit)		
Batu	75	29	104	20,72
Junrejo	338	13	351	69,92
Bumiaji	27	20	47	9,36
TOTAL KESELURUHAN	404	62	502	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu



Gambar 4. 32 Grafik Perbandingan Jumlah Industri Kota Batu Per Kecamatan

Berdasarkan hasil perbandingan, jenis industri yang berkembang dan mendominasi pada Kota Batu adalah industri kecil dengan pusat sentra industri terdapat pada Kecamatan Junrejo. Jumlah industri yang terdapat pada Kecamatan Junrejo adalah sebanyak 351 unit yang terdiri dari 338 unit industri kecil dan menengah dan 13 unit industri rumah tangga. Pada Kecamatan Batu terdapat 104 unit industri atau 20,72% dari keseluruhan industri yang terdapat pada Kota Batu.

Produk industri yang dihasilkan sebagian besar berupa makanan dan minuman yang menjadi oleh-oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Bahan baku yang digunakan sebagian besar memanfaatkan hasil produksi kegiatan pertanian Kota Batu. Industri pengolahan makanan dan minuman banyak berkembang di Kota Batu baik pada industri kecil dan menengah maupun industri rumah tangga.

4.1.6 Karakteristik Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu

Penduduk merupakan sumber daya potensial yang berguna dalam setiap gerak pembangunan apabila diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Untuk menciptakan hal tersebut, pemerintah Kota Batu memainkan perannya

untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan penduduk Kota Batu melalui program pembangunan manusia. Tingkat kesejahteraan manusia Kota Batu dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia (IPM) yaitu indeks harapan hidup (*longevity*), indeks pengetahuan (*knowledge*) dan indeks pendapatan.

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Batu pada tahun 2009 mencapai 73,74 dengan proporsi 73,20 indeks harapan hidup, 83,38 indeks pengetahuan dan 64,65 untuk indeks pendapatan. Nilai IPM yang dicapai Kota Batu menunjukkan status pembangunan manusia Kota Batu termasuk dalam kategori menengah ke atas. Klasifikasi IPM Kota Batu berdasarkan standart yang ditetapkan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) yaitu sebagai berikut:

- Kategori rendah yaitu nilai IPM lebih kecil dari 50.
- Kategori menengah ke bawah yaitu nilai IPM ≤ 50 dan lebih kecil dari 66.
- Kategori menengah ke atas yaitu nilai IPM ≤ 66 dan lebih kecil dari 80.
- Kategori tinggi yaitu nilai IPM ≥ 80 .

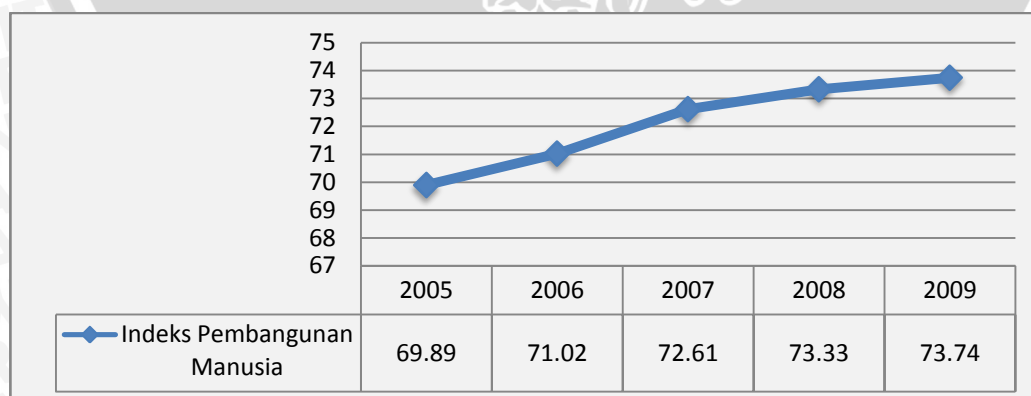
Selama kurun lima tahun pembangunan manusia Kota Batu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2005, indeks pembangunan manusia Kota Batu sebesar 69,89 dan pada tahun 2008 meningkat sehingga mencapai 73,33. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.42 dan gambar 4.33

Tabel 4. 42

Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2005	69,89
2006	71,02
2007	72,61
2008	73,33
2009	73,74

Sumber: Bappeda Kota Batu



Gambar 4. 33 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu

Berdasarkan grafik perbandingan, indeks pembangunan manusia Kota mengalami perkembangan yaitu dengan peningkatan nilai indeks pembangunan setiap

tahunnya. Hal ini menunjukkan selama lima tahun terakhir, program pembangunan manusia Kota Batu telah mampu memajukan kualitas masyarakat Kota Batu.

Adapun penjelasan ketiga komponen dalam indeks pembangunan manusia Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Indeks Harapan Hidup (*longevity*)

Indeks harapan hidup merupakan alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Indeks harapan hidup merupakan perbandingan dari hasil pengolahan angka harapan hidup dengan hasil pengolahan hidup panjang.

Pada tahun 2009, angka harapan hidup Kota Batu adalah 68.93, yang artinya setiap bayi yang lahir pada tahun 2009 memiliki harapan untuk hidup sampai usia 69 tahun. Maka indeks harapan hidup Kota Batu pada tahun 2009 adalah 73,20. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan berikut:

$$\text{Indeks Harapan Hidup} = \frac{\text{Angka Harapan Hidup} - \text{Nilai Minimum Hidup Panjang}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum Hidup Panjang}}$$

$$\text{Indeks Harapan Hidup} = \frac{(68,93 - 25)}{(85 - 25)}$$

$$\text{Indeks Harapan Hidup} = 0,732 \times 100$$

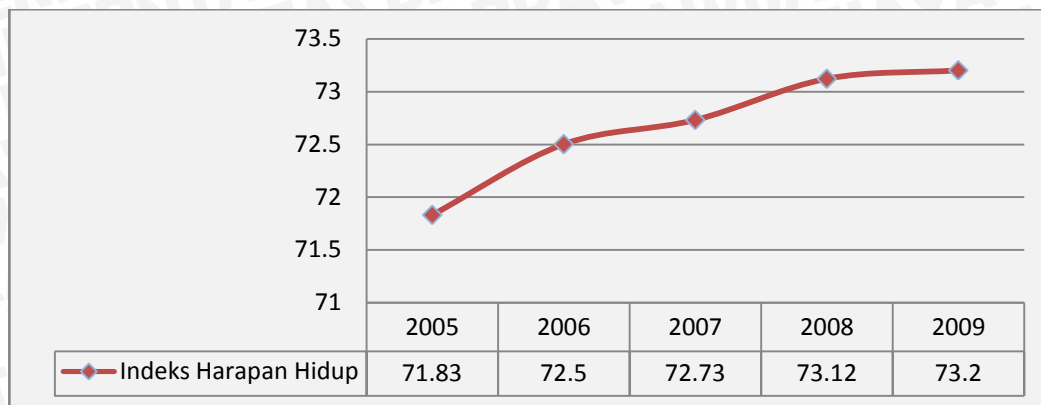
$$\text{Indeks Harapan Hidup} = 73,20\%$$

Indeks harapan hidup Kota Batu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, indeks usia hidup Kota Batu mencapai 72,73. Nilai ini meningkat 0,47 dari nilai indeks usia hidup Kota Batu pada tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.43 dan gambar 4.34.

Tabel 4. 43
Indeks Usia Hidup (Longevity) Kota Batu

Tahun	Angka Harapan Hidup	Indeks Harapan Hidup (%)
2005	68.10	71,83
2006	68.50	72,50
2007	68.64	72,73
2008	68.87	73,12
2009	68.93	73,20

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu



Gambar 4. 34 Grafik Indeks Harapan Hidup Kota Batu

Kenaikan indeks harapan hidup Kota Batu menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Batu. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga medis yang telah tersebar merata pada tiap kecamatan Kota Batu dan kemudahan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan Kota Batu.

2. Indeks Pengetahuan (*Knowledge*)

Pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dikatakan berhasil apabila suatu wilayah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Perkembangan pembangunan SDM melalui sektor pendidikan dapat digambarkan melalui indeks pengetahuan (*knowledge*). Indeks pengetahuan merupakan penjumlahan dari hasil pengolahan angka melek huruf dan hasil pengolahan rata-rata lama sekolah.

Berdasarkan data yang diperoleh, angka melek huruf Kota Batu pada tahun 2009 sebesar 97,40%. Dan rata-rata lama bersekolah di Kota Batu adalah 8,3 tahun. Maka indeks pengetahuan Kota Batu adalah 83,37. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan berikut:

$$\text{Indeks Pengetahuan} = \left(\frac{2}{3} \text{ Indeks melek Huruf}\right) + \left(\frac{1}{3} \text{ Indeks rata - rata lama sekolah}\right)$$

$$\text{Indeks Pengetahuan} = \left(\frac{2}{3} \times 0,9740\right) + \left(\frac{1}{3} \times 0,5533\right)$$

$$\text{Indeks Pengetahuan} = 0,6493 + 0,1844$$

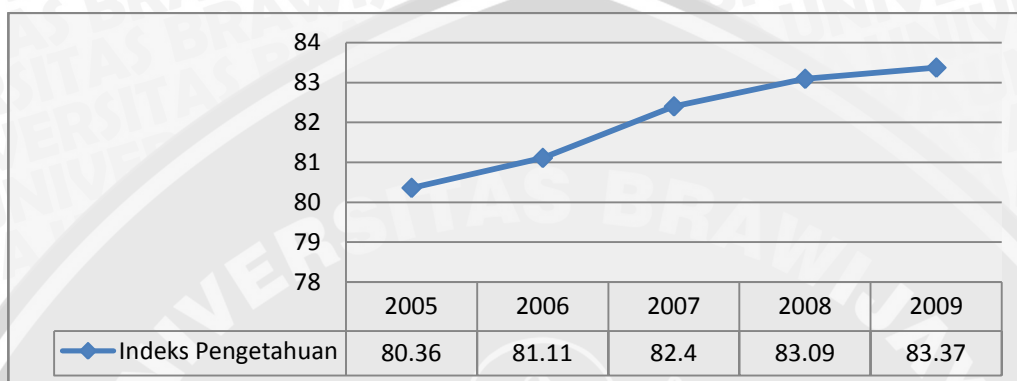
$$\text{Indeks Pengetahuan} = 0,8337 \times 100 = 83,37$$

Indeks pengetahuan Kota Batu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 indeks pengetahuan Kota Batu sebesar 80,36 dengan proporsi 94,81% penduduk melek huruf dan rata-rata lama sekolah pada Kota Batu adalah 7,72 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.44 dan gambar 4.35.

Tabel 4. 44
Indeks Pengetahuan Kota Batu

Tahun	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indeks Pengetahuan
2005	94,81	7,72	80,36
2006	95,13	7,96	81,11
2007	96,30	8,19	82,40
2008	97,30	8,20	83,09
2009	97,40	8,30	83,37

Sumber: Bappeda Kota Batu



Gambar 4. 35 Grafik Indeks Pengetahuan Kota Batu

Peningkatan indeks pengetahuan Kota Batu disebabkan dua komponen pendukungnya yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Batu yang juga mengalami peningkatan. Meningkatnya kedua indikator ini memperlihatkan usaha pemerintah Kota Batu dalam memajukan pendidikan Kota Batu.

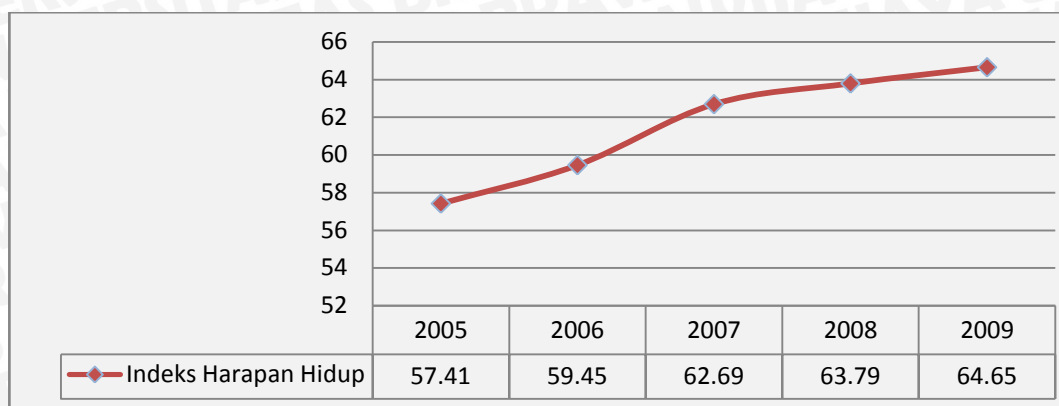
3. Indeks Pendapatan (Daya Beli)

Indeks pendapatan (daya beli) masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan. Pada tahun 2009, indeks pendapatan Kota Batu sebesar 64,65. Indeks pendapatan Kota Batu pada tahun tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, indeks pendapatan Kota Batu mencapai 63,79. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.45 dan gambar 4.36.

Tabel 4. 45
Indeks Pendapatan Kota Batu

Tahun	Indeks Pendapatan
2005	57.41
2006	59.45
2007	62,69
2008	63,79
2009	64,65

Sumber: Bappeda Kota Batu



Gambar 4. 36 Grafik Indeks Pendapatan Kota Batu

4.2 Karakteristik Wilayah Kabupaten Induk

Kabupaten Malang merupakan kabupaten induk dari daerah otonom Kota Batu sebelum pemekaran wilayah. Pada tahun 2001 Kota Batu resmi berdiri sendiri dan memisahkan diri dari wilayah administrasi Kabupaten Malang. Untuk menunjang evaluasi kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi, perlu diperhatikan karakteristik Kabupaten Malang sebagai kabupaten induk dari daerah otonom Kota Batu. Adapun penjelasan karakteristik wilayah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

4.2.1 Karakteristik Fisik Dasar Kabupaten Malang

Karakteristik fisik dasar merupakan pemaparan mengenai kondisi geografis Kabupaten Malang, termasuk luas wilayah dan wilayah administrasi Kabupaten Malang.

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Malang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan letak astronominya, Kabupaten Malang terletak diantara $112^{\circ} 17', 10.90''$ Bujur Timur dan $122^{\circ} 57', 00,00''$ Bujur Timur serta $7^{\circ} 44', 55.11''$ Lintang Selatan dan $8^{\circ} 26', 35,45''$ Lintang Selatan. Batas administrasi Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang

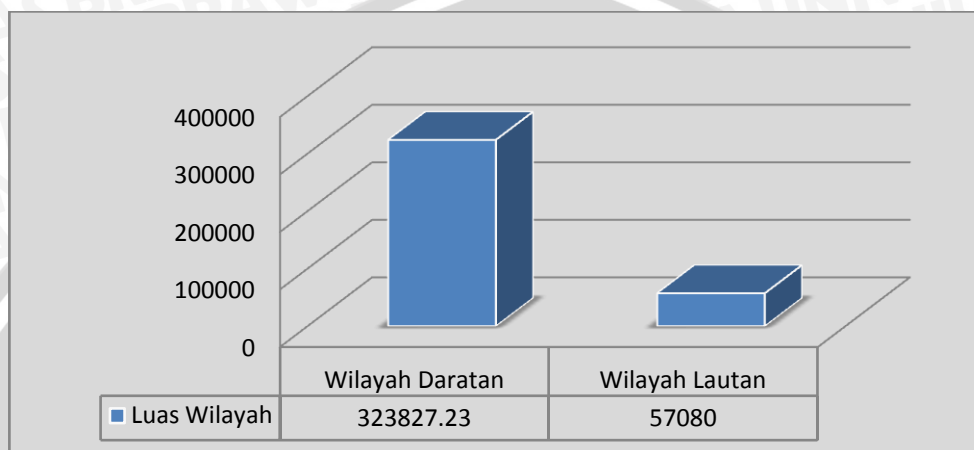
1. Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Malang terdiri atas wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Malang adalah 380.907,23 Ha dengan proporsi 323.827,23 Ha luas wilayah daratan dan 57.080 Ha luas wilayah lautan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.46 dan gambar 4.37.

Tabel 4. 46
Luas Wilayah Kabupaten Malang

Jenis Wilayah	Lahan Kering (Ha)	Lahan Sawah (Ha)	Perairan (Ha)	Jumlah (Ha)	Persentase Dari Keseluruhan Wilayah Kab. Malang (%)
Wilayah Daratan	273922.23	49905	-	323827.23	85.01
Wilayah Lautan	-	-	57080	57080	14.99
TOTAL	274305.23	49522	57080	380907.23	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang



Gambar 4. 37 Grafik Luas Wilayah Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, luas wilayah daratan Kabupaten Malang lebih besar dibandingkan luas wilayah lautan. Dari keseluruhan kecamatan pada Kabupaten Malang, hanya 6 kecamatan yang berbatasan langsung dengan perairan/lautan dengan panjang garis pantai 85,95 Km.

Untuk luas wilayah efektif yang dimanfaatkan selain sebagai kawasan lindung pada Kabupaten Malang adalah seluas 276.791,90 Ha atau 72,67% dari luas wilayah keseluruhan wilayah Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.47.

Tabel 4. 47
Luas Wilayah Efektif Kabupaten Malang

Jenis Kawasan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Dari Wilayah Keseluruhan (%)
Wilayah Tidak Efektif (Kawasan Lindung)	104.115,33	27.33
Wilayah Efektif (Kawasan Budidaya)	276.791,90	72.67
TOTAL KESELURUHAN	380.907,23	100

Sumber: RTRW Kabupaten Malang 2007-2027

Kawasan pesisir Kabupaten Malang ditinjau dari kondisi fisiknya merupakan kawasan lindung baik dengan fungsi kawasan perlindungan setempat, kawasan perlindungan bagi kawasan bawahannya maupun sebagai kawasan sempadan pantai Kabupaten Malang.

2. Wilayah Administrasi

Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan dengan 12 kelurahan dan 378 desa. Pusat pemerintahan Kabupaten Malang terdapat pada Kecamatan Kepanjen dengan 4 kelurahan dan 14 desa. Untuk lebih jelasnya, jumlah wilayah administrasi Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.48.

Tabel 4. 48
Jumlah Wilayah Administrasi Kabupaten Malang

No.	Status Wilayah Administrasi	Jumlah
1.	Kecamatan	33
2.	Kelurahan	12
3.	Desa	378
4.	RW	3.133
5.	RT	14.054

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Kecamatan-kecamatan yang terdapat pada wilayah administratif Kabupaten Malang masing-masing memiliki jarak 6-50 km menuju pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.49.

Tabel 4. 49
Jarak Kecamatan Menuju Pusat Kabupaten Malang

Kecamatan	Jarak Menuju Pusat Kota (km)	Waktu Tempuh (menit)
Kasembon	50	75
Ngantang	38	57
Pujon	35	53
Dau	21	32
Wagir	10	15
Pakisaji	6	9
Ngajum	6	9
Wonosari	13	20
Kromengan	9	14
Sumberpucung	11	17
Kalipare	14	21
Donomulyo	25	38
Kepanjen	0	0
Bantur	21	32
Pagak	12	18
Gedangan	20	30
Sumbermanjing	23	35
Dampit	23	35
Tirtoyudo	32	48
Ampelgading	40	60
Pagelaran	8	12
Gondanglegi	9	14
Turen	13	20
Bululawang	13	20
Tajinan	16	24
Wajak	19	29
Poncokusumo	22	33
Tumpang	20	30
Pakis	21	32
Jabung	25	38
Lawang	33	50

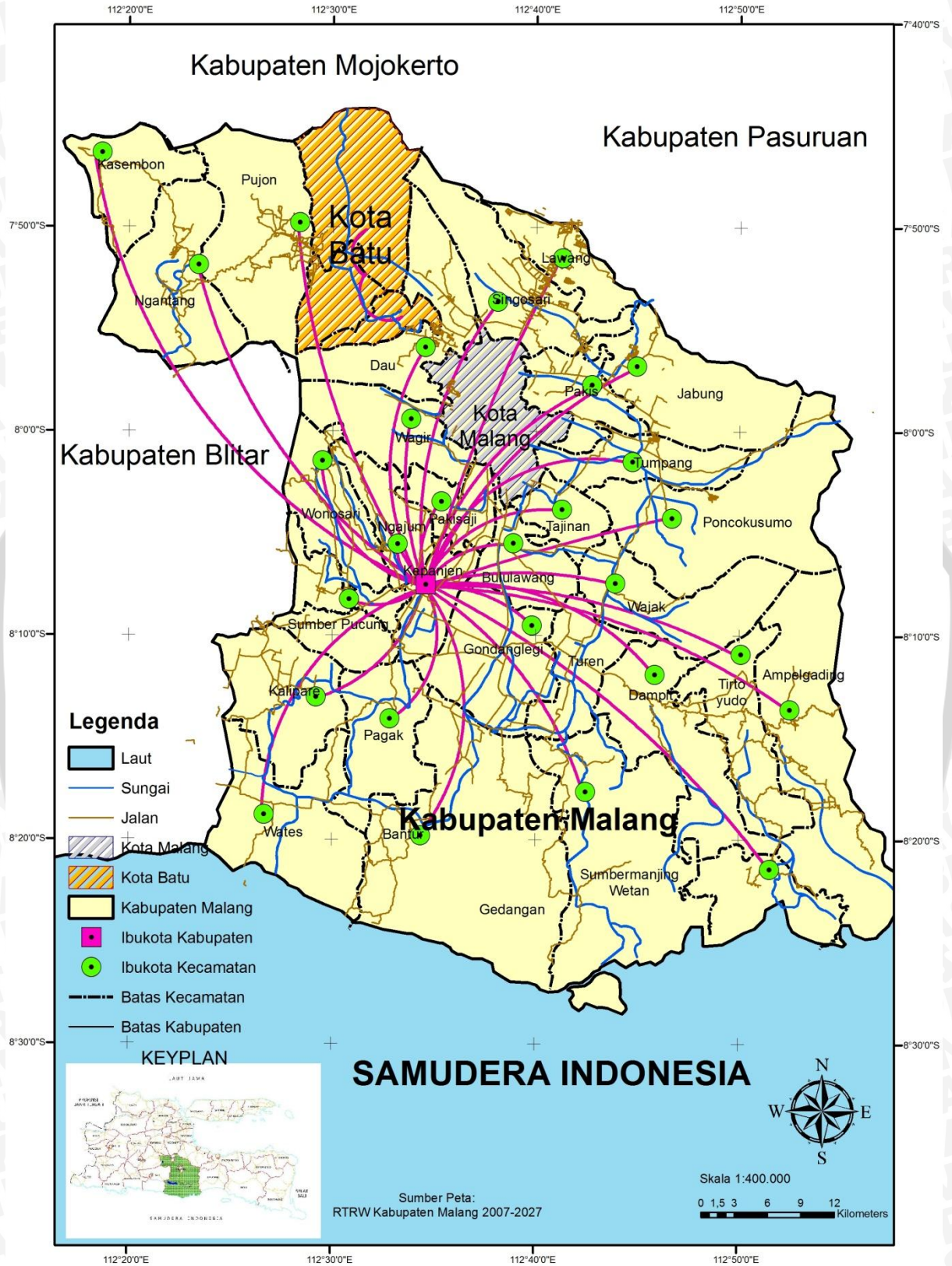
Kecamatan	Jarak Menuju Pusat Kota (km)	Waktu Tempuh (menit)
Singosari	26	39
Karangploso	25	38
TOTAL	659	997

Berdasarkan data yang diperoleh, jarak Kecamatan Kasembon merupakan jarak terjauh menuju pusat pemerintahan Kabupaten Malang yaitu 50 km dengan waktu tempuh selama 75 menit perjalanan. Sedangkan Kecamatan Pakisaji dan Ngajum merupakan kecamatan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Malang yaitu dengan jarak 6 km dan waktu tempuh yang diperlukan menuju pusat kabupaten adalah 9 menit perjalanan.





Gambar 4. 38Peta Administrasi Kabupaten Malang



Gambar 4. 39Peta Rentang Kendali Kabupaten Malang



4.2.2 Karakteristik Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Malang

Karakteristik kependudukan dan tenaga kerja Kabupaten Malang akan memaparkan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, dan jumlah tenaga kerja yang terdapat pada Kabupaten Malang.

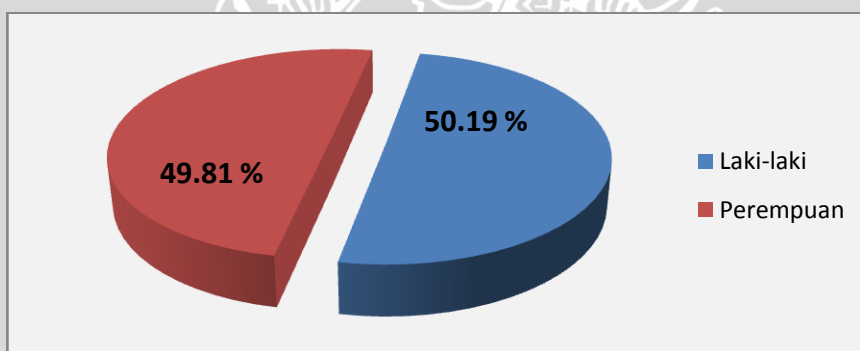
A. Kependudukan

Berdasarkan hasil susenas, jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2009 adalah 2.425.311 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 700.162. Komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.217.377 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.207.934 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.50 dan gambar 4.40.

Tabel 4. 50
Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Dari Keseluruhan Jumlah Penduduk Kab. Malang (%)
Laki-laki	1.217.377	50.19
Perempuan	1.207.934	49.81
TOTAL KESELURUHAN	2.425.311	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang



Gambar 4. 40 Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil perbandingan, komposisi penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan yaitu 50,19% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Malang. Untuk kepadatan penduduk, Kabupaten Malang memiliki tingkat kepadatan 749 jiwa/km², dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat pada Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Pakis yaitu masing-masing sebesar 2.303 jiwa/km² dan 2.016 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.51.

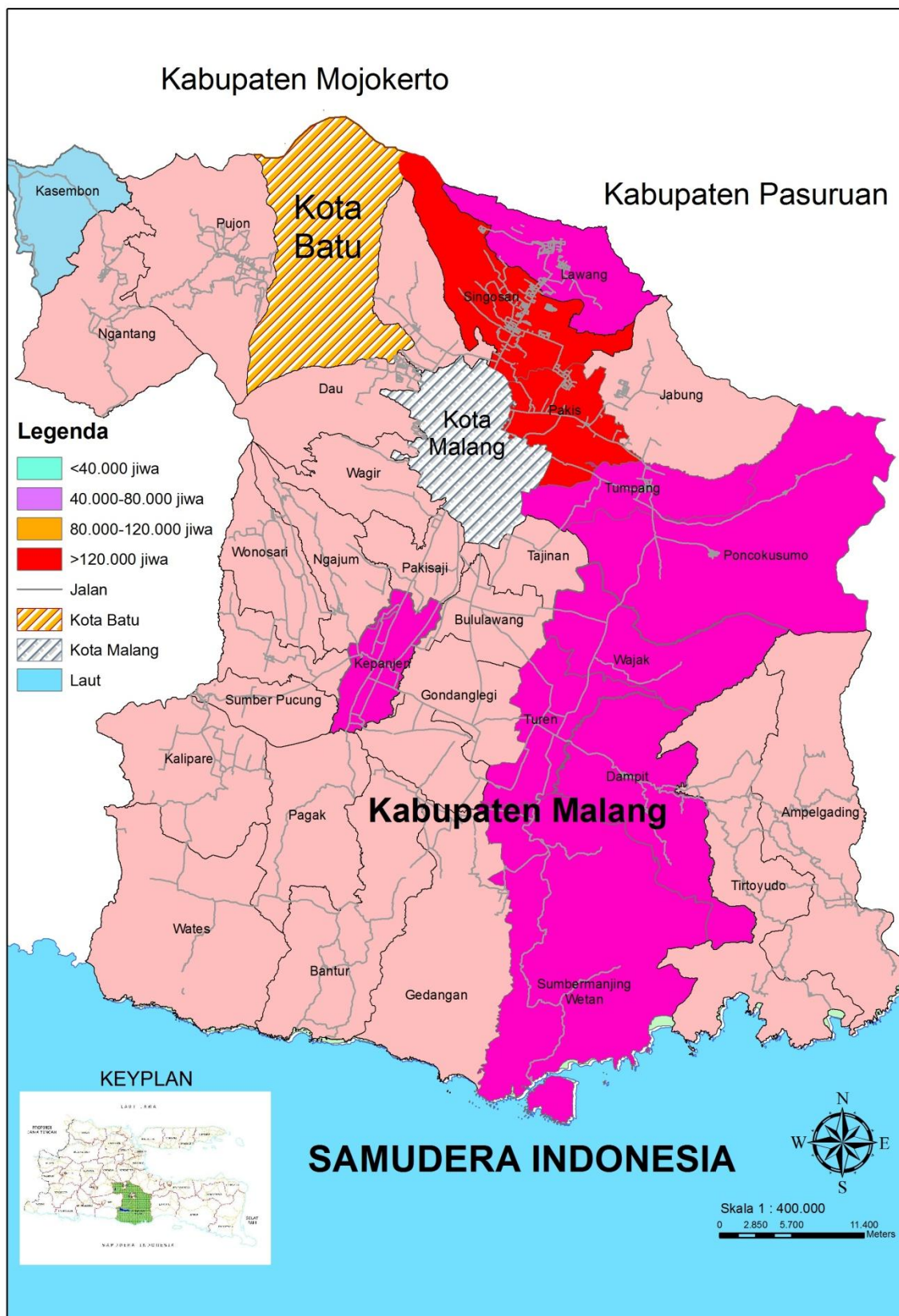
Tabel 4. 51
Kepadatan Penduduk Kabupaten Malang

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Donomulyo	73.354	206,10	356
Kalipare	67.399	118,94	567
Pagak	51.259	103,58	495
Bantur	72.039	172,70	417
Gedangan	56.084	144,10	389
Sumbermanjing	97.439	253,04	385
Dampit	117.426	148,86	789
Tirtoyudo	63.387	155,51	408
Ampelgading	57.871	93,1	622
Poncokusumo	93.652	116,54	804
Wajak	84.156	108,06	779
Turen	112.823	64,15	1.759
Bululawang	62.232	49,71	1.252
Gondanglegi	78.859	93,24	846
Pagelaran	66.863	46,08	1.451
Kepanjen	93.756	46,5	2.016
Sumberpucung	55.053	36,3	1.517
Kromengan	39.411	38,88	1.014
Ngajum	50.639	73,82	686
Wonosari	44.242	62,03	713
Wagir	77.465	75,68	1.024
Pakisaji	75.609	38,66	1.956
Tajinan	50.787	40,36	1.258
Tumpang	75.335	72,34	1.041
Pakis	124.074	53,87	2.303
Jabung	71.045	149,44	475
Lawang	91.732	68,63	1.337
Singosari	154.763	118,91	1.302
Karangploso	55.398	72,24	767
Dau	57.924	42,21	1.372
Pujon	62.333	144,30	432
Ngantang	59.125	161,22	367
Kasembon	31.777	69,17	459
Jumlah	2.425.311	3.238,27	749

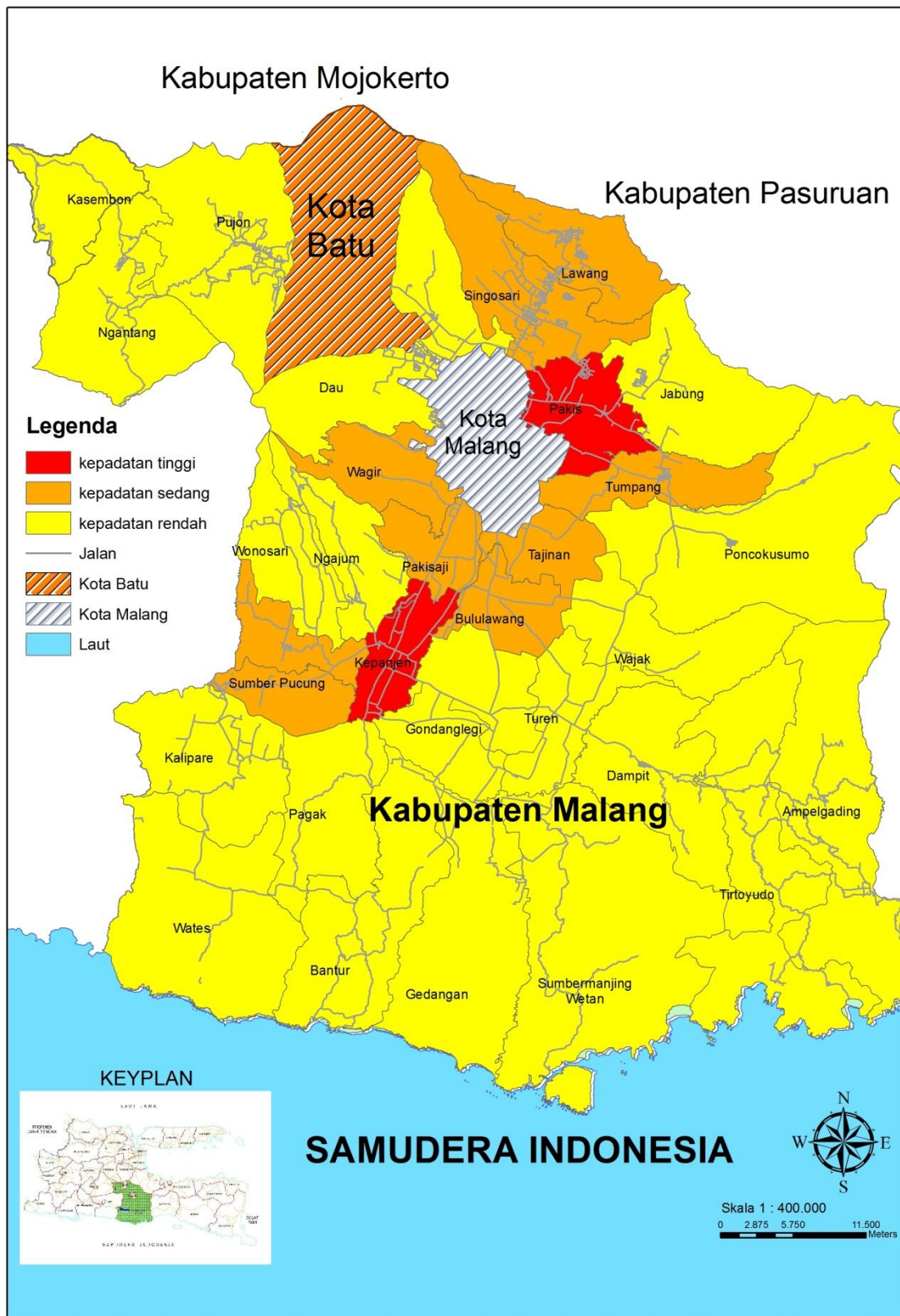
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Keterangan : = Kecamatan Dengan Tingkat Kepadatan Tertinggi

Sebagian besar kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Malang memiliki tingkat kepadatan rendah yaitu tingkat kepadatan < 1000 jiwa/km². Sebanyak 12 kecamatan pada Kabupaten Malang memiliki tingkat kepadatan sedang yaitu dengan tingkat kepadatan antara 1000-2000 jiwa/km².



Gambar 4. 41Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Malang



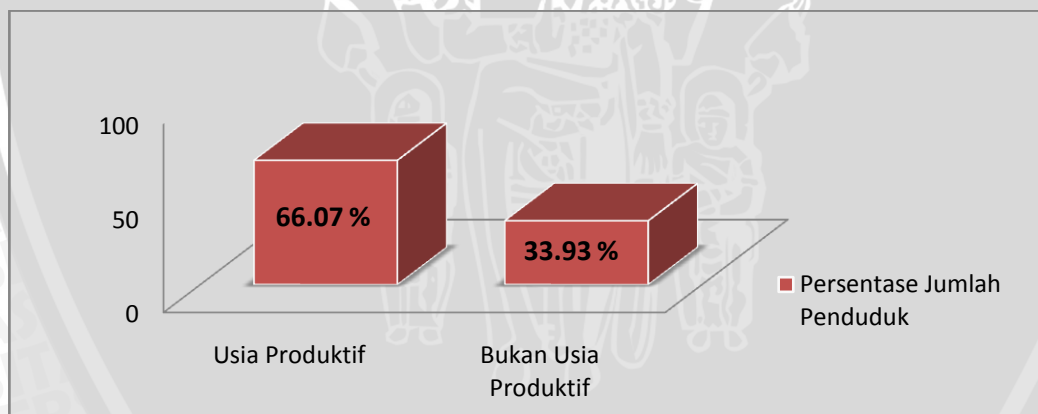
Gambar 4. 42Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Malang

Berdasarkan komposisi umurnya, struktur umur penduduk Kabupaten Malang berusia produktif (15-64 tahun) yaitu sebanyak 1.602.504 jiwa. Jumlah penduduk bukan usia produktif Kabupaten Malang sebanyak 822.807 jiwa dengan komposisi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 633.461 jiwa dan penduduk usia 65+ sebanyak 189.346 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.52 dan gambar 4.43.

Tabel 4. 52
Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
0-4	91790	96393	188183
5-9	110051	104728	214779
10-14	127825	102674	230499
15-19	85338	84797	170135
20-24	85338	75979	161317
25-29	92521	83831	176353
30-34	84608	85522	170129
35-39	91790	96876	188667
40-44	86799	91078	177877
45-49	87529	97963	185493
50-54	81321	77187	158508
55-59	53808	59672	113480
60-64	52712	47834	100547
65+	85947	103399	189346
TOTAL KESELURUHAN	1217377	1207934	2425311

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang



Gambar 4. 43 Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Struktur umur penduduk Kabupaten Malang sebagian besar berusia produktif (15-64 tahun) yaitu sebanyak 66,07% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Malang. Banyaknya jumlah usia produktif Kabupaten Malang menunjukkan bahwa sumber daya manusia Kabupaten Malang berpotensi dalam kegiatan pembangunan daerah.

B. Tenaga Kerja


Jumlah tenaga kerja Kabupaten Malang berusia 10 tahun ke atas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, jumlah tenaga kerja berusia 10 tahun ke atas

pada Kabupaten Malang sebanyak 1.407.686 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.53.

Tabel 4. 53
Jumlah Tenaga Kerja 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Lapangan Usaha

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase Dari Keseluruhan Tenaga Kerja (%)
Pertanian	511.966	36.37
Pertambangan/Galian	4.833	0.34
Industri Pengolahan	204.677	14.54
TNI/ABRI	14.184	1.01
Polisi RI	4.082	0.29
Pegawai Negeri Sipil	18.120	1.29
Listrik dan Air Bersih	1.455	0.10
Konstruksi	85.962	6.11
Perdagangan	300.637	21.36
Transportasi dan Komunikasi	59.326	4.21
Jasa	94.162	6.69
Lain-lain	108.282	7.69
TOTAL KESELURUHAN	1.407.686	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Keterangan :  = Jenis Lapangan Usaha Dengan

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten Malang bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 511.966 jiwa. Sektor perdagangan merupakan jenis lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbesar kedua pada Kabupaten Malang. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini sebanyak 300.637 jiwa. Hal ini memperlihatkan, sektor pertanian dan perdagangan paling diminati penduduk Kabupaten Malang sebagai lapangan pekerjaan.

4.2.3 Karakteristik Fisik Binaan Kabupaten Malang

Adapun karakteristik fisik binaan Kabupaten Malang akan memaparkan fasilitas pelayanan yang terdapat pada Kabupaten Malang.

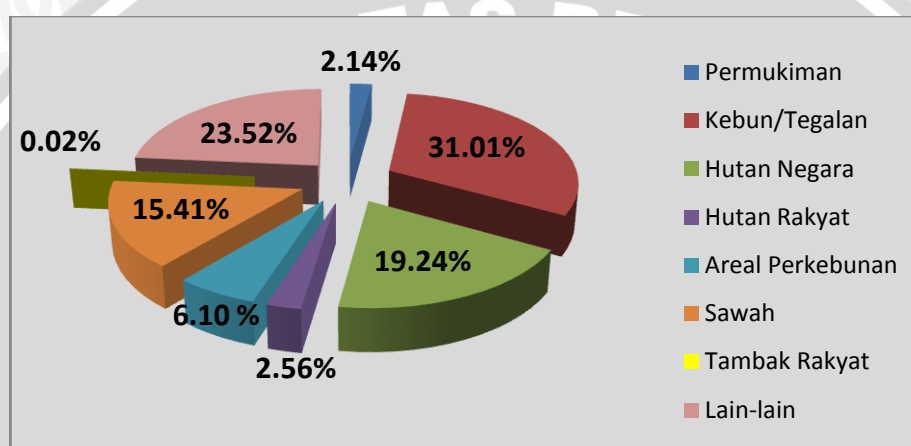
A. Pola Penggunaan Lahan

Lahan Kabupaten Malang yang dimanfaatkan penduduk adalah wilayah daratan Kabupaten Malang untuk menunjang aktivitas penduduknya. Lahan yang dimanfaatkan penduduk Kabupaten Malang sebagai sawah adalah seluas 49.905 Ha atau 15,41% dari keseluruhan luas wilayah daratan Kabupaten Malang. Untuk luas wilayah permukiman pada Kabupaten Malang adalah seluas 6927 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.54 dan gambar 4.44.

Tabel 4. 54
Luas Wilayah Daratan Kabupaten Malang

Jenis Lahan	Jumlah Luas Lahan (Ha)	Persentase Dari Keseluruhan Luas Lahan Kab. Malang (%)
Permukiman	6927	2.14
Kebun/Tegalan	100424	31.01
Hutan Negara	62310	19.24
Hutan Rakyat	8289	2.56
Areal Perkebunan	19748	6.10
Sawah	49905	15.41
Tambak Rakyat	49	0.02
Lain-lain	76175.23	23.52
TOTAL KESELURUHAN	323827,23	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang



Gambar 4. 44 Perbandingan Luas Wilayah Daratan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, penggunaan lahan wilayah daratan Kabupaten Malang didominasi sebagai kebun/tegalan yaitu seluas 100.424 Ha atau seluas 31.01% dari luas keseluruhan luas wilayah daratan Kabupaten Malang. Luas lahan terbesar kedua dimanfaatkan oleh hutan negara seluas 62.310 Ha. Luas hutan yang besar mengakibatkan Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dengan potensi hutan.

B. Sarana Permukiman

Kualitas permukiman Kabupaten Malang diukur dari kelengkapan sarana penunjangnya yang terdiri dari sarana penerangan dan air bersih. Berdasarkan data yang diperoleh, kelompok rumah tangga merupakan jumlah pelanggan listrik tertinggi di Kabupaten Malang. Pada tahun 2009, sebanyak 698.863 rumah tangga atau 99,81% dari keseluruhan rumah tangga yang terdapat pada Kabupaten Malang telah menggunakan sumber penerangan listrik PLN. Rumah yang belum teraliri listrik tersebar di 14 dusun yang terdapat pada Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan sulitnya akses dalam pemasangan listrik.

C. Sarana Pendidikan

Pada tahun 2009 jumlah peserta didik Kabupaten Malang adalah sebanyak 408.205 jiwa dengan komposisi 245.415 jiwa siswa sekolah negeri dan 162.790 jiwa siswa sekolah swasta. Jumlah peserta didik tingkat SD Kabupaten Malang terdapat sebanyak 254.217 jiwa. Untuk peserta didik tingkat pertama (SLTP) sebanyak 104.727 jiwa siswa.

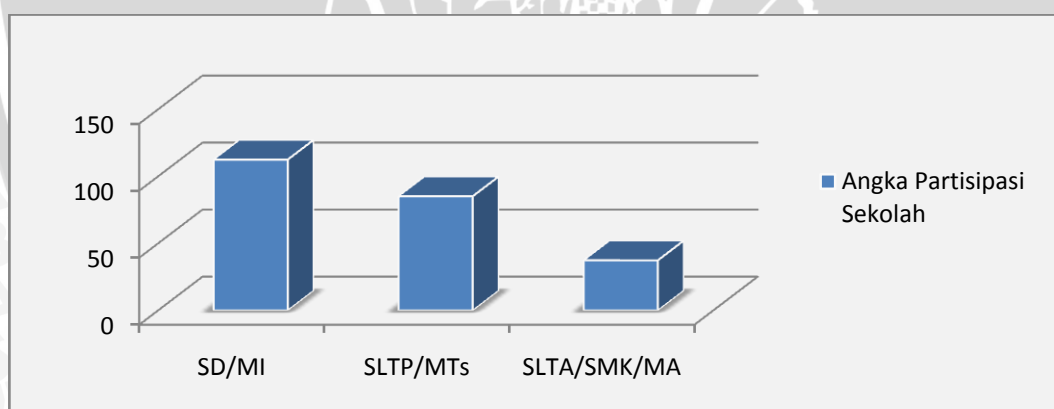
Berdasarkan hasil perhitungan, angka partisipasi penduduk pada pendidikan Kabupaten Malang adalah sebesar 84,84 %. Untuk usia sekolah dasar (7-12 tahun) partisipasi penduduk sebesar 112,45 % yaitu pada setiap 100 penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) terdapat 113 jiwa penduduk yang sedang bersekolah pada tingkat sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.55 dan gambar 4.45.

Tabel 4. 55
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Malang

Usia Sekolah (tahun)	Jumlah (Jiwa)	Jumlah Peserta Didik (Jiwa)			Angka Partisipasi Sekolah (%)
		SD	SLTP/MTs	SLTA/SMK/MA	
7-12	226.070	254.217	-	-	112,45
13-15	123.016	-	104.727	-	85,13
16-18	132.053	-	-	49.261	37,30
Jumlah (Jiwa)	481.139	254.217	104.727	49.261	84,84

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang dan Hasil Perhitungan

Keterangan : = Kelompok Usia Sekolah Dengan Partisipasi Tertinggi



Gambar 4. 45 Grafik Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Malang

Berdasarkan grafik, angka partisipasi sekolah tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan dasar (SD). Hal ini menunjukkan tingginya partisipasi penduduk untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya. Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Malang berbanding terbalik yaitu semakin tinggi jenjang pendidikan yang terdapat pada Kabupaten Malang maka angka partisipasi sekolah semakin kecil. Menurunnya angka partisipasi sekolah ini dikarenakan semakin kecilnya penduduk Kabupaten Malang yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada tahun 2009, jumlah sarana pendidikan yang terdapat pada Kabupaten Malang adalah 2.120 unit sekolah. Untuk jenjang pendidikan dasar (SD) terdapat 1.467 unit sarana pendidikan, dengan komposisi masing-masing jumlah sekolah negeri sebanyak 1.115 unit dan jumlah sekolah swasta sebanyak 352 unit. Sarana pendidikan menengah pertama (SLTP) terdapat sebanyak 457 unit dan sarana pendidikan menengah ke atas (SLTA) sebanyak 196 unit.

D. Sarana Kesehatan

Indikator pendukung pembangunan kesehatan pada satu daerah adalah ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai baik dari jumlah tenaga kesehatan maupun dari jumlah sarana kesehatannya. Pada tahun 2009, jumlah tenaga kesehatan yang terdapat pada Kabupaten Malang adalah jiwa. Jumlah dokter Kabupaten Malang adalah 417 jiwa dengan proporsi 42,93% dokter spesialis dan 41,97% merupakan dokter umum. Sedangkan jumlah dokter gigi terdapat sebanyak 63 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.56

Tabel 4. 56
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Malang

Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan (Jiwa)	Persentase Dari Keseluruhan Tenaga Kesehatan (%)
Dokter Spesialis	179	7,21
Dokter Umum	175	7,05
Dokter Gigi	63	2,54
Perawat	1748	70,37
Tenaga Farmasi	123	4,95
T. Kesehatan Masyarakat	37	1,49
Tenaga Gizi	70	2,82
Teknisi Medis	45	1,81
Tenaga Sanitasi	44	1,77
TOTAL KESELURUHAN	2484	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Keterangan : = Tenaga Kesehatan Yang Paling Banyak

Berdasarkan hasil perbandingan, jumlah tenaga kesehatan Kabupaten Malang yang paling dominan adalah perawat yaitu 1748 jiwa atau 70,37 % dari jumlah keseluruhan tenaga kesehatan pada Kabupaten Malang. Jumlah tenaga kesehatan terbesar kedua adalah dokter spesialis sebanyak 175 orang atau 7,21% dari keseluruhan tenaga kesehatan Kabupaten Malang.

Untuk mendukung kegiatan pembangunan kesehatan pada Kabupaten Malang, telah disediakan 2988 unit sarana kesehatan yang menyebar di seluruh kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Malang. Pada tahun 2009 terdapat 15 unit rumah sakit dengan komposisi 3 unit rumah sakit pemerintah dan 12 unit rumah sakit swasta. Di samping

itu pada Kabupaten Malang telah terdapat 13 unit rumah sakit bersalin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.57.

Tabel 4. 57
Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Malang

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan (buah)	Persentase Dari Keseluruhan Sarana Kesehatan (%)
Rumah Sakit Umum	3	0,10
Rumah Sakit Swasta	12	0,40
Rumah Sakit Bersalin	13	0,44
Puskesmas	39	1,31
Puskesmas Pembantu	93	3,11
Puskesmas Keliling	55	1,84
Posyandu	2750	92,03
Poliklinik	23	0,77
TOTAL KESELURUHAN	2988	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Keterangan : = Jenis Sarana Kesehatan Tertinggi

Berdasarkan hasil perbandingan, sarana kesehatan yang paling dominan pada Kabupaten Malang adalah sarana kesehatan berskala lingkungan yaitu posyandu. Jumlah posyandu pada wilayah ini sebanyak Hal ini memperlihatkan upaya pemerintah Kabupaten Malang untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sampai pada lingkup wilayah terkecilnya.

E. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan Kabupaten Malang terdapat sebanyak 12.830 unit. Sebagian besar jenis sarana perdagangan Kabupaten Malang didominasi oleh kios yaitu sebanyak 10.234 unit atau 79,77% dari keseluruhan sarana perdagangan Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.58.

Tabel 4. 58
Jumlah Sarana Perdagangan Kabupaten Malang

Jenis Sarana Perdagangan	Jumlah (unit)	Persentase Dari Keseluruhan (%)
Pasar	32	0,25
Pertokoan	2564	19,98
Kios	10.234	79,77
TOTAL KESELURUHAN	12.830	100

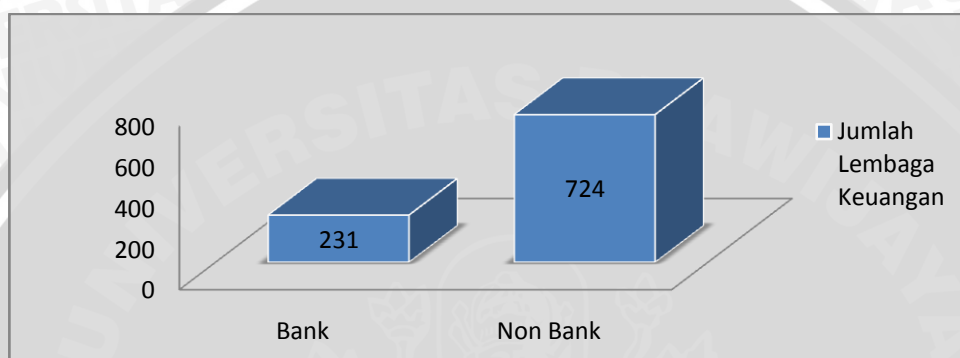
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Pada tahun 2009, lembaga keuangan Kabupaten Malang baik bank maupun non bank terdapat sebanyak 955 unit. Jumlah lembaga keuangan berupa bank pada Kabupaten Malang terdapat sebanyak 231 unit, dengan komposisi 151 unit bank konvensional, 155 unit bank syariah, 17 unit bank pemerintah, 7 unit bank pemerintah daerah dan 52 unit bank swasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.59.

Tabel 4. 59
Jumlah Lembaga Keuangan Kabupaten Malang

NO.	Jenis Lembaga Keuangan	Jumlah (unit)	Persentase Dari Keseluruhan (%)
1.	Bank	231	24,19
	Bank Konvensional	151	15,81
	Bank Syariah	155	16,23
	Bank Pemerintah	17	1,78
	Bank Pemerintah Daerah	7	0,73
	Bank Swasta	52	5,45
2.	Non Bank	724	75,81
	Koperasi	724	75,81
TOTAL KESELURUHAN		955	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang



Gambar 4. 46 Grafik Lembaga Keuangan Kabupaten Malang

Lembaga keuangan Kabupaten Malang yang paling dominan adalah lembaga keuangan non bank yaitu 724 unit atau 75,81% dari keseluruhan lembaga keuangan Kabupaten Malang. Keseluruhan jumlah lembaga keuangan non bank Kabupaten Malang merupakan koperasi baik berupa KUD maupun Non KUD.

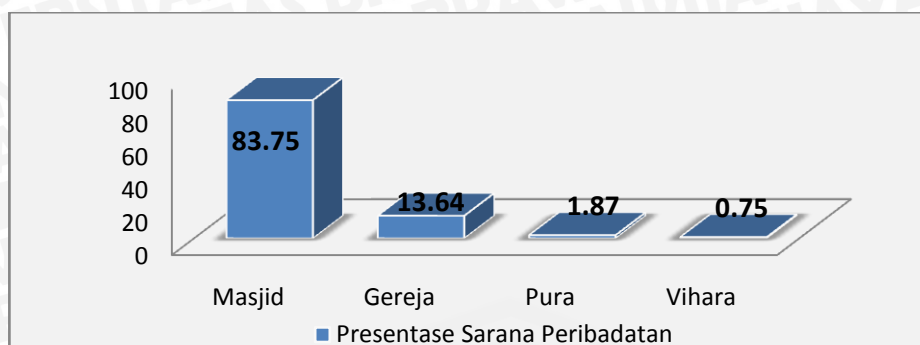
F. Fasilitas Peribadatan

Keberadaan fasilitas peribadatan tersebar pada seluruh wilayah Kabupaten Malang. Pada tahun 2009, sarana peribadatan Kabupaten Malang terdapat sebanyak unit. Jumlah gereja pada Kabupaten Malang terdapat sebanyak 329 unit dengan komposisi 271 unit gereja umat kristiani dan 58 unit gereja umat katolik. Sedangkan jumlah sarana peribadatan berupa vihara dan pura pada Kabupaten Malang masing-masing berjumlah 45 unit dan 18 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.60 dan gambar 4.47.

Tabel 4. 60
Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Malang

Sarana Peribadatan	Jumlah (unit)	Persentase Dari Keseluruhan (%)
Masjid	2020	83,75
Gereja	329	13,64
Pura	45	1,87
Vihara	18	0,75
TOTAL KESELURUHAN	2412	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang



Gambar 4. 47 Grafik Perbandingan Sarana Peribadatan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, keberadaan sarana peribadatan berupa masjid paling dominan pada Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kabupaten Malang menganut agama Islam.

G. Fasilitas Perhubungan

Infrastruktur jalan merupakan sarana terpenting untuk mendukung aksesibilitas suatu wilayah. Infrastruktur jalan pada Kabupaten Malang terbagi menjadi jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten. Keseluruhan panjang jalan Kabupaten Malang adalah 1.903,19 Km yang terdiri dari 115,63 Km jalan Negara, 118,80 Km jalan propinsi dan 1,668,76 Km jalan kabupaten. Sebagian besar infrastruktur jalan pada Kabupaten Malang sudah berupa jalan aspal yaitu sepanjang 1.781,08 Km atau 93,58% dari keseluruhan panjang jalan Kabupaten Malang.

Tabel 4. 61
Panjang Jalan Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan

Jenis Permukaan	Kategori Jalan (Km)			Jumlah (Km)	Persentase dari Keseluruhan Jalan Kab.Malang (%)
	Negara	Propinsi	Kabupaten		
Aspal	115,65	118,80	1.546,65	1.781,08	93,58
Kerikil	-	-	119,71	119,71	6,29
Tanah	-	-	2,40	2,40	0,13
TOTAL	115,65	118,80	1.668,76	1.903,19	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Pada tahun 2009, jumlah kendaraan sebagai pengguna jalan Kabupaten Malang adalah sebanyak 406.506 unit, yang terdiri dari 10.363 unit mobil dan 396.143 unit sepeda motor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.62.

Tabel 4. 62
Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Malang Berdasarkan Kepemilikan

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan (unit)	Jumlah Kepemilikan (RT)	Persentase Dari Keseluruhan Kendaraan Kab.Malang (%)
Sedan	4.725	4.489	1,16
Jeep	3.566	3.388	0,88
Kijang/Station Wagon	2072	1.968	0,51
Sepeda Motor	396.143	376.336	97,45
TOTAL	406.506	306.181	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Keterangan : = Jenis Kendaraan Bermotor Terbanyak

Pengguna jalan Kabupaten Malang sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi khususnya dengan berkendara sepeda motor yaitu sebanyak 91,20 % dari keseluruhan kendaraan yang terdapat pada Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan mobilitas penduduk Kabupaten Malang sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi dalam setiap aktivitasnya dibandingkan menggunakan kendaraan umum.

H. Fasilitas Umum

Fasilitas umum Kabupaten Malang terdiri dari sarana olahraga dan balai pertemuan umum. Berdasarkan data yang diperoleh, sarana olahraga Kabupaten Malang terdapat sebanyak 350 unit yang tersebar pada seluruh kecamatan Kabupaten Malang. Sedangkan balai pertemuan umum Kabupaten Malang terdapat 5 unit balai pertemuan.

4.2.4 Karakteristik Sosial Politik Kabupaten Malang

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk kabupaten induk Kota Batu yang memiliki hak pilih dalam kegiatan pemilu legislative adalah 1.721.797 jiwa dengan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislative Kabupaten Malang adalah 1.448.729 jiwa atau 84,14% dari keseluruhan penduduk yang memiliki hak pilih. Hal ini memperlihatkan sebanyak 84,14% penduduk Kabupaten Malang berpartisipasi untuk memberikan suaranya dalam pemilihan anggota pemerintahan Kabupaten Malang. Organisasi masyarakat yang terdapat pada Kabupaten Malang adalah 375 unit organisasi masyarakat.

4.2.5 Karakteristik Perekonomian Kabupaten Malang

Karakteristik perekonomian Kabupaten Malang terdiri dari kemampuan keuangan dan kemampuan ekonomi. Adapun penjabaran karakteristik perekonomian Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

A. Kemampuan Keuangan Kabupaten Malang

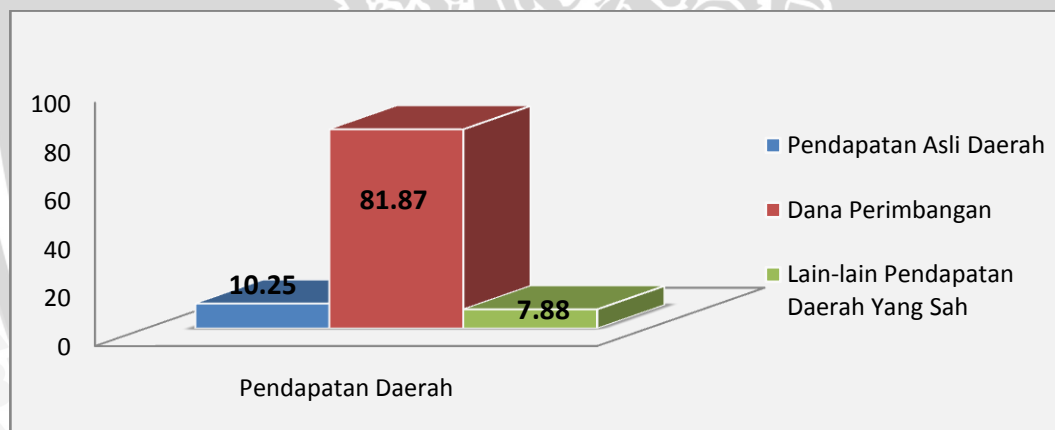
Kemampuan keuangan Kabupaten Malang diukur dari penerimaan-penerimaan yang diterima pemerintah Kabupaten Malang untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Bentuk penerimaan ini berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2009 pendapatan daerah Kabupaten Malang mencapai juta rupiah. Adapun penjabaran bentuk pendapatan daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.63 dan gambar 4.48.

Tabel 4. 63
Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009

Jenis Penerimaan Daerah	Jumlah (000 Rp)	Persentase Dari Keseluruhan Penerimaan Daerah (%)
Pendapatan Asli Daerah	145.379.148,79	10,25
- Pajak daerah	33.782.874,89	2,38
- Retribusi daerah	24.512.496,39	1,73
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.920.768,49	0,35
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	82.163.009,02	5,79
Dana Perimbangan	1.161.789.799,27	81,87
- Bagi hasil pajak	79.745.494,83	5,62
- Bagi hasil SDA	28.962.614,44	2,04
- Dana alokasi umum (DAU)	959.098.690,00	67,59
- Dana alokasi khusus (DAK)	93.983.000,00	6,62
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	111.851.641,25	7,88
- Dana Bagi hasil pajak dari pemerintah daerah	79.883.170,25	5,63
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	2.127.834,00	0,15
- Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	29.840.637,00	2,10
TOTAL KESELURUHAN	1.419.020.589,31	100

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang



Gambar 4. 48 Grafik Perbandingan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan grafik perbandingan, pendapatan daerah tertinggi Kabupaten Malang berasal dari dana perimbangan yaitu sebanyak 1.161.789,80 juta rupiah atau sebesar 81,87 % dari keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Malang dengan dana perimbangan terbesar Kabupaten Malang berasal dari dana alokasi umum (DAU) yaitu sebesar 67,59%. Pendapatan asli daerah Kabupaten Malang memberikan kontribusi sebesar 10,25% bagi pendapatan daerah Kabupaten Malang. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah memberikan kontribusi sebesar 7,88 % bagi pendapatan daerah Kabupaten Malang.

B. Kemampuan Ekonomi Kabupaten Malang

Kemampuan ekonomi Kabupaten Malang diukur dari nilai produksi barang dan jasa semua sektor ekonomi non migas yang terdapat pada Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2009, PDRB Kabupaten Malang berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga konstan masing-masing sebesar Rp. 27.754.805,09 juta dan Rp. 13.718.632,94 juta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.64.

Tabel 4. 64
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Tahun 2009

Sektor Basis	PDRB (juta Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Pertanian	7.979.506,96	4.171.370,51
Pertambangan dan Penggalian	627.345,59	374.201,66
Industri Pengolahan	5.620.750,62	2.533.650,03
Listrik dan Air Bersih	495.120,67	210.146,23
Bangunan	529.867,51	237.110,82
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	6.601.750,13	3.295.920,93
Pengangkutan dan Komunikasi	1.364.881,52	596.500,13
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.037.949,17	529.263,10
Jasa-jasa	3.497.632,92	1.770.469,53
Jumlah PDRB	27.754.805,09	13.718.632,94

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang

Keterangan : Sektor dengan PDRB Terbesar

Ditinjau dari pendekatan produksinya, sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian Kabupaten Malang berasal dari sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Berdasarkan harga berlaku, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restaurant adalah sebesar Rp6.601.750,13 juta untuk PDRB Kabupaten Malang. Sedangkan kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Malang adalah sebesar Rp. 7.979.506,96 juta. Hal ini memperlihatkan potensi Kabupaten Malang sebagai daerah agropolitan.

4.2.6 Karakteristik Tingkat Kesejahteraan Kabupaten Malang

Kemampuan tingkat kesejahteraan manusia yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Malang dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia (IPM) yang telah dicapai. Berdasarkan data yang diperoleh, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Malang pada tahun 2009 mencapai 69,89 % dengan proporsi 72,56 % indeks harapan hidup, 74,40 % indeks pengetahuan dan 62,72% untuk indeks pendapatan. Nilai

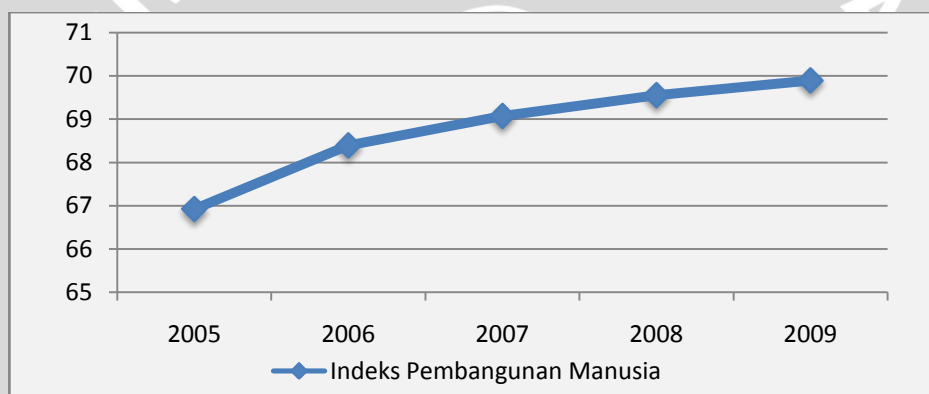
IPM yang telah dicapai Kabupaten Malang menunjukkan status pembangunan manusia Kabupaten Malang termasuk dalam kategori menengah ke atas.

Selama kurun lima tahun pembangunan manusia Kabupaten Malang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2005, indeks pembangunan manusia Kabupaten Malang sebesar 66,92% dan pada tahun 2007 meningkat sehingga mencapai 69,07%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.65 dan gambar 4.49.

Tabel 4. 65
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang

Tahun	Indeks Harapan Hidup	Indeks Pengetahuan	Indeks Pendapatan	Indeks Pembangunan Manusia
2005	70,28	71,12	59,35	66,92
2006	71,50	74,03	59,65	68,39
2007	72,03	74,25	60,92	69,07
2008	72,38	74,25	62,02	69,55
2009	72,56	74,40	62,72	69,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang



Gambar 4. 49 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang

Berdasarkan grafik perbandingan, indeks pembangunan manusia Kabupaten Malang mengalami perkembangan yaitu dengan peningkatan nilai indeks pembangunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan selama lima tahun terakhir, program pembangunan manusia yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malang telah mampu memajukan kualitas masyarakat Kabupaten Malang.

4.3 Evaluasi Tingkat Kemampuan Kota Batu Sebagai Daerah Otonomi

Evaluasi tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi dilakukan dengan mengukur basis indikator berdasarkan syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan yang tercantum pada PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

4.3.1 Evaluasi Tingkat Kemampuan Kota Batu Sebagai Daerah Otonomi Berdasarkan Syarat Tekhnis

Berdasarkan syarat tekhnis, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi adalah penilaian basis indikator dan penentuan skor basis indikator.

A. Penilaian Basis Indikator

Penilaian Kota Batu sebagai daerah otonomi menggunakan basis indikator yang tercantum dalam PP No.78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Pada tahap ini, nilai masing-masing indikator Kota Batu dibandingkan dengan kabupaten induknya. Data keseluruhan basis indikator berasal dari data karakteristik wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang yang telah dijabarkan sebelumnya. Dan nilai hasil perbandingan yang diperoleh pada masing-masing basis indikator Kota Batu akan dipergunakan sebagai data dasar parameter kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi baru. Adapun penilaian masing-masing basis indikator pada daerah otonomi Batu akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Luas Wilayah

Basis indikator yang tercakup dalam luas wilayah terbagi menjadi luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah efektif. Luas wilayah keseluruhan merupakan luas wilayah daratan dengan luas wilayah lautan.

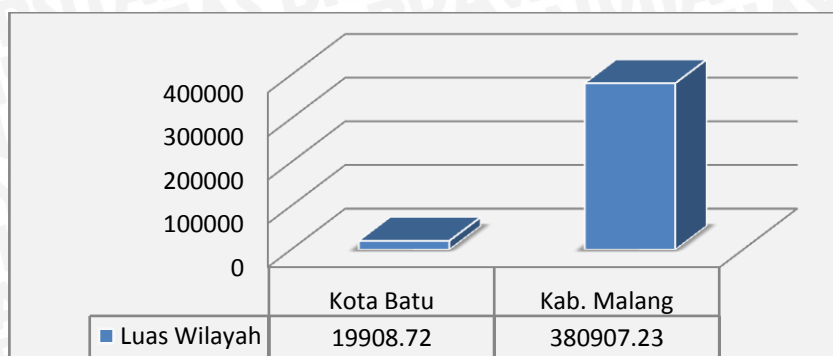
1. Luas Wilayah Keseluruhan

Kota Batu hanya terdiri dari wilayah daratan dan tidak berbatasan dengan laut. Oleh karena itu, wilayah keseluruhan Kota Batu terdiri dari lahan kering dan lahan sawah. Luas wilayah keseluruhan Kota Batu adalah 19.908,72 Ha dengan proporsi untuk lahan kering adalah 17.247,72 Ha dan lahan sawah adalah 2.661. Sedangkan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Malang adalah 380.907,23 Ha dengan wilayah daratan seluas 323.827,25 Ha dan perairan seluas 57.080 Ha.

Berdasarkan hasil perhitungan, luas wilayah keseluruhan Kota Batu adalah 5,23% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.66 dan gambar 4.50.

Tabel 4. 66
Perbandingan Luas Wilayah Keseluruhan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Jenis Lahan	Kota Batu (Ha)	Kab. Malang (Ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah Kab. Malang (%)
Lahan Kering	17.247,22	274.305,25	
Lahan Sawah	2.661	49.522	5,23
Perairan	-	57.080	
Luas Wilayah Keseluruhan (Ha)	19.908,72	380.907,23	5,23



Gambar 4. 50 Grafik Perbandingan Luas Wilayah Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

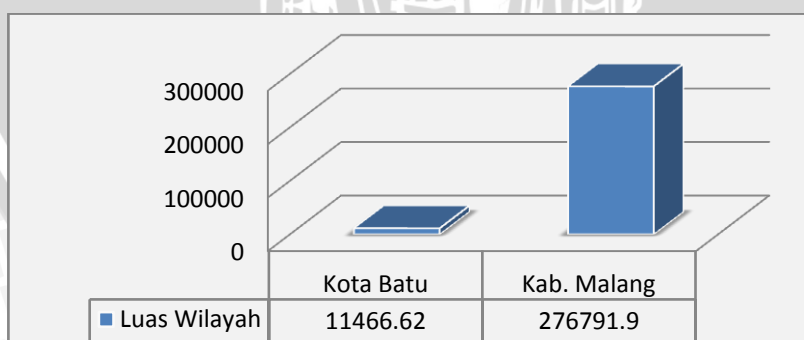
Berdasarkan hasil perbandingan, luas wilayah keseluruhan Kota Batu lebih kecil dibandingkan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan bahwa wilayah administrasi kabupaten induk lebih luas dibandingkan wilayah administrasi Kota Batu.

2. Luas Wilayah Efektif

Luas wilayah efektif Kota Batu yang dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya adalah 11.466,62 Ha. Sedangkan luas wilayah efektif kabupaten induknya yaitu Kabupaten Malang adalah seluas 276.791,90 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.67 dan gambar 4.51.

Tabel 4. 67
Perbandingan Luas Wilayah Efektif Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Jenis Kawasan	Kota Batu (Ha)	Kab. Malang (Ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah Efektif Kab. Malang (%)
Wilayah Efektif (Kawasan Budidaya)	11.466,62	276.791,90	4,14
TOTAL KESELURUHAN	11.466,62	276.791,90	4,14



Gambar 4. 51 Grafik Perbandingan Luas Wilayah Efektif Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, luas wilayah efektif Kota Batu lebih kecil dibandingkan Kabupaten Malang yaitu sebesar 4,14% dari luas wilayah efektif

Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan tingkat pemanfaatan lahan kabupaten induk untuk kawasan budidaya lebih tinggi dibandingkan Kota Batu.

B. Kependudukan

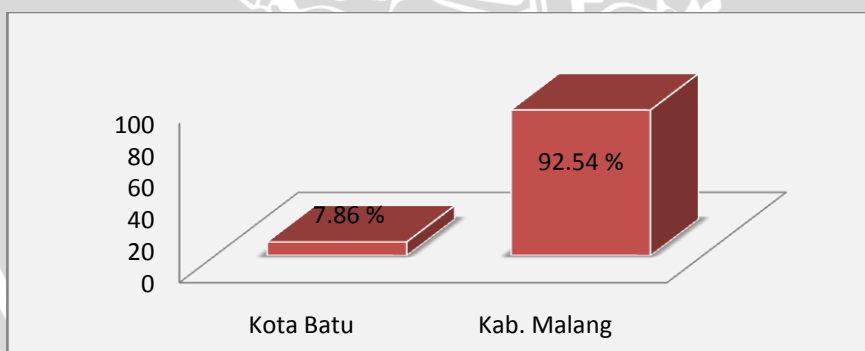
Kependudukan merupakan data mendasar untuk melihat perkembangan suatu wilayah. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan obyek dan subyek pembangunan. Dalam basis indikator PP No.78 Tahun 2007, kependudukan diukur dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Jumlah penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili di Indonesia.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Batu pada tahun 2009 adalah 206.980 jiwa dengan komposisi 206.916 jiwa Warga Negara Indonesia dan 64 jiwa Warga Negara Asing. Sedangkan pada kabupaten induknya, jumlah penduduk Kabupaten Malang terdapat sebanyak 2.425.311 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.68 dan gambar 4.52.

Tabel 4. 68
Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kewarganegaraan	Kota Batu (Jiwa)	Kab. Malang (Jiwa)	Persentase Terhadap Jumlah Penduduk Kab. Malang (%)
WNI	206.916	2.425.311	8,53
WNA	64	-	
TOTAL KESELURUHAN	206.980	2.425.311	8,53



Gambar 4. 52 Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Batu Dengan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah penduduk Kota Batu sebesar 8,53% dari jumlah penduduk Kabupaten Malang. Tingginya jumlah penduduk Kabupaten Malang memperlihatkan persebaran penduduk Kabupaten Malang lebih banyak dibandingkan Kota Batu. Hal ini diakibatkan oleh wilayah administrasi kabupaten induk yang lebih luas dibandingkan wilayah administrasi Kota Batu.



Gambar 4. 53 Peta Perbandingan Persebaran Penduduk Kota Batu dan Kabupaten Malang

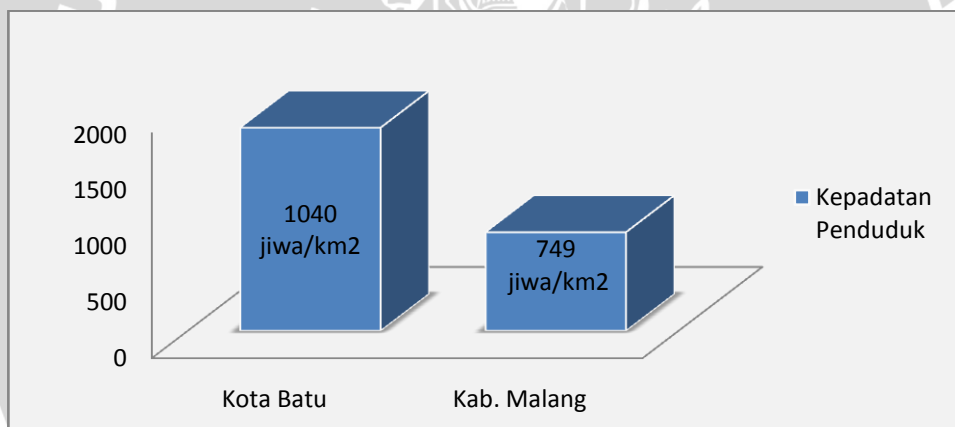
2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk suatu wilayah berkaitan dengan daya dukung wilayah. Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, kepadatan penduduk suatu wilayah diukur dengan menggunakan rasio perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif suatu wilayah.

Berdasarkan rasio perbandingan, kepadatan penduduk Kota Batu pada tahun 2009 adalah 1.805 jiwa/km². Hal ini menggambarkan dalam setiap 1 km² wilayah Kota Batu tersebar 1.850 jiwa penduduk. Sedangkan Kabupaten Malang memiliki tingkat kepadatan sebesar 876 jiwa/km².

Tabel 4. 69
Perbandingan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Terhadap Kepadatan Penduduk Kab. Malang (%)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	206.980	2.425.311	
Luas Wilayah Efektif (Km ²)	114,66	2767,92	206.05
Kepadatan Penduduk (jiwa/ Km²)	1.805	876	206.05



Gambar 4. 54 Grafik Perbandingan Kepadatan Penduduk Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Dari hasil perbandingan, tingkat kepadatan penduduk Kota Batu lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk Kabupaten Malang. Tingkat kepadatan penduduk Kota Batu adalah 206,05% dari kepadatan penduduk Kabupaten Malang. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk kabupaten induknya diakibatkan oleh luas wilayah Kabupaten Malang yang lebih luas dibandingkan Kota Batu sehingga tingkat kepadatan penduduk kabupaten induk kecil.



Gambar 4. 55 Peta Perbandingan Kepadatan Penduduk Kota Batu dan Kabupaten Malang



C. Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi merupakan cerminan dari pencapaian kemampuan daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber dayanya . Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 yang tercakup dalam basis indikator kemampuan ekonomi adalah PDRB non migas perkapita, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kontribusi PDRB non migas. Adapun penjabaran masing-masing tolak ukur yang digunakan pada basis indikator kemampuan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. PDRB Non Migas Perkapita

Ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk melalui pendapatan penduduk suatu wilayah adalah dengan menggunakan PDRB non migas perkapita. PDRB non migas perkapita merupakan perbandingan antara jumlah PDRB non migas atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk suatu wilayah.

Berdasarkan hasil perhitungan, PDRB non migas perkapita Kota Batu pada tahun 2009 adalah Rp 12.830.414,71. PDRB non migas perkapita Kota Batu terbesar berasal dari sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restaurant masing-masing sebesar Rp 2.394.219 dan Rp 6.089.541.

Tabel 4. 70
PDRB Non Migas Per Kapita Kota Batu Tahun 2009

Sektor Basis	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) *juta Rp	Jumlah Penduduk	PDRB Non Migas Perkapita *Rp
Pertanian	496.555,55		2.394.219
Pertambangan dan Penggalian	5.124,86		24.760,17
Industri Pengolahan	193.540,49		935.068,6
Listrik dan Air Bersih	41.347,96		199.767,9
Bangunan	49.774,12	206.980	240.477,9
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	1.260.413,14		6.089.541
Pengangkutan dan Komunikasi	91.307,17		441.140,1
Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	113.000,22		545.947,5
Jasa-jasa	404.575,60		1.954.660
Jumlah PDRB	2.655.639,11	206.980	12.830.414,71

Keterangan : PDRB Non Migas Perkapita Terbesar

Sedangkan PDRB non migas perkapita Kabupaten Malang sebagai kabupaten induk daerah otonomi Batu pada tahun 2009 adalah Rp 11.443.812,81 dengan PDRB non migas perkapita terbesar berasal dari sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.71.

Tabel 4. 71
PDRB Non Migas Per Kapita Kabupaten Malang Tahun 2009

Sektor Basis	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) *juta Rp	Jumlah Penduduk	PDRB Non Migas Perkapita *Rp
Pertanian	7.979.5056,96		3.290.096,39
Pertambangan dan Penggalian	627.345,59		258.666,04
Industri Pengolahan	5.620.750,62		2.317.538,09
Listrik dan Air Bersih	495.120,67		204.147,29
Bangunan	529.867,51		218.474,05
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	6.601.750,13	2.425.311	2.722.022,10
Pengangkutan dan Komunikasi	1.364.881,52		562.765,57
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.037.949,17		427.965,39
Jasa-jasa	3.497.632,92		1.442.137,90
Jumlah PDRB	27.754.805,09	2.425.311	11.443.812,81

Keterangan : PDRB Non Migas Perkapita Terbesar

PDRB non migas perkapita Kota Batu pada tahun 2009 adalah 112,12 % dari nilai PDRB non migas Kabupaten Malang. Adapun perbandingan PDRB non migas perkapita Kota Batu dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.72 dan gambar 4.56.

Tabel 4. 72
Perbandingan PDRB Non Migas Per Kapita Kota Batu Dengan Kabupaten Malang Tahun 2009

Kategori	Kota Batu	Kabupaten Malang	Presentase Terhadap PDRB Non Migas Kabupaten Malang (%)
PDRB Non Migas *juta	12.830.414	27.754.805,09	112,12
Jumlah Penduduk	206.980	2.425.311	
PDRB Non Migas Perkapita (Rp)	12.830.414	11.443.812,81	112,12



Gambar 4. 56 Grafik Perbandingan PDRB Non Migas Per Kapita Kota Batu Dengan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, PDRB non migas perkapita Kota Batu lebih besar dibandingkan PDRB Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan rata-rata tingkat

pendapatan penduduk Kota Batu dari sektor non migas lebih baik dibandingkan rata-rata tingkat pendapatan kabupaten induknya.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah dari suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan membandingkan nilai PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun tertentu dengan nilai PDRB tahun sebelumnya.

Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Batu adalah 6.74%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan berikut.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{PDRB ADHK Tahun 2009} - \text{PDRB ADHK Tahun 2008}}{\text{PDRB ADHK Tahun 2008}} \times 100 \\
 &= \frac{1.240.526,77 - 1.162.186,88}{1.162.186,88} \times 100 \\
 &= \frac{78.339,89}{1.162.186,88} \times 100 \\
 &= 0,0674 \times 100 \\
 &= 6,74
 \end{aligned}$$

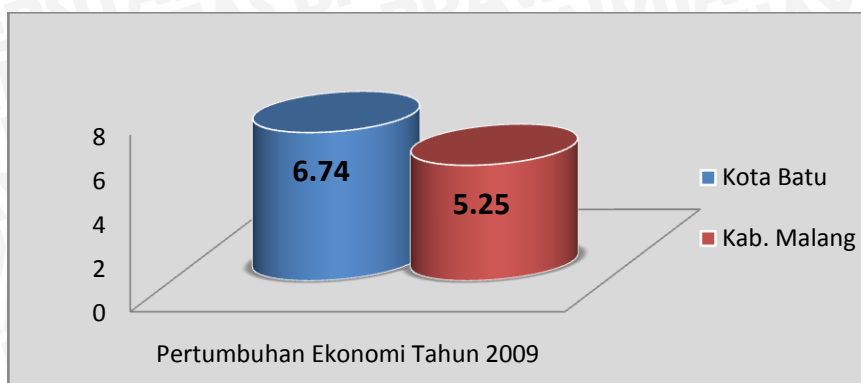
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2009 adalah 5,25%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan berikut.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{PDRB ADHK Tahun 2009} - \text{PDRB ADHK Tahun 2008}}{\text{PDRB ADHK Tahun 2008}} \times 100 \\
 &= \frac{13.718.632,94 - 13.034.488,46}{13.034.488,46} \times 100 \\
 &= \frac{684.144,48}{13.034.488,46} \times 100 \\
 &= 0,05248 \times 100 \\
 &= 5,25
 \end{aligned}$$

Pertumbuhan ekonomi Kota Batu adalah 128,38% dari nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Batu Dengan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.73 dan gambar 4.57.

Tabel 4. 73
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Batu Dengan Kabupaten Malang Tahun 2009

Kota/Kabupaten	Petumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang (%)
Kota Batu	6,74	123,38
Kabupaten Malang	5,25	



Gambar 4. 57 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu Dengan Kabupaten Malang tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, pertumbuhan ekonomi Kota Batu lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan sebagai daerah otonomi baru, secara potensial Kota Batu dapat meningkatkan pertumbuhannya.

3. Kontribusi PDRB Non Migas

Kontribusi PDRB non migas merupakan salah satu bagian dari basis indikator kemampuan ekonomi yang bertujuan untuk mengukur persentase kontribusi PDRB non migas kabupaten/kota terhadap PDRB non migas provinsi.

Pada tahun 2009, kontribusi non migas Kota Batu terhadap PDRB non migas Provinsi Jawa Timur adalah 0,39%. Sektor non migas Kota Batu yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Jawa Timur adalah sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restaurant yaitu masing-masing sebesar 0,65%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.74

Tabel 4. 74

Kontribusi PDRB Non Migas Kota Batu Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur

Sektor Basis	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) *juta		
	Kota Batu	Provinsi Jawa Timur	Kontribusi PDRB
Pertanian	496.555,55	112.233.859,16	0.44
Pertambangan dan Penggalian	5.124,86	15.275.669,63	0.03
Industri Pengolahan	193.540,49	193.256.482,06	0.10
Listrik dan Air Bersih	41.347,96	10.625.414,01	0.39
Bangunan	49.774,12	27.552.354,80	0.18
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	1.260.413,14	195.184.787,50	0.65
Pengangkutan dan Komunikasi	91.307,17	37.785.346,57	0.24
Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	113.000,22	33.145.827,89	0.34
Jasa-jasa	404.575,60	61.787.816,10	0.65
Jumlah PDRB	2.655.639,11	686.847.557,72	0.39

Keterangan : Kontribusi PDRB Non Migas Perkapita Terbesar

Kabupaten Malang memberikan kontribusi adalah 4,04% pada PDRB Provinsi Jawa Timur. Sektor pertanian dan jasa merupakan sektor yang memberikan kontribusi

terbesar pada PDRB non migas Provinsi Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.75.

Tabel 4. 75
Kontribusi PDRB Non Migas Kab. Malang Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur

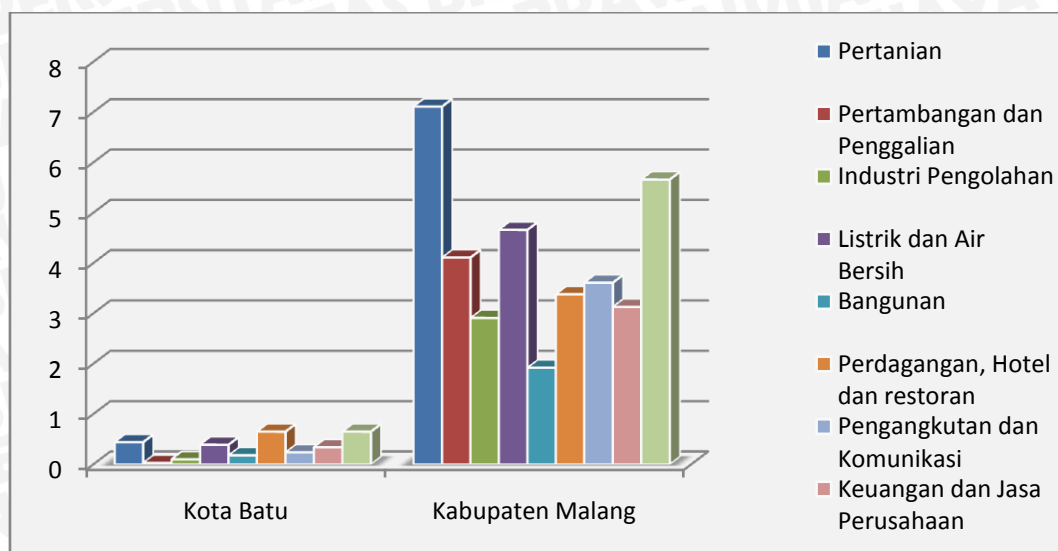
Sektor Basis	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) *juta		
	Kota Batu	Provinsi Jawa Timur	Kontribusi PDRB
Pertanian	7.979.5056,96	112.233.859,16	7.11
Pertambangan dan Penggalian	627.345,59	15.275.669,63	4.11
Industri Pengolahan	5.620.750,62	193.256.482,06	2.91
Listrik dan Air Bersih	495.120,67	10.625.414,01	4.66
Bangunan	529.867,51	27.552.354,80	1.92
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	6.601.750,13	195.184.787,50	3.38
Pengangkutan dan Komunikasi	1.364.881,52	37.785.346,57	3.61
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.037.949,17	33.145.827,89	3.13
Jasa-jasa	3.497.632,92	61.787.816,10	5.66
Jumlah PDRB	27.754.805,09	686.847.557,72	4.04

Keterangan : = Kontribusi PDRB Non Migas Perkapita Terbesar

Kontribusi PDRB non migas Kota Batu terhadap PDRB provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 adalah 9,65% dari nilai kontribusi PDRB non migas kabupaten induknya. Adapun perbandingan nilai kontribusi PDRB non migas daerah otonomi dan kabupaten induknya pada tahun 2009 terhadap PDRB non migas Provinsi Jawa Timur adalah:

Tabel 4. 76
Perbandingan Kontribusi PDRB Non Migas Kota Batu Dan Kabupaten Malang Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Sektor Basis	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Terhadap Kontribusi PDRB Non Migas Kabupaten Malang Pada PDRB Jawa Timur (%)
Pertanian	0.44	7.11	
Pertambangan dan Penggalian	0.03	4.11	
Industri Pengolahan	0.10	2.91	
Listrik dan Air Bersih	0.39	4.66	
Bangunan	0.18	1.92	9,65
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	0.65	3.38	
Pengangkutan dan Komunikasi	0.24	3.61	
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.34	3.13	
Jasa-jasa	0.65	5.66	
Kontribusi PDRB Non Migas	0.39	4.04	9,65



Gambar 4. 58 Grafik Perbandingan Kontribusi PDRB Non Migas Kota Batu Dan Kab.Malang Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, kontribusi PDRB non migas Kota Batu terhadap PDRB non migas Provinsi Jawa Timur lebih kecil dibandingkan kontribusi kabupaten induknya. Hal ini dikarenakan PDRB non migas Kota Batu lebih kecil dibandingkan kabupaten induknya. Oleh karena itu, Kota Batu dapat lebih mengembangkan potensi sumber dayanya agar dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada PDRB non migas Provinsi Jawa Timur.

D. Potensi Daerah

Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana pemanfaatan ketersediaan potensi fisik dan non fisik Kota Batu yang diantaranya adalah sumber daya buatan, sumber daya aparatur, dan sumber daya masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik Kota Batu.

1. Rasio Lembaga Keuangan

Rasio lembaga keuangan merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur indikator potensi daerah. Rasio lembaga keuangan digunakan untuk mengukur kecukupan pelayanan lembaga keuangan baik bank maupun non bank per 10.000 penduduk suatu wilayah. Rasio lembaga keuangan ini membandingkan jumlah keseluruhan lembaga keuangan baik berupa bank maupun non bank dengan jumlah penduduk suatu wilayah.

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio lembaga keuangan Kota Batu pada tahun 2009 adalah 8,34. Rasio ini menggambarkan bahwa pada Kota Batu terdapat 8 unit lembaga keuangan yang melayani kebutuhan setiap 10.000 penduduk Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.77.

Tabel 4. 77
Rasio Lembaga Keuangan Kota Batu Tahun 2009

Jenis Lembaga Keuangan	Jumlah (unit)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Lembaga Keuangan Per 10.000 Penduduk (%)
Bank	31	206.980	1,50
Non Bank	154		7,44
TOTAL KESELURUHAN	185	206.980	8,34

Berdasarkan nilai rasionya, lembaga keuangan baik berupa bank maupun non bank telah mampu melayani kebutuhan jasa setiap 10.000 penduduk Kota Batu. Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga dengan nilai rasio tertinggi yaitu 7,44 yang berarti terdapat 7 unit lembaga keuangan non bank yang melayani kebutuhan setiap 10.000 penduduk Kota Batu.

Sedangkan rasio lembaga keuangan Kabupaten Malang adalah 3,94 yang berarti pada Kabupaten Malang terdapat 4 unit lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang mampu melayani kebutuhan jasa setiap 10.000 penduduk Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.78.

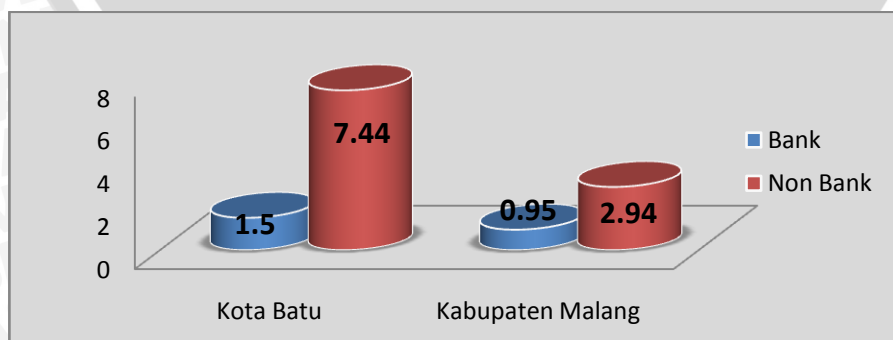
Tabel 4. 78
Rasio Lembaga Keuangan Kabupaten Malang Tahun 2009

Jenis Lembaga Keuangan	Jumlah (unit)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Lembaga Keuangan Per 10.000 Penduduk
Bank	231	2.425.311	0,95
Non Bank	724		2,99
TOTAL KESELURUHAN	955	2.425.311	3,94

Rasio lembaga keuangan Kota Batu adalah 211,68% dari nilai rasio lembaga keuangan yang terdapat pada Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.79 dan gambar 4.60.

Tabel 4. 79
Perbandingan Rasio Lembaga Keuangan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kabupaten/Kota	Rasio Lembaga Keuangan	Persentase Terhadap Rasio Lembaga Keuangan Kab. Malang (%)
Kota Batu	8,34	211,68
Kabu. Malang	3,94	



Gambar 4. 59 Grafik Perbandingan Rasio Lembaga Keuangan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio lembaga keuangan Kota Batu lebih besar dibandingkan nilai rasio Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan ketersediaan sarana perbankan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap 10.000 penduduk Kota Batu lebih baik dibandingkan pada kabupaten induknya.

2. Rasio Fasilitas Perdagangan

Tahap evaluasi tingkat kemampuan daerah otonomi dalam PP No.78 tahun 2007, kecukupan fasilitas sarana perdagangan diukur oleh rasio pertokoan dan rasio pasar per 10.000 penduduk. Rasio ini membandingkan jumlah sarana pertokoan dan sarana pasar dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Pada tahun 2009, rasio sarana pertokoan Kota Batu adalah 113,68 yang berarti terdapat 114 unit sarana perdagangan yang mampu melayani kebutuhan konsumsi setiap 10.000 penduduk Kota Batu. Sedangkan rasio sarana pasar Kota Batu adalah 0,19 yang berarti ketersediaan pasar yang terdapat pada Kota Batu belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan per 10.000 penduduk Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.80.

Tabel 4. 80
Rasio Sarana Pertokoan dan Pasar Kota Batu Tahun 2009

Jenis Sarana Perdagangan	Jumlah (unit)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Sarana Per 10.000 Penduduk
Pertokoan	2.353	206.980	113,68
Pasar	4		0,19

Sedangkan pada kabupaten induknya, rasio pertokoan Kabupaten Malang adalah 10,57 yang berarti terdapat 11 unit pertokoan yang telah mampu memenuhi kebutuhan setiap 10.000 penduduk. Dan rasio pasar Kabupaten Malang adalah 0,13. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.81.

Tabel 4. 81
Jumlah Sarana Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2009

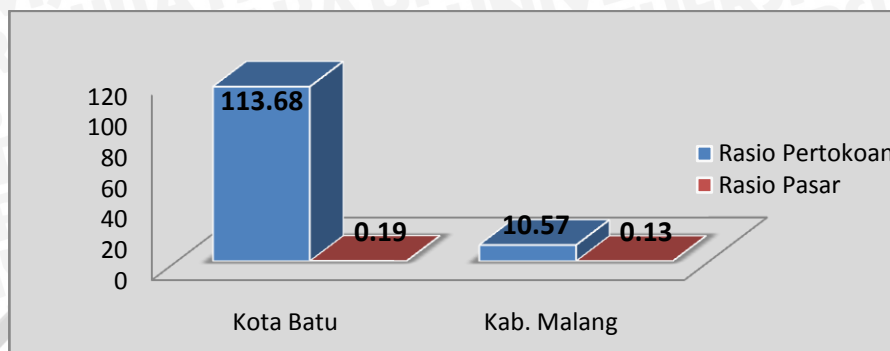
Jenis Sarana Perdagangan	Jumlah (unit)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Sarana Perdagangan Per 10.000 Penduduk
Pasar	32	2.425.311	0,13
Pertokoan	2564		10,57
TOTAL KESELURUHAN	12.830	2.425.311	52,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Adapun perbandingan rasio pertokoan dan rasio pasar per 10.000 penduduk Kota Batu dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.82 dan gambar 4.60.

Tabel 4. 82
Perbandingan Rasio Pertokoan dan Rasio Pasar
Kota Batu Dengan Kabupaten Malang Tahun 2009

Jenis Rasio	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Terhadap Rasio Kab. Malang (%)
Rasio Pertokoan	113,68	10,57	1.075,50
Rasio Pasar	0,19	0,13	146,15



Gambar 4. 60 Perbandingan Rasio Pertokoan Dan Rasio Pasar
Kota Batu Dengan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio pertokoan Kota Batu lebih besar dibandingkan Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan ketersediaan sarana pertokoan dan pasar Kota Batu lebih baik untuk memenuhi kebutuhan 10.000 penduduk dibandingkan pada kabupaten induknya. Namun untuk ketersediaan pasar baik Kota Batu maupun Kabupaten Malang, keberadaan pasar belum mampu untuk melayani kebutuhan setiap 10.000 penduduk.

3. Rasio Sekolah

Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan adalah rasio sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio sekolah merupakan perbandingan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan dengan banyaknya penduduk usia sekolah. Rasio ini memperlihatkan kecukupan ketersediaan sarana pendidikan untuk penduduk usia sekolah suatu wilayah.

Pada tahun 2009, rasio sekolah Kota Batu sebesar 0.004 yaitu setiap empat sekolah Kota Batu mampu memenuhi kebutuhan 1.000 penduduk usia sekolah Kota Batu. Rasio SD/ sederajat Kota Batu sebesar 0,005 dan rasio sekolah pada jenjang SLTP/ sederajat sebesar 0,004. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.83.

Tabel 4. 83
Rasio Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Kota Batu Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah (unit)	Jumlah Penduduk Usia Sekolah (Jiwa)			Rasio Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah
		SD (7-12 tahun)	SLTP (13-15 tahun)	SLTA (16-18 tahun)	
SD	84	18.860	-	-	0,005
SLTP	29	-	7.951	-	0,004
SLTA	20	-	-	8.604	0,002
Jumlah	133	18.860	7.951	8.604	0,004

Pada tahun 2009, rasio sekolah per penduduk usia sekolah Kabupaten Malang adalah 0,004 dengan nilai rasio pada jenjang pendidikan dasar (SD) adalah 0,006, pada jenjang pendidikan menengah pertama dengan rasio 0,004 dan pada jenjang pendidikan menengah atas dengan rasio sebesar 0,001. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.84.

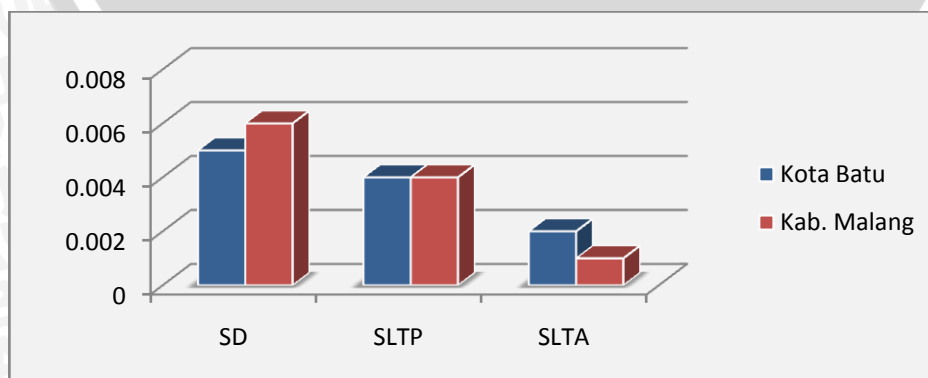
Tabel 4. 84
Rasio Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Malang Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah (unit)	Jumlah Penduduk Usia Sekolah (Jiwa)			Rasio Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah
		SD (7-12 tahun)	SLTP (13-15 tahun)	SLTA (16-18 tahun)	
SD	1.467	226.070	-	-	0,006
SLTP	457	-	123.016	-	0,004
SLTA	196	-	-	132.053	0,001
Jumlah	2.120	226.070	123.016	132.053	0,004

Rasio sekolah Kota Batu adalah 100% dari rasio sekolah Kabupaten Malang. Namun nilai rasio Kota Batu dan Kabupaten Malang berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.85 dan gambar 4.61.

Tabel 4. 85
Perbandingan Rasio Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Kota Batu Dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Jenjang Pendidikan	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Terhadap Rasio Sekolah Kab. Malang (%)
SD	0,005	0,006	83,33
SLTP	0,004	0,004	100
SLTA	0,002	0,001	200
TOTAL	0,004	0,004	100



Gambar 4. 61 Grafik Perbandingan Rasio Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio sekolah untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat rasio Kota Batu adalah 83,33% dari rasio Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan ketersediaan sarana SD untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia SD/ sederajat pada kabupaten induk lebih baik dibandingkan Kota Batu.

Sedangkan untuk tingkat SLTP/ sederajat rasio Kota Batu adalah 100% dari nilai rasio Kabupaten Malang. Dan untuk rasio pada jenjang SLTA/ sederajat, rasio Kota Batu adalah 200% dari nilai rasio Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan ketersediaan sarana pendidikan menengah atas Kota Batu lebih baik dibandingkan kabupaten induknya.

4. Rasio Tenaga Kesehatan

Dalam mengukur kecukupan ketersediaan tenaga kesehatan Kota Batu dilakukan dengan menggunakan rasio tenaga kesehatan per 10.000 penduduk. Rasio tenaga kesehatan merupakan hasil perbandingan antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk suatu wilayah.

Rasio tenaga kesehatan Kota Batu pada tahun 2009 adalah 20,58 yang berarti terdapat 21 tenaga kesehatan untuk melayani 10.000 penduduk Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.86.

Tabel 4. 86
Rasio Tenaga Kesehatan Kota Batu Tahun 2009

Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Tenaga Kesehatan Per 10.000 Penduduk
Dokter	115	206.980	20,58
Perawat	220		
Tenaga Farmasi	29		
T. Kesehatan Masyarakat	6		
Tenaga Gizi	20		
Teknisi Medis	23		
Tenaga Sanitasi	5		
Tenaga Terapi Fisik	8		
TOTAL KESELURUHAN	426	206.980	20,58

Sedangkan rasio tenaga kesehatan Kabupaten Malang pada tahun 2009 adalah sebesar 10,24 yang berarti terdapat 10 tenaga kesehatan untuk melayani 10.000 penduduk Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.87.

Tabel 4. 87
Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2009

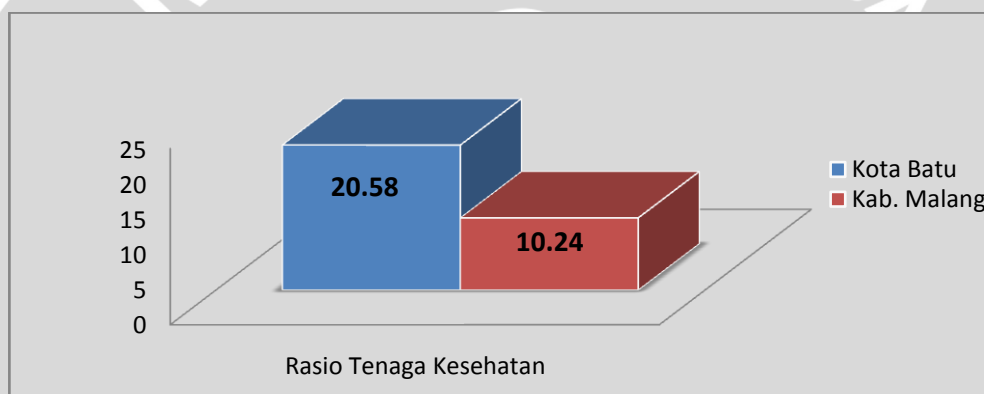
Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Tenaga Kesehatan Per 10.000 Penduduk
Dokter Spesialis	179	2.425.311	10,24
Dokter Umum	175		
Dokter Gigi	63		
Perawat	1748		
Tenaga Farmasi	123		
T. Kesehatan Masyarakat	37		

Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Tenaga Kesehatan Per 10.000 Penduduk
Tenaga Gizi	70		
Teknisi Medis	45		
Tenaga Sanitasi	44		
TOTAL KESELURUHAN	2484	2.425.311	10,24

Rasio tenaga kesehatan Kota Batu adalah 200,98 % dari nilai rasio tenaga kesehatan Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.88 dan gambar 4.62.

Tabel 4. 88
Perbandingan Rasio Tenaga Kesehatan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kategori (Jiwa)	Kota Batu	Kabupaten Malang	Persentase Terhadap Rasio Tenaga Kesehatan Kab. Malang (%)
Jumlah Tenaga Kesehatan	426	206.980	200,98
Jumlah Penduduk	2.824	2.425.311	
Rasio Tenaga Kesehatan	20,58	10,24	200,98



Gambar 4. 62 Grafik Perbandingan Rasio Tenaga Kesehatan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan grafik perbandingan, rasio tenaga kesehatan Kota Batu lebih besar dibandingkan Kabupaten Malang. Besarnya rasio tenaga kesehatan ini memperlihatkan kuantitas tenaga kesehatan Kota Batu lebih baik dalam pemenuhan pelayanan kesehatan 10.000 penduduk dibandingkan pada kabupaten induknya.

5. Rasio Fasilitas Kesehatan

Salah satu ukuran yang digunakan untuk indikator potensi daerah adalah rasio fasilitas kesehatan. Rasio fasilitas kesehatan digunakan untuk mengukur kuantitas fasilitas kesehatan suatu wilayah per 10.000 penduduk.

Pada tahun 2009, rasio fasilitas kesehatan Kota Batu per 10.000 penduduk sebesar 11,50 yaitu terdapat 12 unit sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada 10.000 penduduk Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.89.

Tabel 4. 89
Rasio Fasilitas Kesehatan Kota Batu Tahun 2009

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan (buah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Sarana Kesehatan Per 10.000 Penduduk
Rumah Sakit	5		
Pondok bersalin desa	15		
Balai Pengobatan Murni	8		
Puskesmas	4		
Puskesmas Pembantu	6	206.980	11,50
Puskesmas Keliling	10		
Posyandu	186		
Poskesdes	1		
Rumah Bersalin dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak	3		
TOTAL KESELURUHAN	238	206.980	11,50

Sedangkan rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk pada Kabupaten Malang adalah sebesar 12,32 yang berarti terdapat 12 unit sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada 10.000 penduduk Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.90.

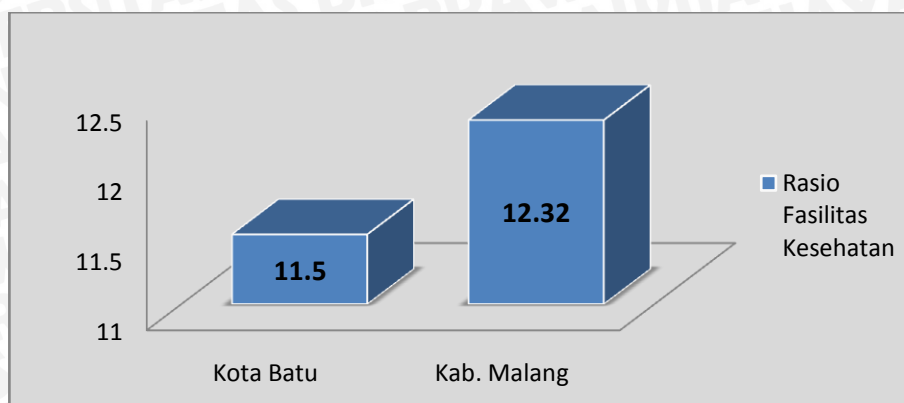
Tabel 4. 90
Rasio Fasilitas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2009

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan (buah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Sarana Kesehatan Per 10.000 Penduduk
Rumah Sakit Umum	3		
Rumah Sakit Swasta	12		
Rumah Sakit Bersalin	13		
Puskesmas	39	2.425.311	12,32
Puskesmas Pembantu	93		
Puskesmas Keliling	55		
Posyandu	2750		
Poliklinik	23		
TOTAL KESELURUHAN	2988	2.245.311	12,32

Rasio fasilitas Kota Batu adalah 93,34% dari nilai rasio kesehatan Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.91 dan gambar 4.63.

Tabel 4. 91
Perbandingan Rasio Fasilitas Kesehatan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kategori	Kota Batu	Kabupaten Malang	Persentase Terhadap Rasio Fasilitas Kesehatan Kab. Malang
Jumlah Fasilitas Kesehatan (unit)	238	2988	93,34
Jumlah Penduduk (jiwa)	206.980	2.425.311	
Rasio Fasilitas Kesehatan	11,50	12,32	93,34



Gambar 4. 63 Grafik Perbandingan Rasio Fasilitas Kesehatan Kota Batu Dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan grafik perbandingan, rasio fasilitas kesehatan Kabupaten Malang lebih besar dibandingkan Kota Batu. Hal ini memperlihatkan sebaran fasilitas kesehatan dalam pemenuhan kesehatan 10.000 penduduk kabupaten induk lebih memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dibandingkan Kota Batu.

6. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Kendaraan Bermotor

Persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor dengan jumlah rumah tangga yang terdapat pada suatu wilayah. Persentase ini digunakan sebagai ukuran untuk memperlihatkan tingkat kepemilikan penduduk terhadap kendaraan bermotor.

Pada tahun 2009, persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor pada Kota Batu adalah 68,16%. Hal ini memperlihatkan sebanyak 68,16% dari keseluruhan rumah tangga telah memiliki kendaraan bermotor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.92.

Tabel 4. 92 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Kendaraan Bermotor Kota Batu

Uraian	Jumlah
Jumlah rumah yang memiliki kendaraan bermotor (kk)	38.048
Jumlah rumah tangga (kk)	55.820
Persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor (%)	68,16

Sedangkan pada kabupaten induknya, persentase rumah tangga yang memiliki kendaran bermotor adalah sebanyak 55,15%. Hal ini memperlihatkan sebanyak 55,15% dari keseluruhan rumah tangga Kabupaten Malang telah memiliki kendaraan bermotor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.93.

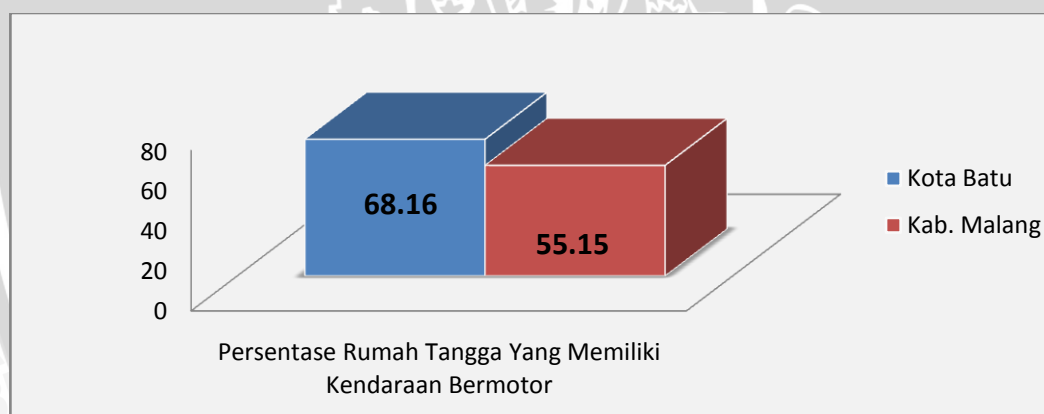
Tabel 4. 93
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Kendaraan Bermotor
Pada Kabupaten Malang Tahun 2009

Uraian	Jumlah
Jumlah rumah yang memiliki kendaraan bermotor (kk)	386.181
Jumlah rumah tangga (kk)	700.162
Persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor (%)	55,15

Persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor pada Kota Batu adalah sebesar 123,59% dari persentase Kabupaten Malang. Adapun perbandingan persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor pada Kota Batu dan Kabupaten Malang diuraikan pada tabel 4.94 dan gambar 4.64.

Tabel 4. 94
Perbandingan Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Kendaraan Bermotor
Pada Kota Batu dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Uraian	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Terhadap Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Kendaraan Bermotor Kabupaten Malang (%)
Jumlah rumah yang memiliki kendaraan bermotor (kk)	38.048	386.181	123,59
Jumlah rumah tangga (kk)	55.820	700.162	



Gambar 4. 64 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Kendaraan Bermotor Pada Kota Batu dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan grafik perbandingan, persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor pada Kota Batu lebih besar dibandingkan Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan tingkat kepemilikan penduduk Kota Batu terhadap kendaraan bermotor lebih tinggi dibandingkan kabupaten induknya.

7. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdapat pada suatu wilayah. Pada tahun 2009, rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor pada Kota Batu adalah sebesar 0,012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.95.

Tabel 4. 95
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kota Batu

Uraian	Jumlah
Panjang jalan (km)	490,83
Jumlah kendaraan bermotor (unit)	40.051
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan	0,012

Sedangkan pada kabupaten induknya, rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor adalah sebesar 0,004. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.96.

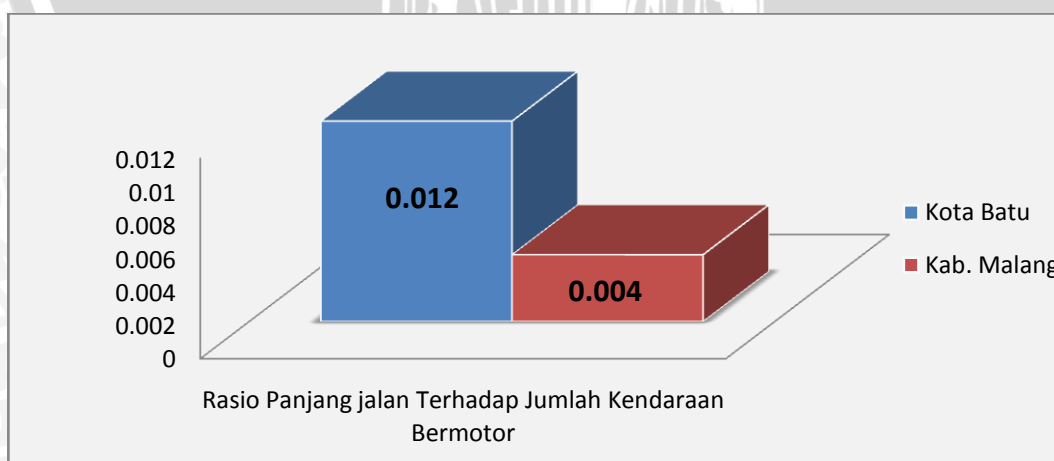
Tabel 4. 96
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Malang

Uraian	Jumlah
Panjang jalan (km)	1.903,19
Jumlah kendaraan bermotor (unit)	406.506
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan	0,004

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor pada Kota Batu adalah sebesar 300% dari nilai rasio Kabupaten Malang. Adapun perbandingan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor pada Kota Batu dan kabupaten induknya diuraikan pada tabel 4.97 dan gambar 4.65.

Tabel 4. 97
Perbandingan Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Batu Dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Uraian	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Terhadap Rasio panjang Jalan Terhadap Kendaraan Bermotor Kabupaten Malang (%)
Panjang jalan (km)	490,83	1.903,19	
Jumlah kendaraan bermotor (unit)	40.051	406.506	300
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan	0,012	0,004	300



Gambar 4. 65 Grafik Perbandingan Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Batu Dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor pada Kota Batu lebih besar dibandingkan nilai rasio Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan tingkat kemudahan pergerakan barang dan jasa Kota Batu lebih baik dibandingkan kabupaten induknya.

8. Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga yang terdapat pada suatu wilayah. Persentase ini digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat pencapaian pembangunan dalam pelayanan jaringan listrik.

Pada tahun 2009, persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga Kota Batu adalah sebesar 99,35%. Hal ini memperlihatkan sebanyak 99,35% dari keseluruhan rumah tangga Kota Batu telah terlayani oleh jaringan listrik.

Tabel 4. 98
Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga Kota Batu Tahun 2009

Uraian	Jumlah
Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik (kk)	55.458
Jumlah rumah tangga (kk)	55.820
Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga (%)	99,35

Sedangkan pada kabupaten induknya, persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga Kabupaten Malang sebesar 99,81%. Hal ini memperlihatkan sebanyak 99,81% dari keseluruhan rumah tangga Kabupaten Malang telah terlayani oleh jaringan listrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.99.

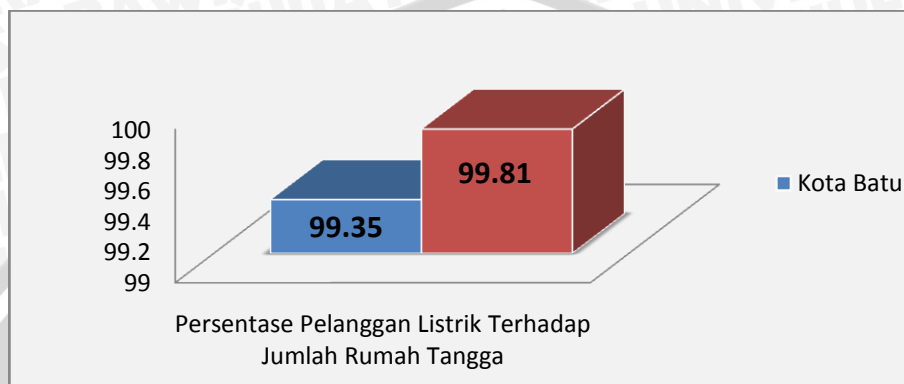
Tabel 4. 99
Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Malang Tahun 2009

Uraian	Jumlah
Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik (kk)	698.863
Jumlah rumah tangga (kk)	700.162
Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga (%)	99,81

Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga Kota Batu adalah sebesar 99,54% dari nilai persentase Kabupaten Malang. Adapun perbandingan persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga pada Kota Batu dan Kabupaten Malang diuraikan pada tabel 4.100 dan gambar 4.66.

Tabel 4. 100
Perbandingan Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga
Kota Batu dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Uraian	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Terhadap Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga Kab. Malang (%)
Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik (kk)	55.458	698.863	99,54
Jumlah rumah tangga (kk)	55.820	700.162	



Gambar 4. 66 Grafik Perbandingan Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga Kota Batu dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga Kota Batu lebih kecil dibandingkan nilai persentase Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan tingkat pelayanan jaringan listrik pada kabupaten induk lebih baik dibandingkan Kota Batu.

9. Persentase Tenaga Kerja

Tingkat pendidikan tenaga kerja akan mempengaruhi kualitas kinerja tenaga kerja pada suatu wilayah. Dalam indikator potensi daerah ini, akan diukur persentase tenaga kerja yang berpendidikan SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas dan sarjana (S1) terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua ukuran ini menggambarkan tingkat partisipasi tenaga kerja suatu wilayah pada jenjang pendidikan tertentu.

Pada tahun 2009, persentase tenaga kerja Kota Batu yang berpendidikan SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas adalah 418,20 %. Sedangkan persentase tenaga kerja Kota Batu yang berpendidikan sarjana (S1) terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas adalah 114,13%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.101 dan tabel 4.102.

Tabel 4. 101
Persentase Tenaga Kerja Kota Batu Yang Berpendidikan SLTA
Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Ke Atas Tahun 2009

Kategori	Jumlah (Jiwa)	Persentase Tenaga Kerja Berpendidikan SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun (%)
Tenaga kerja berpendidikan SLTA	17.410	418,20
Penduduk usia 18 tahun ke atas	4.163	

Tabel 4. 102
Persentase Tenaga Kerja Kota Batu Yang Berpendidikan S1
Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Tahun 2009

Kategori	Jumlah (Jiwa)	Persentase Tenaga Kerja Berpendidikan S1 Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun (%)
Tenaga kerja berpendidikan S1	4.505	114,43
Penduduk usia 25 tahun ke atas	3.937	

Berdasarkan hasil perhitungan, persentase tenaga kerja Kota Batu dengan pendidikan SLTA lebih tinggi dibandingkan persentase tenaga kerja dengan pendidikan sarjana (S1). Hal ini memperlihatkan tingkat partisipasi tenaga kerja pada jenjang pendidikan SLTA lebih banyak dibandingkan partisipasi tenaga kerja yang berpendidikan sarjana (S1).

Sedangkan pada Kabupaten Malang, persentase tenaga kerja yang berpendidikan SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas adalah 632,14%. Dan persentase tenaga kerja yang berpendidikan S1 terhadap penduduk usia 25 tahun sebesar 76,73%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.103 dan tabel 4.104.

Tabel 4. 103
Persentase Tenaga Kerja Kabupaten Malang Yang Berpendidikan SLTA
Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Ke Atas Tahun 2009

Kategori	Jumlah (Jiwa)	Persentase Tenaga Kerja Berpendidikan SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun (%)
Tenaga kerja berpendidikan SLTA	212.951	632,14
Penduduk usia 18 tahun ke atas	33.687	

Tabel 4. 104
Persentase Tenaga Kerja Kabupaten Malang Yang Berpendidikan S1
Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Tahun 2009

Kategori	Jumlah (Jiwa)	Persentase Tenaga Kerja Berpendidikan S1 Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun (%)
Tenaga kerja berpendidikan S1	26.793	76,73
Penduduk usia 25 tahun ke atas	34.919	

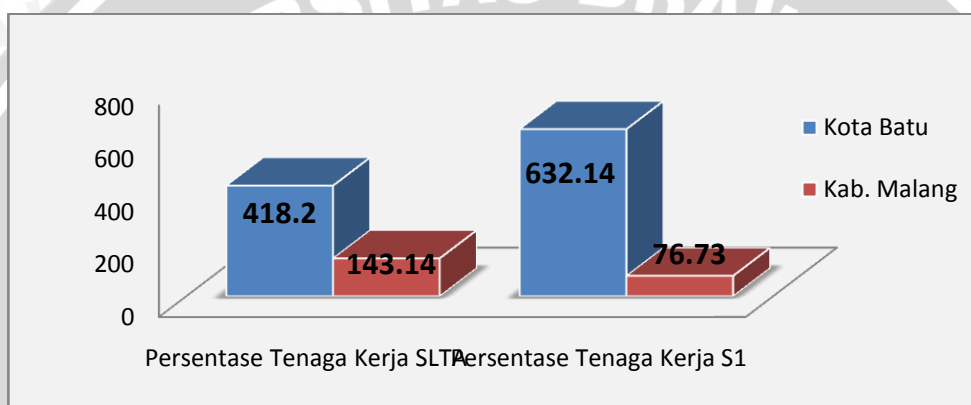
Persentase tenaga kerja Kabupaten Malang yang berpendidikan SLTA lebih tinggi dibandingkan persentase tenaga kerja yang berpendidikan sarjana (S1). Hal ini memperlihatkan partisipasi tenaga kerja pada jenjang pendidikan SLTA lebih banyak dibandingkan partisipasi tenaga kerja dengan jenjang pendidikan S1.

Persentase tenaga kerja yang berpendidikan SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas pada Kota Batu sebesar 66,16 % dari persentase tenaga kerja SLTA pada

Kabupaten Malang. Dan persentase tenaga kerja yang berpendidikan sarjana (S1) terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas pada Kota Batu sebesar 149,13% dari persentase Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.105 dan gambar 4.67.

Tabel 4. 105
Perbandingan Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terhadap Penduduk Usia Tertentu Pada Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Terhadap Kab. Malang (%)
Persentase Tenaga Kerja Yang Berpendidikan SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 tahun ke atas	418,20	632,14	66,16
Persentase Tenaga Kerja Yang Berpendidikan S1 Terhadap Penduduk Usia 25 tahun ke atas	114,43	76,73	149,13



Gambar 4. 67 Grafik Perbandingan Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terhadap Penduduk Usia Tertentu Pada Kota Batu Dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, persentase tenaga kerja yang berpendidikan SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas pada Kota Batu lebih kecil dibandingkan persentase Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan banyaknya partisipasi tenaga kerja yang berpendidikan SLTA pada kabupaten induknya. Sedangkan untuk persentase tenaga kerja yang berpendidikan S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas pada Kota Batu lebih besar dibandingkan persentase tenaga kerja yang terdapat pada Kabupaten Malang. Besarnya nilai persentase ini pada Kota Batu menggambarkan kualitas kinerja tenaga kerja Kota Batu lebih baik dibandingkan Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan partisipasi tenaga kerja dengan pendidikan sarjana (S1) Kota Batu lebih banyak dibandingkan pada kabupaten induknya.

10. Rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, aparatur pemerintah mempunyai peranan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam mengukur

kecukupan ketersediaan pegawai negeri sipil Kota Batu dilakukan dengan menggunakan rasio pegawai negeri sipil per 10.000 penduduk.

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio pegawai negeri sipil Kota Batu adalah 181,23 yang berarti terdapat 181 pegawai pemerintahan untuk memberikan pelayanan pembangunan pada 10.000 penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.106.

Tabel 4. 106
Rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS) Per 10.000 Penduduk Kota Batu Tahun 2009

Kategori	Jumlah (jiwa)	Rasio PNS Per 10.000 Penduduk
Jumlah PNS	3.751	
Jumlah Penduduk	206.980	181,23

Sedangkan rasio PNS per 10.000 penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2009 sebesar 74,71 yang berarti terdapat 74 aparatur pemerintah yang memberikan pelayanan pembangunan setiap 10.000 penduduk yang terdapat pada Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.107.

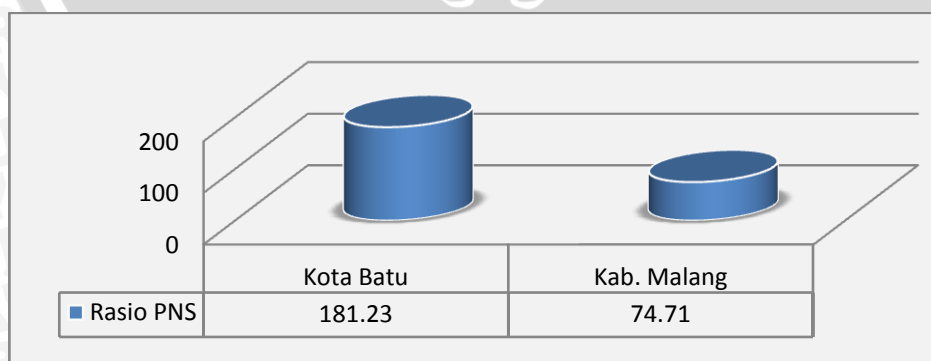
Tabel 4. 107
Rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS) Per 10.000 Penduduk Kabupaten Malang

Kategori	Jumlah (jiwa)	Rasio PNS Per 10.000 Penduduk
Jumlah PNS	18.120	
Jumlah Penduduk	2.425.311	74,71

Adapun perbandingan rasio pegawai negeri sipil Kota Batu dengan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.108 dan gambar 4.68 berikut:

Tabel 4. 108
Perbandingan Rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS) Per 10.000 Penduduk Kota Batu Dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Kategori (Jiwa)	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Terhadap Rasio PNS Per 10.000 Penduduk Kab. Malang (%)
Jumlah PNS	3.751	18.120	
Jumlah Penduduk	18.120	2.425.311	242,58
Rasio PNS	181,23	74,71	242,58



Gambar 4. 68 Perbandingan Rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS) Per 10.000 Penduduk Kota Batu Dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio pegawai negeri sipil Kota Batu adalah 242,58 dari nilai rasio Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan kuantitas aparatur pemerintahan Kota Batu lebih baik dibandingkan kabupaten induknya untuk memberikan pelayanan pembangunan per 10.000 penduduk.

E. Kemampuan Keuangan

Pada PP no 78 Tahun 2007, basis indikator kemampuan keuangan tercakup dalam jumlah penerimaan daerah sendiri (PDS), jumlah PDS perkapita dan jumlah PDS terhadap PDRB non migas yang terdapat pada suatu wilayah. Basis indikator ini bertujuan sebagai ukuran untuk mengetahui penerimaan daerah dalam pembiayaan pembangunan.

1. Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri (PDS)

Penerimaan daerah sendiri merupakan keseluruhan penerimaan daerah suatu wilayah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penerimaan daerah sendiri menurut PP No 78 Tahun 2007 antara lain tercakup pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dan penerimaan dari bagi hasil provinsi.

Pada tahun 2009, pendapatan daerah sendiri Kota Batu adalah sebesar Rp.73.090,93 juta dengan penerimaan pendapatan terbesar berasal dari bagi hasil pajak yaitu sebesar Rp. 24.047,37 juta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.109.

Tabel 4. 109
Pendapatan Daerah Sendiri Kota Batu Tahun 2009

Uraian Pendapatan	Jumlah (000 Rp)
Pendapatan Asli Daerah	17.386.741,57
Bagi hasil pajak	24.047.370,00
Bagi hasil SDA	10.124.445,42
Penerimaan dari bagi hasil provinsi	21.532.376,50
TOTAL	73.090.933,49

Sedangkan pada kabupaten induknya, pendapatan daerah sendiri Kabupaten Malang pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 333.970,43 juta. Penerimaan pendapatan daerah sendiri terbesar berasal dari pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp. 145.379,15 juta.

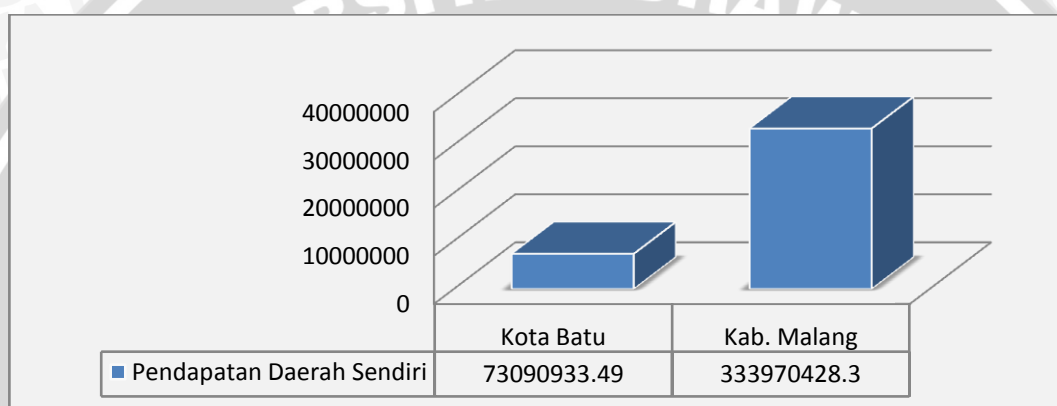
Tabel 4. 110
Pendapatan Daerah Sendiri Kabupaten Malang Tahun 2009

Uraian Pendapatan	Jumlah (000 Rp)
Pendapatan Asli Daerah	145.379.148,79
Bagi hasil pajak	79.745.494,83
Bagi hasil SDA	28.962.614,44
Penerimaan dari bagi hasil provinsi	79.883.170,25
TOTAL	333.970.428,31

Pendapatan daerah sendiri Kota Batu pada tahun 2009 adalah sebesar 21,89% dari pendapatan daerah sendiri Kabupaten Malang pada tahun 2009. Adapun perbandingan pendapatan daerah sendiri Kota Batu dan Kabupaten Malang pada tahun 2009 diuraikan pada tabel 4.111 dan gambar 4.69.

Tabel 4. 111
Perbandingan Pendapatan Daerah Sendiri (PDS)
Kota Batu Dan Kabupaten Malang Pada Tahun 2009

Uraian Pendapatan	Jumlah (000 Rp)		Presentase Terhadap PDS Kab. Malang (%)
	Kota Batu	Kab. Malang	
Pendapatan Asli Daerah	17.386.741,57	145.379.148,79	
Bagi hasil pajak	24.047.370,00	79.745.494,83	
Bagi hasil SDA	10.124.445,42	28.962.614,44	21,89
Penerimaan dari bagi hasil provinsi	21.532.376,50	79.883.170,25	
TOTAL	73.090.933,49	333.970.428,31	21,89



Gambar 4. 69 Grafik Perbandingan Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) Kota Batu Dan Kabupaten Malang Pada Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, pendapatan daerah sendiri Kabupaten Malang lebih besar dibandingkan pendapatan daerah sendiri Kota Batu pada tahun 2009. Hal ini memperlihatkan penerimaan kabupaten induk untuk membiayai belanja daerahnya lebih besar dibandingkan Kota Batu.

2. Rasio Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) Perkapita

Rasio penerimaan daerah sendiri (PDS) perkapita merupakan perbandingan antara jumlah PDS dengan jumlah penduduk yang terdapat pada suatu wilayah. Rasio PDS perkapita diukur untuk melihat tingkat pemasukan penduduk pada pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio PDS perkapita Kota Batu pada tahun 2009 adalah sebesar 353.130 rupiah per jiwa. Hal ini memperlihatkan rata-rata pemasukan penduduk Kota Batu untuk pendapatan daerah sendiri Kota Batu adalah sebesar Rp. 353.130. Rata-rata pemasukan terbesar penduduk Kota Batu untuk PDS Kota Batu

berasal dari bagi hasil pajak yaitu sebesar Rp 116.182. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.112.

Tabel 4. 112
Rasio Pendapatan Daerah Sendiri Perkapita Kota Batu Tahun 2009

Uraian Pendapatan	Jumlah PDS (000 Rp)	Jumlah Penduduk	Rasio PDS Perkapita (Rp/jiwa)
Pendapatan Asli Daerah	17.386.741,57		84.002
Bagi hasil pajak	24.047.370,00	206.980	116.182
Bagi hasil SDA	10.124.445,42		48.915
Penerimaan dari bagi hasil provinsi	21.532.376,50		104.031
TOTAL	73.090.933,49	206.980	353.130

Sedangkan pada kabupaten induknya, rasio PDS perkapita Kabupaten Malang pada tahun 2009 adalah sebesar 143.516 rupiah per jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.113.

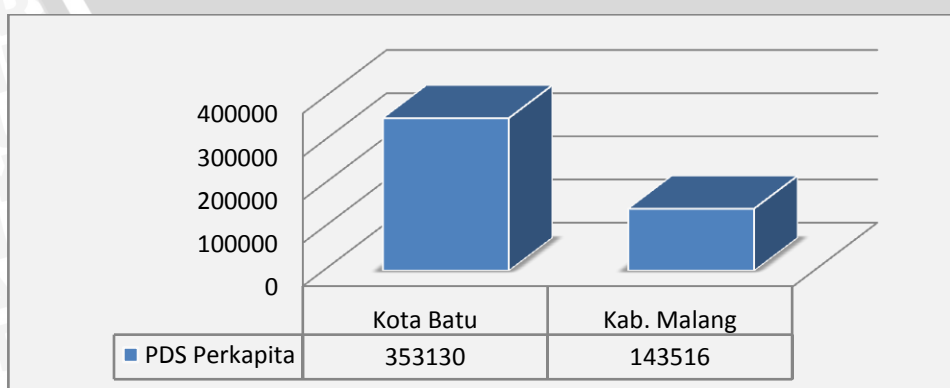
Tabel 4. 113
Rasio Pendapatan Daerah Sendiri Perkapita Kabupaten Malang Tahun 2009

Uraian Pendapatan	Jumlah PDS (000 Rp)	Jumlah Penduduk	Rasio PDS Perkapita (Rp/jiwa)
Pendapatan Asli Daerah	145.379.148,79		59.942
Bagi hasil pajak	79.745.494,83	2.425.311	32.881
Bagi hasil SDA	28.962.614,44		11.942
Penerimaan dari bagi hasil provinsi	79.883.170,25		32.937
TOTAL	333.970.428,31	2.425.311	137.702

Rasio PDS perkapita Kota Batu adalah 256,44% dari PDS perkapita kabupaten induknya. Adapun perbandingan rasio pendapatan daerah sendiri perkapita Kota Batu dan Kabupaten Malang diuraikan pada tabel 4.114 dan gambar 4.70.

Tabel 4. 114
Perbandingan Rasio PDS Perkapita Kota Batu dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Uraian	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Terhadap Rasio PDS Perkapita Kab. Malang (%)
Pendapatan Daerah Sendiri (000 Rp)	73.090.933,49	333.970.428,31	256,44
Jumlah Penduduk (jiwa)	206.980	2.425.311	
Rasio PDS Perkapita	353.130	137.702	256,44



Gambar 4. 70 Grafik Perbandingan Rasio PDS Perkapita Kota Batu dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio PDS perkapita Kota Batu lebih besar dibandingkan rasio PDS perkapita Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan rata-rata pemasukan penduduk Kota Batu untuk pendapatan daerah sendiri Kota Batu lebih besar dibandingkan kabupaten induknya.

3. Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas

Rasio PDS terhadap PDRB non migas merupakan perbandingan antara jumlah PDS suatu wilayah dengan jumlah PDRB non migasnya. Rasio ini mengukur kontribusi PDRB terhadap pendapatan daerah sendiri yang terdapat pada suatu wilayah.

Pada tahun 2009, rasio PDS Kota Batu terhadap PDRB non migas adalah 2,75%. Hal ini memperlihatkan masing-masing sektor dari PDRB non migas Kota Batu memberikan kontribusi sebesar 2,75% untuk pendapatan daerah sendiri Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.115.

Tabel 4. 115
Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas Kota Batu Tahun 2009

URAIAN	JUMLAH
Pendapatan Daerah Sendiri (000 Rp)	73.090.933,49
PDRB Non Migas ADHB (juta Rp)	2.655.639,11
Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas (%)	2,75

Sedangkan pada kabupaten induknya, rasio PDS terhadap PDRB non migas pada tahun 2009 adalah sebesar 1,20%. Hal ini memperlihatkan kontribusi masing-masing sektor dari PDRB non migas untuk pendapatan daerah sendiri Kabupaten Malang adalah sebesar 1,20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.116.

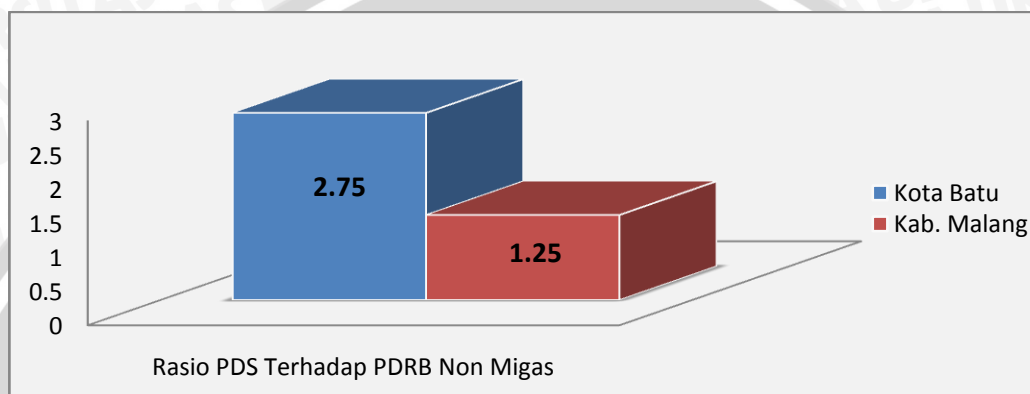
Tabel 4. 116
Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas Kabupaten Malang Tahun 2009

URAIAN	JUMLAH
Pendapatan Daerah Sendiri (000 Rp)	333.970.428,31
PDRB Non Migas ADHB (juta Rp)	27.754.805,09
Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas (%)	1,20

Rasio PDS terhadap PDRB non migas Kota Batu pada tahun 2009 adalah 220% dari rasio PDS terhadap PDRB non migas kabupaten induknya. Adapun perbandingan rasio PDS terhadap PDRB non migas Kota Batu dan Kabupaten Malang diuraikan pada tabel 4.117 dan gambar 4.71.

Tabel 4. 117
Perbandingan Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas
Kota Batu Dan Kabupaten Malang Tahun 2009

URAIAN	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Terhadap Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas Kab. Malang (%)
Pendapatan Daerah Sendiri (000 Rp)	73.090.933,49	333.970.428,31	
PDRB Non Migas ADHB (juta Rp)	2.655.639,11	27.754.805,09	229,16
Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas (%)	2,75	1,20	229,16



Gambar 4. 71 Grafik Perbandingan Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas Kota Batu Dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio PDS terhadap PDRB non migas Kota Batu pada tahun 2009 lebih besar dibandingkan rasio PDS terhadap PDRB non migas Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan kontribusi masing-masing sektor dari PDRB non migas untuk PDS Kota Batu lebih besar dibandingkan pada kabupaten induknya.

F. Sosial Budaya

Basis indikator yang tercakup dalam sosial budaya terbagi menjadi rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk, rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk dan jumlah balai pertemuan. Basis indikator ini memperlihatkan kecukupan sarana yang digunakan masyarakat pada suatu wilayah untuk berbagai interaksi sosial.

1. Rasio Sarana Peribadatan

Rasio sarana peribadatan merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kecukupan ketersediaan sarana peribadatan pada suatu wilayah. Rasio ini membandingkan jumlah keseluruhan sarana peribadatan yang terdapat pada suatu wilayah dengan jumlah penduduk.

Pada tahun 2009, rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk Kota Batu adalah sebesar 8,94. Nilai rasio ini memperlihatkan sebanyak 9 unit sarana peribadatan untuk melayani kebutuhan rohani setiap 10.000 penduduk Kota Batu.

Tabel 4. 118
Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Kota Batu Tahun 2009

Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah (unit)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk
Masjid	139	206.980	8,94
Gereja	37		
Vihara	7		
Pura	2		
TOTAL KESELURUHAN	185	206.980	8,94

Sedangkan rasio sarana peribadatan Kabupaten Malang pada tahun 2009 adalah sebesar 9,95 yang berarti terdapat 10 unit sarana yang mampu memenuhi kebutuhan rohani setiap 10.000 penduduk Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.126.

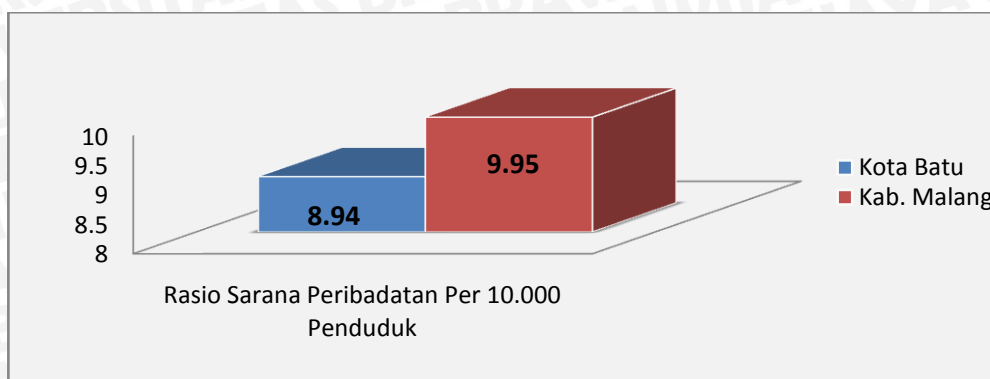
Tabel 4. 119
Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2009

Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah (unit)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk
Masjid	2.020	2.425.311	9,95
Gereja	329		
Vihara	18		
Pura	45		
TOTAL KESELURUHAN	2.412	2.425.311	9,95

Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk Kota Batu sebesar 89,87% dari nilai rasio Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.120 dan gambar 4.72.

Tabel 4. 120
Perbandingan Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kategori	Kota Batu	Kabupaten Malang	Persentase Terhadap Rasio Sarana Peribadatan Kab. Malang (%)
Jumlah Sarana Peribadatan (unit)	185	2.412	89,87
Jumlah Penduduk (jiwa)	206.980	2.425.311	
Rasio Sarana Peribadatan	8,94	9,95	89,87



Gambar 4. 72 Grafik Perbandingan Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk Kota Batu lebih kecil dibandingkan nilai rasio Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan sebaran sarana peribadatan kabupaten induk lebih baik untuk mencukupi untuk kebutuhan penduduknya dibandingkan Kota Batu.

2. Rasio Sarana Olahraga Per 10.000 Penduduk

Rasio sarana olahraga per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah sarana olahraga dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Rasio ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk kecukupan ketersediaan sarana olahraga yang terdapat pada suatu wilayah.

Rasio sarana olahraga Kota Batu adalah 0,43. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.121.

**Tabel 4. 121
Rasio Sarana Olahraga Per 10.000 Kota Batu Tahun 2009**

Kategori	Jumlah	Rasio Sarana Olahraga Per 10.000 Penduduk (unit/jiwa)
Jumlah sarana olahraga (unit)	9	0,43
Jumlah penduduk (jiwa)	206.980	

Sedangkan rasio sarana olahraga per 10.000 penduduk Kabupaten Malang adalah 1,44 yang berarti terdapat satu unit sarana olahraga yang telah mampu melayani kebutuhan setiap 10.000 penduduk Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.122.

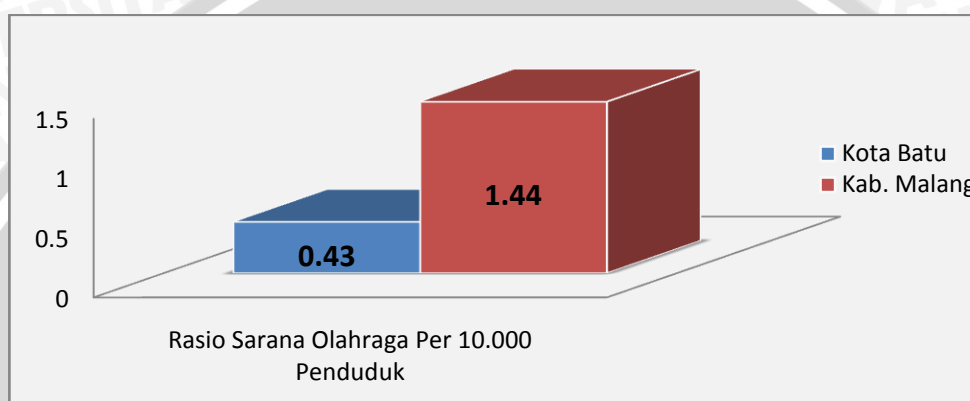
**Tabel 4. 122
Rasio Sarana Olahraga Per 10.000 Kabupaten Malang Tahun 2009**

Kategori	Jumlah	Rasio Sarana Olahraga Per 10.000 Penduduk (unit/jiwa)
Jumlah sarana olahraga (unit)	350	1,44
Jumlah penduduk (jiwa)	2.425.311	

Rasio sarana olahraga per 10.000 penduduk Kota Batu adalah 29,86% dari nilai rasio sarana olahraga Kabupaten Malang. Adapun perbandingan rasio sarana olahraga Kota Batu dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.123 dan gambar 4.73.

Tabel 4. 123
Perbandingan Rasio Sarana Olahraga Per 10.000 Penduduk
Kota Batu Dengan Kabupaten Malang Tahun 2009

Kategori	Kota Batu	Kabupaten Malang	Persentase Terhadap Rasio Sarana Olahraga Kab. Malang (%)
Jumlah sarana olahraga (unit)	9	3	
Jumlah penduduk (jiwa)	206.980	2.425.311	29,86
Rasio Sarana Olahraga	0,43	1,44	29,86



Gambar 4. 73 Grafik Perbandingan Rasio Sarana Olahraga Per 10.000 Penduduk
Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio sarana olahraga Kabupaten Malang lebih besar dibandingkan Kota Batu. Hal ini menggambarkan dalam pemenuhan kebutuhannya, sebaran sarana olahraga kabupaten induk lebih baik untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dibandingkan sarana olahraga Kota Batu.

3. Jumlah Balai Pertemuan

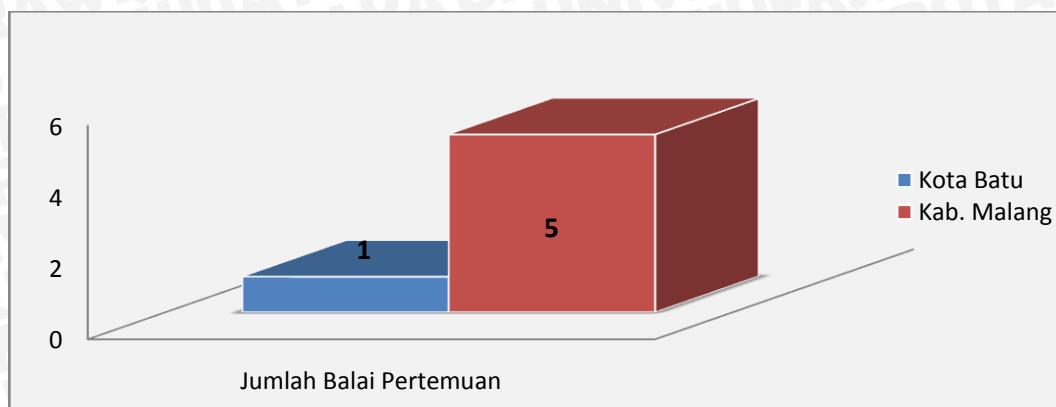
Jumlah balai pertemuan merupakan keseluruhan gedung pertemuan yang terdapat pada suatu wilayah yang digunakan sebagai kegiatan interaksi sosial. Jumlah balai pertemuan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat ketersediaan balai pertemuan dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat yang terdapat pada suatu wilayah.

Pada tahun 2009, jumlah balai pertemuan yang terdapat pada Kota Batu adalah sebanyak 1 unit. Balai pertemuan yang terdapat pada Kota Batu pada umumnya digunakan sebagai kegiatan sosial masyarakat Kota Batu. Sedangkan pada Kabupaten Malang, keseluruhan balai pertemuan terdapat sebanyak 5 unit.

Jumlah balai pertemuan yang terdapat pada Kota Batu adalah 20% dari jumlah balai pertemuan Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.124 dan gambar 4.74.

Tabel 4. 124
Perbandingan Jumlah Balai Pertemuan
Kota Batu Dengan Kabupaten Malang Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Jumlah Balai Pertemuan (unit)	Persentase Terhadap Jumlah Balai Pertemuan Kab. Malang (%)
Kota Batu	1	20
Kabupaten Malang	5	



Gambar 4. 74 Grafik Perbandingan Jumlah Balai Pertemuan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, jumlah balai pertemuan Kabupaten Malang lebih besar dibandingkan Kota Batu. Hal ini menggambarkan dalam pemenuhan kebutuhannya, sebaran balai pertemuan yang terdapat pada kabupaten induknya lebih banyak dibandingkan Kota Batu.

G. Sosial Politik

Basis indikator yang tercakup dalam sosial politik terbagi menjadi rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif terhadap penduduk yang memiliki hak pilih dan jumlah organisasi kemasyarakatan. Basis indikator ini memperlihatkan keadaan sosial politik yang terdapat pada suatu wilayah.

1. Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Terhadap Penduduk Yang Memiliki Hak Pilih

Tolak ukur yang digunakan untuk melihat tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum adalah rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif terhadap penduduk yang memiliki hak pilih. Rasio ini merupakan perbandingan antara penduduk yang mengikuti pemilu legislatif dengan penduduk yang memiliki hak pilih.

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif Kota Batu terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih adalah sebesar. Hal ini memperlihatkan sebanyak 91,04% penduduk Kota Batu menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilu Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.125.

Tabel 4. 125
Rasio Penduduk Kota Batu Yang Ikut Pemilu Legislatif
Terhadap Penduduk Yang Memiliki Hak Pilih

Kategori	Jumlah (jiwa)	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Terhadap Penduduk Yang Memiliki Hak Pilih (%)
Penduduk yang ikut pemilu legislatif	118.991	91,04
Penduduk yang memiliki hak pilih	130.701	

Sedangkan rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif Kabupaten Malang terhadap penduduk yang memiliki hak pilih adalah 84,14%. Hal ini memperlihatkan sebanyak 84,14% penduduk yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.126.

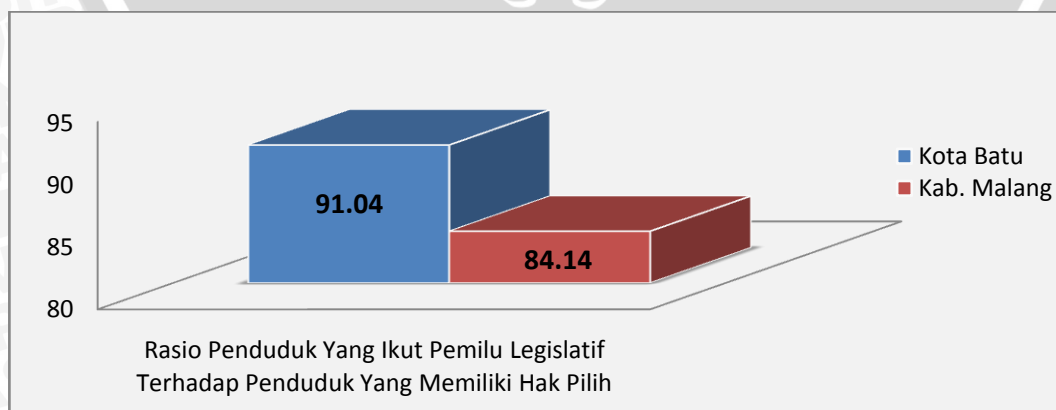
Tabel 4. 126
Rasio Penduduk Kabupaten Malang Yang Ikut Pemilu Legislatif
Terhadap Penduduk Yang Memiliki Hak Pilih

Kategori	Jumlah (jiwa)	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Terhadap Penduduk Yang Memiliki Hak Pilih
Penduduk yang ikut pemilu legislatif	1.448.729	84,14
Penduduk yang memiliki hak pilih	1.721.797	

Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif Kota Batu terhadap penduduk yang memiliki hak pilih Kota Batu adalah 84,14% dari nilai rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif terhadap penduduk yang memiliki hak pilih di Kabupaten Malang. Adapun perbandingan rasio ini antara Kota Batu dan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 127
Perbandingan Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Terhadap Penduduk Yang
Memiliki Hak Pilih Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Presentase Terhadap Rasio Kab. Malang (%)
Jumlah penduduk yang ikut pemilu legislatif (jiwa)	118.991	1.448.729	108,20
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih (jiwa)	130.701	1.721.797	
Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Terhadap Penduduk Yang Memiliki Hak Pilih	91,04	84,14	108,20



Gambar 4. 75 Grafik Perbandingan Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Terhadap Penduduk Yang Memiliki Hak Pilih Kota Batu Dan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif terhadap penduduk yang memiliki hak pilih Kota Batu lebih besar dibandingkan Kabupaten Malang. Hal ini menggambarkan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemilu legislatif Kota Batu lebih banyak dibandingkan pada kegiatan pemilu legislatif kabupaten induknya.

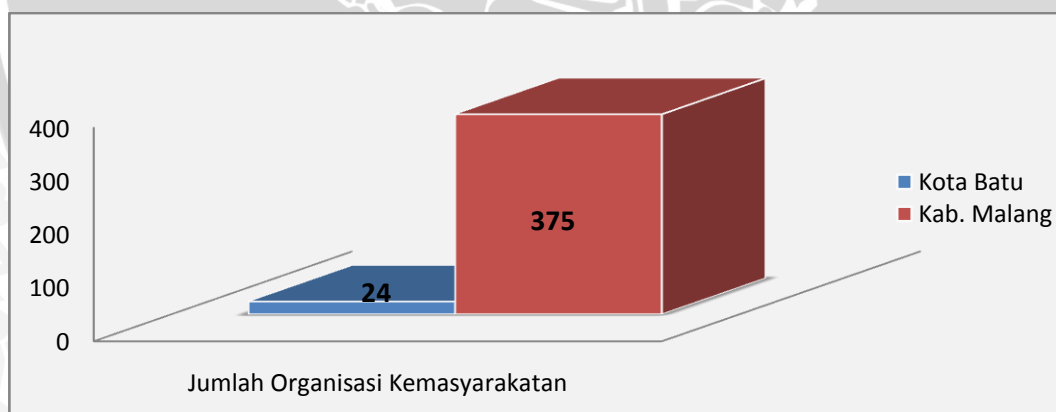
2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdapat pada suatu wilayah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat ketersediaan organisasi masyarakat dalam bidang sosial. Pada tahun 2009, jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdapat pada Kota Batu adalah 24 buah. Sedangkan pada Kabupaten Malang keseluruhan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Malang terdapat sebanyak 375 buah.

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdapat pada Kota Batu adalah 6,40% dari jumlah organisasi kemasyarakatan Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel 4.128 dan gambar 4.76.

Tabel 4. 128
Perbandingan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan
Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terhadap Jumlah Balai Pertemuan Kab. Malang (%)
Kota Batu	24	6,40
Kabupaten Malang	375	



Gambar 4. 76 Perbandingan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan
Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, jumlah organisasi kemasyarakatan Kabupaten Malang lebih besar dibandingkan Kota Batu. Hal ini menggambarkan keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai media kegiatan sosial masyarakat lebih banyak pada kabupaten induknya dibandingkan Kota Batu.

H. Pertahanan

Dalam basis indikator PP No. 78 Tahun 2007, pertahanan diukur dengan rasio jumlah aparat pertahanan terhadap luas wilayah dan karakteristik wilayah yang dilihat dari sudut pandang pertahanan. Adapun evaluasi basis indikator pertahanan untuk Kota Batu akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Rasio Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah

Rasio aparat pertahanan terhadap luas wilayah merupakan perbandingan jumlah aparat pertahanan yang tergabung dalam satuan TNI dengan luas suatu wilayah. Rasio ini menjadi tolak ukur yang digunakan untuk memperlihatkan jumlah aparat pertahanan dalam satuan wilayah yang bertugas menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah.

Pada tahun 2009, rasio aparat pertahanan terhadap luas wilayah Kota Batu adalah 4,98 yang berarti terdapat 5 orang aparat pertahanan dalam setiap satu km² wilayah Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.129.

Tabel 4. 129
Rasio Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah Kota Batu

Kategori	Jumlah	Rasio Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah (jiwa/km ²)
Jumlah Aparat Pertahanan (jiwa)	992	4,98
Luas Wilayah (km ²)	199,09	

Sedangkan pada Kabupaten Malang, rasio aparat pertahanan terhadap luas wilayahnya adalah sebesar 4,38 yang berarti terdapat 4 orang aparat keamanan dalam setiap satu km² wilayah Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.130.

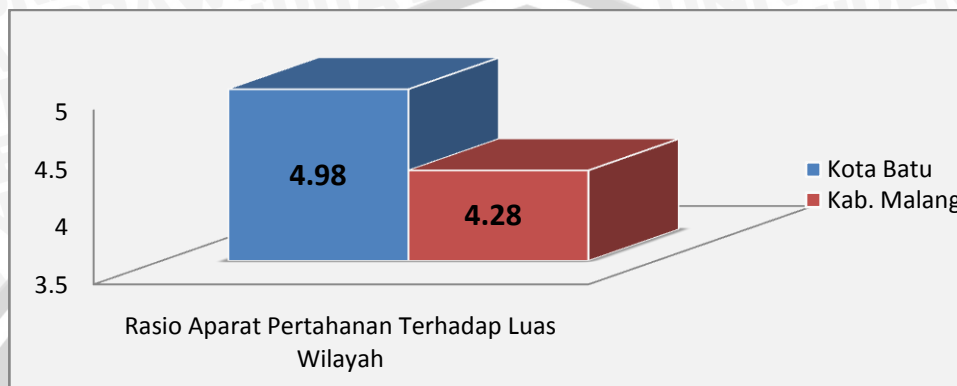
Tabel 4. 130
Rasio Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Malang

Kategori	Jumlah	Rasio Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah (jiwa/km ²)
Jumlah Aparat Pertahanan (jiwa)	14.184	4,28
Luas Wilayah (km ²)	3.238,27	

Rasio aparat pertahanan terhadap luas wilayah di Kota Batu adalah 116,36% dari nilai rasio aparat pertahanan di Kabupaten Malang. Uraian perbandingan rasio aparat pertahanan pada Kota Batu dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.131 dan gambar 4.77.

Tabel 4. 131
Perbandingan Rasio Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah
Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kategori	Kota Batu	Kabupaten Malang	Presentase Terhadap Rasio Aparat Pertahanan Kabupaten Malang (%)
Jumlah Aparat Pertahanan (jiwa)	992	14.184	
Luas Wilayah (Ha)	199,09	3.238,27	116,36
Rasio Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	4,98	4,28	116,36



Gambar 4. 77 Grafik Perbandingan Rasio Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio aparat pertahanan terhadap luas wilayah Kota Batu lebih besar dibandingkan nilai rasio aparat pertahanan yang terdapat pada kabupaten induknya. Hal ini memperlihatkan ketersediaan aparat pertahanan Kota Batu untuk menjaga keutuhan wilayah lebih tercukupi dibandingkan kabupaten induknya.

2. Karakteristik Wilayah Dari Sudut Pertahanan

Pertahanan dari sudut pandang ini merupakan ketahanan wilayah yang dilihat dari aspek karakter wilayah yaitu hamparan fisik dan posisi daerah otonomi. Dalam PP No 78 Tahun 2007, tingkatan karakteristik wilayah daerah otonomi antara lain:

1. Daerah otonomi berbatasan dengan negara lain dan hamparan fisik wilayahnya berupa kepulauan
2. Daerah otonomi berbatasan dengan negara lain dan hamparan fisik wilayahnya berupa wilayah daratan dan pantai
3. Daerah otonomi berbatasan dengan negara lain dan hamparan fisik wilayahnya berupa wilayah daratan
4. Daerah otonomi tidak berbatasan dengan negara lain dan hamparan fisik wilayahnya berupa kepulauan, daratan dan pantai, maupun daratan.

Dilihat dari karakteristik wilayahnya, Kota Batu merupakan wilayah otonomi dengan hamparan fisik berupa daratan dan tidak berbatasan dengan negara lain. Sedangkan karakteristik Kabupaten Malang merupakan wilayah yang tidak berbatasan

dengan negara lain melainkan berbatasan langsung dengan laut sehingga hamparan fisiknya berupa daratan dan pantai.

Berdasarkan hal itu, maka karakteristik wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang menurut tingkatan karakteristik wilayah yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007, termasuk dalam kategori tingkatan 4 yaitu tidak berbatasan dengan negara lain dan hamparan fisik wilayahnya berupa kepulauan, daratan dan pantai, maupun daratan. Hal ini menunjukkan Kota Batu memiliki kedudukan wilayah yang sama dengan Kabupaten Malang.

I. Keamanan

Basis indikator keamanan yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 diukur dengan menggunakan rasio aparat keamanan terhadap jumlah penduduk. Rasio ini digunakan untuk mengukur kecukupan aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban penduduk suatu wilayah.

Pada tahun 2009, rasio aparat keamanan Kota Batu terhadap jumlah penduduk adalah 14,20 yang berarti terdapat 14 orang aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban setiap 10.000 penduduk wilayah Kota Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.132.

Tabel 4. 132

Rasio Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk Kota Batu

Kategori	Jumlah (jiwa)	Rasio Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk
Aparat Keamanan	294	14,20
Penduduk	206.980	

Sedangkan rasio aparat keamanan Kabupaten Malang terhadap jumlah penduduk adalah 16,83 yang berarti terdapat 17 orang aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban penduduk Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.133.

Tabel 4. 133

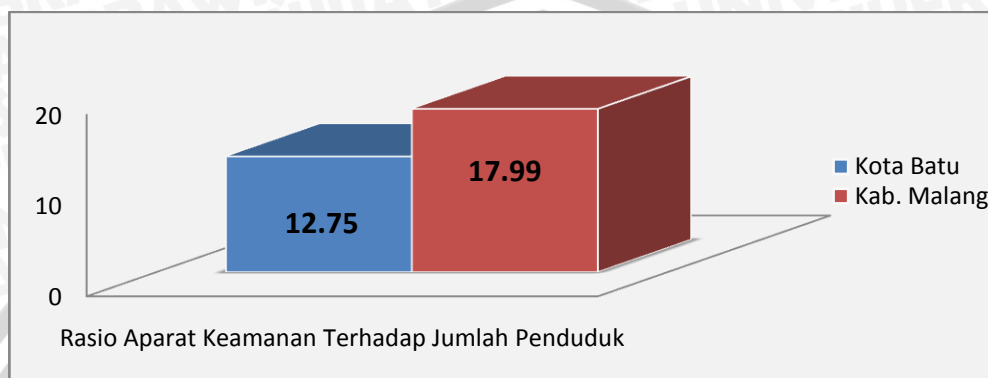
Rasio Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Malang

Kategori	Jumlah (jiwa)	Rasio Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk
Aparat Keamanan	4.082	16,83
Penduduk	2.425.311	

Rasio aparat keamanan Kota Batu adalah 75,75% dari nilai rasio aparat keamanan Kabupaten Malang. Adapun perbandingan rasio aparat keamanan terhadap jumlah penduduk Kota Batu dan Kabupaten Malang diuraikan pada tabel 4.134 dan gambar 4.78.

Tabel 4. 134
Perbandingan Rasio Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk
Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kategori	Kota Batu	Kabupaten Malang	Presentase Terhadap Rasio Aparat Keamanan Kabupaten Malang (%)
Jumlah aparat Keamanan (jiwa)	264	4.082	
Jumlah penduduk (jiwa)	206.980	2.425.311	84,37
Rasio Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	14,20	16,83	84,37



Gambar 4. 78 Grafik Perbandingan Rasio Aparat Pertahanan Terhadap Jumlah Penduduk Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, rasio aparat keamanan Kota Batu lebih kecil dibandingkan rasio aparat keamanan kabupaten induknya. Hal ini memperlihatkan ketersediaan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban wilayah kabupaten induknya lebih baik dibandingkan Kota Batu.

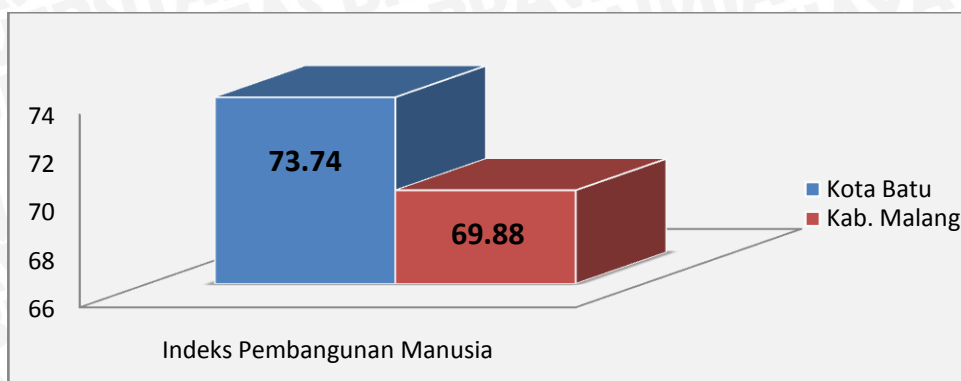
J. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Basis indikator tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian pembangunan dasar manusia. Dalam PP No 78 Tahun 2007, basis indikator ini diukur melalui indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah rata-rata dari indeks harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak (daya beli).

Pada tahun 2009, indeks pembangunan manusia Kota Batu adalah 73,74. Dan indeks pembangunan Kabupaten Malang adalah 69,88. Adapun perbandingan indeks pembangunan manusia Kota Batu dan Kabupaten Malang diuraikan pada tabel 4.135 dan gambar 4.79.

Tabel 4. 135
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia	Persentase Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kab. Malang (%)
Kota Batu	73,20	
Kabupaten Malang	83,37	105,52



Gambar 4. 79 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batu Dan Kabupaten Malang Tahun 2009

Berdasarkan hasil perbandingan, indeks pembangunan Kota Batu adalah 105,52% dari nilai indeks pembangunan manusia Kabupaten Malang. Hal ini memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Batu lebih baik dibandingkan kabupaten induknya.

K. Rentang Kendali

Rentang kendali merupakan cerminan dari tingkat aksesibilitas masyarakat menuju pusat pemerintahan suatu wilayah. Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, yang tercakup dalam basis indikator rentang kendali adalah rata-rata jarak tempuh dan waktu tempuh yang digunakan menuju pusat pemerintahan. Rata-rata jarak tempuh dan waktu tempuh merupakan perbandingan antara jumlah keseluruhan jarak tempuh maupun waktu tempuh menuju pusat pemerintahan dengan jumlah kecamatan yang terdapat pada suatu wilayah.

1. Rata-rata Jarak Tempuh Menuju Pusat Pemerintahan

Kecamatan Batu merupakan pusat pemerintahan dari wilayah administrasi Kota Batu. Berdasarkan data yang diperoleh, jarak tempuh keseluruhan kecamatan Kota Batu menuju pusat pemerintahan adalah 8,92 km. Sehingga rata-rata jarak tempuh kecamatan menuju pusat pemerintahan Kota Batu adalah 2,97 km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.136.

**Tabel 4. 136
Rata-rata Jarak Tempuh Menuju Pusat Pemerintahan Kota Batu**

Kategori	Jumlah
Keseluruhan jarak tempuh (km)	8,92
Jumlah kecamatan	3
Rata-rata Jarak Tempuh	2,97

Sedangkan jarak tempuh keseluruhan kecamatan Kabupaten Malang menuju pusat pemerintahannya adalah 659 km, sehingga rata-rata jarak tempuh kecamatan

menuju pusat pemerintahan Kabupaten Malang adalah 19,97 km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.137.

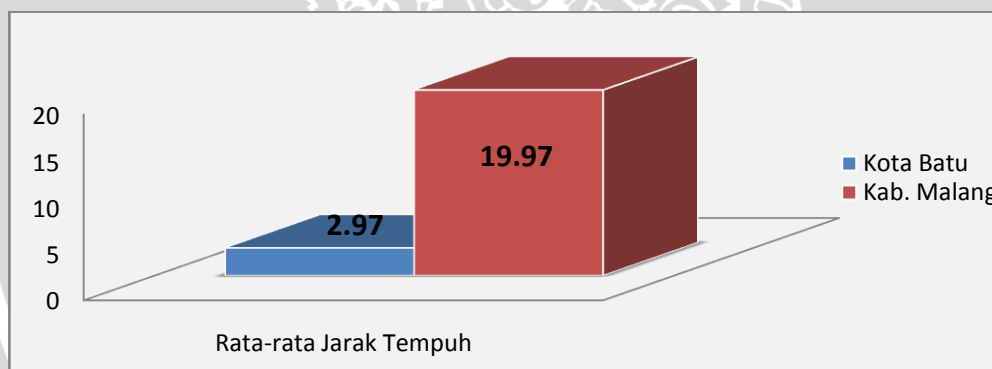
Tabel 4. 137
Rata-rata Jarak Tempuh Menuju Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang

Kategori	Jumlah
Keseluruhan jarak tempuh (km)	659
Jumlah kecamatan	33
Rata-rata Jarak Tempuh	19,97

Rata-rata jarak tempuh kecamatan menuju pusat pemerintahan Kota Batu sebesar 14,87% dari rata-rata jarak tempuh kecamatan menuju pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Adapun perbandingan rata-rata jarak tempuh kecamatan menuju pusat pemerintahan Kota Batu dan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 138
Perbandingan Rata-rata Jarak Tempuh Kecamatan Menuju Pusat Pemerintahan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kategori	Kota Batu	Kabupaten Malang	Presentase Terhadap Rata-rata Jarak Tempuh Kab. Malang (%)
Keseluruhan jarak tempuh (km)	8,92	659	14,87
Jumlah kecamatan	3	33	
Rata-rata Jarak Tempuh	2,97	19,97	14,87



Gambar 4. 80 Perbandingan Rata-rata Jarak Tempuh Kecamatan Menuju Pusat Pemerintahan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, rata-rata jarak tempuh kecamatan menuju pusat pemerintahan Kota Batu lebih kecil dibandingkan rata-rata jarak tempuh kecamatan menuju pusat pemerintahan kabupaten induknya. Kecilnya rata-rata jarak tempuh kecamatan Kota Batu menuju pusat pemerintahannya memperlihatkan bahwa penduduk Kota Batu lebih mudah menuju pusat pelayanan pemerintahannya karena jarak yang terbilang dekat.

2. Rata-rata Waktu Tempuh Menuju Pusat Pemerintahan

Adapun waktu tempuh keseluruhan kecamatan Kota Batu menuju pusat pemerintahan adalah 14 menit perjalanan. Sehingga rata-rata waktu tempuh kecamatan menuju pusat pemerintahan Kota Batu adalah 5 menit.

Tabel 4. 139
Rata-rata Waktu Tempuh Kecamatan Menuju Pusat Pemerintahan Kota Batu

Kategori	Jumlah
Keseluruhan waktu tempuh (menit)	14
Jumlah kecamatan	3
Rata-rata Jarak Tempuh	4,97

Sedangkan waktu tempuh keseluruhan kecamatan Kabupaten Malang menuju pusat pemerintahannya adalah 997 menit perjalanan. Sehingga rata-rata waktu tempuh kecamatan menuju pusat pemerintahan Kabupaten Malang adalah 30 menit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.147.

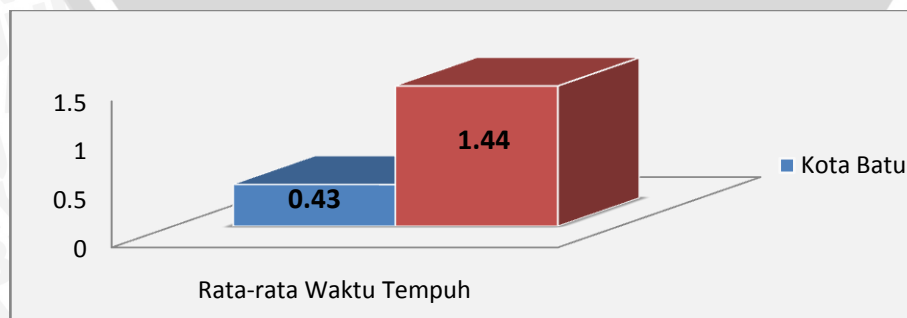
Tabel 4. 140
Rata-rata Waktu Tempuh Kecamatan Menuju Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang

Kategori	Jumlah
Keseluruhan waktu tempuh (menit)	997
Jumlah kecamatan	33
Rata-rata Jarak Tempuh	30,21

Rata-rata waktu tempuh kecamatan menuju pusat pemerintahan Kota Batu sebesar 16,41% dari rata-rata waktu tempuh kecamatan Kabupaten Malang menuju pusat pemerintahannya. Adapun perbandingan rata-rata waktu tempuh kecamatan Kota Batu dan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 141
Perbandingan Rata-rata Waktu Tempuh Kecamatan Menuju Pusat Pemerintahan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Kategori	Kota Batu	Kabupaten Malang	Presentase Terhadap Rata-rata Jarak Tempuh Kab. Malang (%)
Keseluruhan waktu tempuh (menit)	14	997	
Jumlah kecamatan	3	33	16,41
Rata-rata Jarak Tempuh	4,97	30,21	16,41



Gambar 4. 81 Perbandingan Rata-rata Waktu Tempuh Kecamatan Menuju Pusat Pemerintahan Kota Batu Dengan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil perbandingan, rata-rata waktu tempuh kecamatan pada Kota Batu menuju pusat pemerintahannya lebih kecil dibandingkan rata-rata waktu tempuh kecamatan pada kabupaten induknya. Kecilnya rata-rata waktu tempuh kecamatan pada Kota Batu menuju pusat pemerintahannya memperlihatkan bahwa pusat pelayanan pemerintahan Kota Batu sangat dekat dibandingkan pusat pemerintahan kabupaten induknya.

B. Penentuan Skor Basis Indikator

Penentuan skor indikator merupakan langkah yang dilakukan selanjutnya setelah penilaian pada masing-masing basis indikator. Basis indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, masing-masing diukur dengan metode skoring sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No 78 Tahun 2007.

Skor yang diberikan terdiri dari skala 1 sampai 5 yaitu:

- a. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata pembanding.
- b. Pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata pembanding.
- c. Pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata pembanding.
- d. Pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata pembanding.
- e. Pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata pembanding

Hasil skor yang diberikan pada masing-masing indikator selanjutnya akan dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan dalam PP No. 78 Tahun 2007.

A. Penentuan Skor Luas Wilayah

Penentuan skor luas wilayah daerah otonomi Batu dilakukan berdasarkan besaran nilai rata-rata pembanding yang terdapat pada kedua sub indikator luas wilayah yaitu luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah efektif. Berdasarkan hasil perhitungan, maka persentase luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah efektif Kota Batu masing-masing sebesar 5,23% dan 4,14% dari nilai persentase Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan nilai perbandingan $< 20\%$, maka skor yang diberikan untuk sub indikator luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah efektif pada daerah otonomi adalah 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.142.

Tabel 4. 142
Skoring Luas Wilayah Daerah Otonomi

Kategori	Kota Batu (Ha)	Kab. Malang (Ha)	Persentase Perbandingan Dengan Kab. Malang (%)	SKOR
Luas wilayah keseluruhan	19.908,72	380.907,23	5,23	1
Luas wilayah efektif	11.466,62	276.791,90	4,14	1

B. Penentuan Skor Kependudukan

Penentuan skor kependudukan daerah otonomi Batu dilakukan berdasarkan besaran nilai rata-rata pembandingan pada kedua sub indikator kependudukan yaitu jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan, maka persentase jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Batu masing-masing sebesar 7,86% dan 206,05% dari nilai Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan nilai perbandingan jumlah penduduk < 20%, maka skor yang diberikan untuk sub indikator jumlah penduduk pada daerah otonomi adalah 1. Sedangkan nilai perbandingan kepadatan penduduk menunjukkan > 80% maka skor yang diberikan adalah 5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.143.

Tabel 4. 143
Skoring Kependudukan Daerah Otonomi

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Perbandingan Dengan Kab. Malang (%)	SKOR
Jumlah Penduduk (jiwa)	19.908,72	380.907,23	7,86	1
Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)	11.466,62	276.791,90	206,05	5

C. Penentuan Skor Kemampuan Ekonomi

Penentuan skor kemampuan ekonomi daerah otonomi Batu dilakukan berdasarkan besaran nilai rata-rata pembandingan masing-masing sub indikator kemampuan ekonomi. Adapun skor yang diberikan pada besaran nilai rata-rata pembandingan masing-masing sub indikator kemampuan ekonomi daerah otonomi diuraikan pada tabel 4.144.

Tabel 4. 144
Skoring Kemampuan Ekonomi Kota Batu

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Perbandingan Dengan Kab. Malang (%)	SKOR
PDRB Non Migas Perkapita	12.830.414	11.443.812,81	112,12	5
Pertumbuhan Ekonomi	6,74	5,25	123,38	5
Kontribusi PDRB Non Migas Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur	0,39	4,04	9,65	1

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai perbandingan PDRB non migas perkapita dan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi Batu > 80% maka skor yang diberikan

adalah 5. Sedangkan nilai perbandingan kontribusi PDRB terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur < 20% maka skor yang diberikan adalah 1.

D. Penentuan Skor Potensi Daerah

Penentuan skor potensi daerah otonomi Batu dilakukan berdasarkan hasil nilai rata-rata pembanding sub indikator potensi daerah yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun skor yang diberikan pada besaran nilai rata-rata pembanding masing-masing sub indikator potensi daerah diuraikan pada tabel 4.145.

Tabel 4. 145
Skoring Potensi Daerah Kota Batu

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Perbandingan Dengan Kab. Malang (%)	SKOR
Rasio lembaga keuangan	8,34	3,94	211,68	5
Rasio pasar per 10.000 penduduk	0,19	0,13	146,15	5
Rasio pertokoan per 10.000 penduduk	113,68	10,57	1.075,50	5
Rasio sekolah per penduduk usia SD	0,005	0,006	83,33	5
Rasio sekolah per penduduk usia SLTP	0,004	0,004	100	5
Rasio sekolah per penduduk usia SLTA	0,002	0,001	200	5
Rasio tenaga kesehatan	20,58	10,24	200,98	5
Rasio fasilitas kesehatan	11,50	12,32	93,34	5
Persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor	68,16	55,15	123,59	5
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan	0,012	0,004	300	5
Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	99,35	99,81	99,54	5
Persentase tenaga kerja berpendidikan SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	418,20	632,14	66,16	4
Persentase tenaga kerja berpendidikan S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	114,43	76,73	149,13	5
Rasio pegawai negeri sipil (PNS) per 10.000 penduduk	181,23	74,71	242,58	5

Berdasarkan hasil pengukuran, pada umumnya nilai perbandingan pada masing-masing sub indikator potensi daerah > 80%, sehingga skor yang diberikan adalah 5. Namun untuk nilai perbandingan persentase tenaga kerja berpendidikan SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas daerah otonomi Batu < 80% maka skor yang diberikan adalah 4.

E. Penentuan Skor Kemampuan Keuangan

Penentuan skor kemampuan keuangan daerah otonomi Batu dilakukan berdasarkan besaran nilai rata-rata pembanding masing-masing sub indikator kemampuan keuangan yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun skor yang diberikan pada besaran nilai rata-rata pembanding masing-masing sub indikator kemampuan keuangan daerah otonomi diuraikan pada tabel 4.146.

Tabel 4. 146
Skoring Kemampuan Keuangan Kota Batu

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Perbandingan Dengan Kab. Malang (%)	SKOR
Jumlah penerimaan sendiri (000 Rp)	73.090.933,49	333.970.428,31	21,89	2
Rasio PDS per kapita (Rp)	353.130	137.702	256,44	5
Rasio PDS terhadap PDRB non migas (%)	2,75	1,20	229,16	5

Berdasarkan hasil pengukuran, sebagian besar nilai perbandingan masing-masing sub indikator kemampuan keuangan Kota Batu > 80%, maka skor yang diberikan pada masing-masing sub indikator adalah 5. Namun untuk nilai perbandingan jumlah pendapatan daerah sendiri Kota Batu >20% sehingga skor yang diberikan adalah 2.

F. Penentuan Skor Sosial Budaya

Penentuan skor sosial budaya Kota Batu dilakukan berdasarkan besaran nilai rata-rata pembandingan masing-masing sub indikator sosial budaya yaitu rasio sarana peribadatan, rasio sarana olahraga dan jumlah balai pertemuan. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai perbandingan rasio sarana peribadatan daerah otonomi Batu > 80%, maka skor yang diberikan adalah 5. Sedangkan nilai perbandingan rasio sarana olahraga pada Kota Batu > 20%, maka skor yang diberikan adalah 2. Dan skor yang diberikan untuk sub indikator jumlah balai pertemuan pada Kota Batu adalah 1 karena nilai perbandingannya < 20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.147.

Tabel 4. 147
Skoring Sosial Budaya Kota Batu

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Perbandingan Dengan Kab. Malang (%)	SKOR
Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	8,94	9,95	89,87	5
Rasio sarana olahraga per 10.000 penduduk	0,43	1,44	29,86	2
Jumlah balai pertemuan	1	5	20	1

G. Penentuan Skor Sosial Politik

Penentuan skor sosial politik Kota Batu dilakukan berdasarkan besaran nilai rata-rata pembandingan pada kedua sub indikator rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif terhadap penduduk yang memiliki hak pilih dan jumlah organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan hasil perhitungan, maka persentase rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif terhadap penduduk yang memiliki hak pilih dan jumlah organisasi kemasyarakatan masing-masing sebesar 108,20% dan 6,40% dari nilai persentase Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan nilai perbandingan jumlah organisasi

kemasyarakatan Kota Batu < 20% maka skor yang diberikan adalah 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.148.

Tabel 4. 148
Skoring Sosial Budaya Kota Batu

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Perbandingan Dengan Kab. Malang (%)	SKOR
Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif terhadap penduduk yang memiliki hak pilih	91.04	84.14	108.20	5
Jumlah organisasi kemasyarakatan	24	375	6,40	1

H. Penentuan Skor Pertahanan

Penentuan skor pertahanan dilakukan berdasarkan besaran nilai rata-rata pembandingan masing-masing sub indikator pertahanan yaitu rasio aparat pertahanan terhadap luas wilayah dan karakteristik wilayah berdasarkan sudut pandang pertahanan. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase rasio aparat pertahanan Kota Batu sebesar 116,36% dari nilai rasio kabupaten induknya. Hal ini menunjukkan nilai perbandingan > 80% maka skor yang diberikan adalah 5. Sedangkan karakteristik wilayah daerah otonomi memiliki kedudukan yang sama dengan karakteristik wilayah kabupaten induknya, maka skor yang diberikan adalah 5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.149.

Tabel 4. 149
Skoring Pertahanan Kota Batu

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Perbandingan Dengan Kab. Malang (%)	SKOR
Rasio aparat pertahanan terhadap luas wilayah	4,98	4,28	116,36	5
Karakteristik wilayah berdasarkan sudut pandang pertahanan	1	1	100	5

I. Penentuan Skor Keamanan

Penentuan skor keamanan dilakukan berdasarkan besaran nilai rata-rata pembandingan sub indikator keamanan yaitu rasio aparat keamanan terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase rasio aparat keamanan Kota Batu sebesar 84,37% dari nilai rasio kabupaten induknya. Hal ini menunjukkan nilai perbandingan >80% maka skor yang diberikan adalah 5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.150.

Tabel 4. 150
Skoring Keamanan Kota Batu

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Perbandingan Dengan Kab. Malang (%)	SKOR
Rasio aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	14,20	16,83	84,37	5

J. Penentuan Skor Kesejahteraan Masyarakat

Penentuan skor kesejahteraan masyarakat dilakukan berdasarkan besaran nilai rata-rata pembandingan yang terdapat pada sub indikator kesejahteraan masyarakat yaitu indeks pembangunan manusia yang telah dijabarkan sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase indeks pembangunan manusia Kota Batu sebesar 105,52% dari nilai indeks kabupaten induknya. Hal ini menunjukkan nilai perbandingan > 80%, maka skor yang diberikan untuk sub indikator indeks pembangunan manusia adalah 5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.151.

Tabel 4. 151
Skoring Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Perbandingan Dengan Kab. Malang (%)	SKOR
Indeks pembangunan manusia	73,74	69,88	105,52	5

K. Penentuan Skor Rentang Kendali

Penentuan skor rentang kendali dilakukan berdasarkan besaran nilai rata-rata pembandingan pada masing-masing sub indikator rentang kendali yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun skor yang diberikan pada besaran nilai rata-rata pembandingan masing-masing sub indikator rentang kendali daerah otonomi diuraikan pada tabel 4.152.

Tabel 4. 152
Skoring Rentang Kendali Kota Batu

Kategori	Kota Batu	Kab. Malang	Persentase Perbandingan Dengan Kab. Malang (%)	SKOR
Rata-rata jarak tempuh kecamatan menuju pusat pemerintahan	2,97	19,97	14,87	1
Rata-rata jarak tempuh kecamatan menuju pusat pemerintahan	4,97	30,21	16,41	1

Berdasarkan hasil pengukuran, keseluruhan nilai perbandingan masing-masing sub indikator kemampuan keuangan Kota Batu < 20%, maka skor yang diberikan untuk masing-masing sub indikator rentang kendali adalah 1.

Kemampuan daerah otonomi ditentukan berdasarkan nilai total keseluruhan indikator. Nilai total seluruh indikator diperoleh dari hasil perkalian antara hasil skoring dengan bobot masing-masing indikator yang telah ditentukan oleh PP No. 78 Tahun 2007. Adapun nilai total untuk seluruh indikator diuraikan pada tabel 4.153.

Tabel 4. 153
Nilai Total Seluruh Indikator Daerah Otonomi Batu

INDIKATOR	BOBOT	SKOR	NILAI
Luas Daerah			
Luas wilayah keseluruhan	2	1	2
Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3	1	3
Kependudukan			
Jumlah Penduduk	15	1	15
Kepadatan Penduduk	5	5	25
Kemampuan Ekonomi			
PDRB Non Migas PerKapita	5	5	25
Pertumbuhan Ekonomi	5	5	25
Kontribusi PDRB Non Migas	5	1	5
Potensi Daerah			
Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	2	5	10
Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1	5	5
Rasio pasar per 10.000 penduduk.	1	5	5
Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1	5	5
Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1	5	5
Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.	1	5	5
Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	1	5	5
Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1	5	5
Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.	1	5	5
Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1	5	5
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1	5	5
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1	4	4
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1	5	5
Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1	5	5
Kemampuan Keuangan			
Jumlah PDS	5	2	10
Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5	5	25
Rasio PDS terhadap PDRB Non Migas	5	5	25
Sosial Budaya			
Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2	5	10
Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.	2	2	4
Jumlah balai pertemuan	1	1	1
Sosial Politik			
Rasio penduduk yang ikut pemilu legislative penduduk yang mempunyai hak pilih	4	5	20
Jumlah organisasi kemasyarakatan.	2	1	2
Pertahanan			
Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3	5	15
Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.	2	5	10
Keamanan			
Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	5	5	25
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat			
Indeks Pembangunan Manusia	5	5	25
Rentang Kendali			
Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).	2	1	2
Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).	3	1	3
TOTAL KESELURUHAN	100	138	346

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai total keseluruhan basis indikator adalah 346. Hal ini menunjukkan Kota Batu **MAMPU** sebagai daerah otonomi hasil pemekaran wilayah. Kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi hasil pemekaran ditunjukkan oleh nilai total keseluruhan indikator Kota Batu berada pada rentang 340s/d491 sesuai rentang kelulusan yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.154.

Tabel 4. 154
Kedudukan Nilai Total Indikator Kota Batu
Pada Kategori Kelulusan PP No. 78 Tahun 2007

Nilai Total Indikator Kota Batu	Kategori Kelulusan PP No.78 Tahun 2007		
	Kategori	Interval Nilai Total Indikator	Keterangan
346	Sangat Mampu	420 s/d 500	
	Mampu	340 s/d 419	
	Kurang Mampu	260 s/d 339	MAMPU
	Tidak Mampu	180 s/d 259	
	Sangat Tidak Mampu	100 s/d 179	

4.3.2 Evaluasi Tingkat Kemampuan Kota Batu Sebagai Daerah Otonomi Berdasarkan Syarat Fisik Kewilayahan

Evaluasi kemampuan daerah otonomi berdasarkan syarat fisik kewilayahan dilakukan dengan melihat jumlah wilayah administrasi yang terdapat pada suatu wilayah. Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah, pembentukan kabupaten/kota minimal terdiri dari 4 (empat) kecamatan.

Kota Batu sebelumnya merupakan bagian kota administratif Kabupaten Malang. Kota Batu resmi berdiri sebagai daerah otonomi pada tanggal 17 Oktober 2001 yang ditetapkan melalui UU No. 11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu dengan 3 (tiga) wilayah administrasi yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Pembentukan Kota Batu mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dimana persyaratan pembentukannya mengikuti PP No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Berdasarkan syarat fisik kewilayahan yang tercantum dalam PP No. 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, Kota Batu belum memenuhi syarat sebagai daerah otonomi. Hal ini dikarenakan pada saat pembentukan daerah otonomi Kota Batu masih mengacu pada PP No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan

daerah otonomi. Untuk itu diperlukan adanya penambahan wilayah administrasi Kota Batu sebagai penyempurnaan dan pemenuhan syarat administrasi yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 yaitu daerah otonomi yang terbentuk minimal terdiri dari 4 kecamatan.

Kondisi ini memperlihatkan kelemahan PP No. 78 Tahun 2007 sebagai basis peraturan pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah otonomi yang belum menegaskan syarat agar daerah otonomi yang terbentuk dengan peraturan lama menyesuaikan dengan peraturan baru.

4.4 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kemampuan Kota Batu dan hasil pembahasan karakteristik wilayah Kota Batu terkait komponen evaluasi PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, disusun rekomendasi yang terfokus pada hal-hal yang harus dikejar Kota Batu untuk meningkatkan kemampuan Kota Batu sebagai daerah otonomi. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

Tabel 4. 155 Rekomendasi

Variabel PP No. 78 Tahun 2007	Hasil Analisa	Rekomendasi
Syarat Fisik Kewilayahan dimana kabupaten/kota minimal terdiri dari 4 kecamatan.	Kota Batu belum memenuhi syarat fisik kewilayahan dimana Kota Batu memiliki 3 kecamatan. Hal ini dikarenakan pada saat pembentukan Kota Batu mengacu pada PP 129 Tahun 2000	Penambahan jumlah kecamatan Kota Batu untuk memenuhi syarat fisik kewilayahan yang tercantum dalam PP No. 78 Tahun 2007 dimana penambahan jumlah kecamatan ini dapat berasal dari kecamatan yang berada di luar wilayah Kota Batu.
Syarat Teknis terdiri dari: - luas daerah - kependudukan - potensi daerah - kemampuan keuangan - kemampuan ekonomi - sosial budaya - sosial politik - pertahanan - keamanan - tingkat kesejahteraan masyarakat - rentang kendali	Berdasarkan hasil perbandingan, sebagian besar presentase masing-masing basis indikator Kota Batu memiliki nilai > 50% dari nilai kabupaten induknya yaitu Kabupaten Malang. Basis indikator Kota Batu yang memiliki nilai <50% dari nilai kabupaten induknya diantaranya adalah luas daerah, jumlah penduduk, kontribusi non migas, jumlah balai pertemuan dan rentang kendali.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan PDRB non migas melalui pemanfaatan potensi sektor basis Kota Batu yaitu sektor pariwisata melalui sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel, dan restaurant. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi PP No. 78 Tahun 2007, sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restaurant Kota Batu memiliki kontribusi yang paling tinggi untuk PDRB Non Migas Provinsi. • Pengembangan sektor-sektor lainnya untuk mendukung sektor utama yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan pemerintahan

		<p>Kota Batu terhadap dana maupun hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pembiayaan daerah</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan publik sesuai dengan tujuan PP No 78 Tahun 2007, yang dapat dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang tersebar pada masing-masing kecamatan Kota Batu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Batu.
--	--	---

